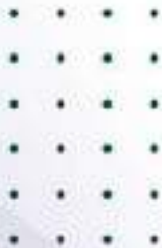




LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2025



**KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
INSPEKTORAT

Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Bangka untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sungailiat, 31 Maret 2026



INSPEKTUR,

DARIUS, S.Sos., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 197006171998031004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wata'ala, karena atas izin-Nya maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan Tim Penyusun dan Tim Reviu LPPD yang telah mengkoordinasikan pengisian Indikator Kinerja Kunci dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bangka.

Penyusunan LPPD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan upaya mengoptimalkan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta bahan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam laporan ini tertuang hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2025 meliputi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan penyelenggaraan pemerintahan umum serta memuat capaian kinerja makro kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan penerapan standar pelayanan minimal dengan menyesuaikan format dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Semoga LPPD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 ini dijadikan dasar bagi pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel dan transparan serta terus berupaya meningkatkan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2025 ini baik dari sajian data maupun pengolahan analisisnya, sehingga LPPD ini dapat tersusun guna pengambilan keputusan saat ini maupun untuk perencanaan berikutnya.

SUNGAILIAT, 25 MARET 2026

BUPATI BANGKA,



FERY INSANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
1.1. Penjelasan Umum	1
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	16
1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	44
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	51
2.1. Capaian Kinerja Makro	51
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	55
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	151
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Bangka	151
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka	151
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	152
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah	152
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Kabupaten Bangka	153
3.3. Permasalahan dan Kendala	154
3.4. Saran dan Tindak Lanjut	154
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	156
4.1. Urusan Pendidikan	156
4.2. Urusan Kesehatan	160
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	179
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	184
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	187
4.6. Urusan Sosial	195
4.7. Program dan Kegiatan	204
BAB V PENUTUP	222
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Daftar Sungai di Kabupaten Bangka Menurut Kecamatan	3
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2025	4
Tabel 1.3.	Jumlah Kelahiran, Kematian dan Migrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2025	5
Tabel 1.4.	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kab. Bangka Tahun 2025	5
Tabel 1.5.	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Tahun 2025	6
Tabel 1.6.	Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan desa di Kab. Bangka Tahun 2025	8
Tabel 1.7.	Daftar Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Tahun 2025	8
Tabel 1.8.	Daftar Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kabupaten Bangka Tahun 2025	9
Tabel 1.9.	Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bangka Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025	10
Tabel 1.10.	Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Berdasarkan Jabatan Tahun 2025	10
Tabel 1.11.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025	11
Tabel 1.12.	Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya Tahun 2025	13
Tabel 1.13.	Realisasi Belanja Menurut Jenisnya Tahun 2025	14
Tabel 1.14.	Realisasi Pembiayaan Daerah Menurut Jenisnya Tahun 2025	15
Tabel 1.15.	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan dari Hasil Capaian Kinerja Per Urusan, Capaian SDG's dan Capaian SPM	16
Tabel 1.16.	Konsistensi Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis	24
Tabel 1.17.	Rincian Program dan Kegiatan dalam P-RKPD Kab. Bangka Tahun 2025	29
Tabel 1.18.	Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Terkait Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2025	47
Tabel 1.19.	Perjanjian Kinerja, Program dan Anggran Dalam Penerapan SPM Kabupaten Bangka Tahun 2025	49
Tabel 2.1.	Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025	51
Tabel 2.2.	Klasifikasi Derajat Capaian Kinerja Sasaran	61
Tabel 2.3.	Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Tahun 2025	61
Tabel 2.4.	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi)	63
Tabel 2.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi)	64
Tabel 2.6.	Perkembangan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bangka Tahun 2023-2025	65
Tabel 2.7.	Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2023-2025	66
Tabel 2.8.	Rincian Capaian Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025	68
Tabel 2.9.	Perkembangan Komposit Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Tahun 2023-2025	70
Tabel 2.10.	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	71
Tabel 2.11.	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi)	72

Tabel 2.12.	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi)	72
Tabel 2.13.	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel)	73
Tabel 2.14.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD (Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel)	74
Tabel 2.15.	Predikat Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2025	76
Tabel 2.16.	Perkembangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Bangka Tahun 2025	77
Tabel 2.17.	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran (Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel)	77
Tabel 2.18.	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel)	78
Tabel 2.19.	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel)	78
Tabel 2.20.	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat)	79
Tabel 2.21.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD	79
Tabel 2.22.	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	80
Tabel 2.23.	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat)	81
Tabel 2.24.	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat)	81
Tabel 2.25.	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025	82
Tabel 2.26.	Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah	84
Tabel 2.27.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Standar Nasional	84
Tabel 2.28.	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah	85
Tabel 2.29.	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025	86
Tabel 2.30.	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025	86
Tabel 2.31.	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025	87
Tabel 2.32.	Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah	89
Tabel 2.33.	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah	93
Tabel 2.34.	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025	93
Tabel 2.35.	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025	93
Tabel 2.36.	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025 “Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk”	96
Tabel 2.37.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran “Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk” Tahun 2024 dengan Kondisi Tahun Sebelumnya dan Target Akhir RPD 2024-2026	97

Tabel 2.38.	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	98
Tabel 2.39.	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk)	98
Tabel 2.40.	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk)	98
Tabel 2.41.	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda)	100
Tabel 2.42.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD (Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda)	100
Tabel 2.43.	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	105
Tabel 2.44.	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda)	106
Tabel 2.45.	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda)	106
Tabel 2.46.	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)	108
Tabel 2.47.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD (Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)	109
Tabel 2.48.	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	111
Tabel 2.49.	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)	112
Tabel 2.50.	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2024 (Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)	112
Tabel 2.51.	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa)	113
Tabel 2.52.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD (Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa) ..	114
Tabel 2.53.	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	116
Tabel 2.54.	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa)	118
Tabel 2.55.	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa)	118
Tabel 2.56.	Capaian Kinerja atas Sasaran Tahun 2025 (Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka)	118
Tabel 2.57.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD (Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat) .	119
Tabel 2.58.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2025	119
Tabel 2.59.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2021-2025	120

Tabel 2.60.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (Persen) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2025	121
Tabel 2.61.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2021-2025	121
Tabel 2.62.	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	122
Tabel 2.63.	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat)	123
Tabel 2.64.	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat)	123
Tabel 2.65.	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan)	125
Tabel 2.66.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan Pada Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD Tahun 2024-2026	125
Tabel 2.67.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Kategori Wisatawan di Kabupaten Bangka Tahun 2020-2025	127
Tabel 2.68.	Objek Wisata di Kabupaten Bangka	129
Tabel 2.69.	Event-Event Wisata di Kabupaten Bangka Tahun 2025	132
Tabel 2.70.	Daftar Hotel/Penginapan/Homestay Di Kabupaten Bangka Tahun 2025	134
Tabel 2.71.	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan	136
Tabel 2.72.	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan)	137
Tabel 2.73.	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan)	137
Tabel 2.74.	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Pemerataan Pendapatan)	138
Tabel 2.75.	Perkembangan Nilai Indeks Gini Kabupaten Bangka Tahun 2021-2025	139
Tabel 2.76.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD	139
Tabel 2.77.	Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Tahun 2025	140
Tabel 2.78.	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	141
Tabel 2.79.	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Pemerataan Pendapatan)	141
Tabel 2.80.	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Pemerataan Pendapatan)	142
Tabel 2.81.	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)	143
Tabel 2.82.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)	145
Tabel 2.83.	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	145

Tabel 2.84.	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)	146
Tabel 2.85.	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)	146
Tabel 2.86.	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pencapaian Sasaran Strategis Kabupaten Bangka Tahun 2025	147
Tabel 2.87.	Target dan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025	148
Tabel 2.88.	Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 Menurut Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka	150
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025	153
Tabel 3.2.	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025	154
Tabel 4.1.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2025	156
Tabel 4.2.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2025	157
Tabel 4.3.	Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2025	158
Tabel 4.4.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2025	159
Tabel 4.5.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2025	159
Tabel 4.6.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2025	160
Tabel 4.7.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2025	167
Tabel 4.8.	Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2025	177
Tabel 4.9.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2025	178
Tabel 4.10.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2025	178
Tabel 4.11.	Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2025	179
Tabel 4.12.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2025	180
Tabel 4.13.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2025	182
Tabel 4.14.	Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2025	184
Tabel 4.15.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2025	184
Tabel 4.16.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2025	185
Tabel 4.17.	Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2025	185
Tabel 4.18.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2025	186

Tabel 4.19.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2025 Tahun 2025	186
Tabel 4.20.	Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2025	187
Tabel 4.21.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2025	188
Tabel 4.22.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2025	188
Tabel 4.23.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tahun 2025	189
Tabel 4.24.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tahun 2025 Tahun 2025	189
Tabel 4.25.	Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tahun 2025	196
Tabel 4.26.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tahun 2025	196
Tabel 4.27.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun 2025	197
Tabel 4.28.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025	197
Tabel 4.29.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025	198
Tabel 4.30.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025	201
Tabel 4.31.	Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Urusan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025	203
Tabel 4.32.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025	204
Tabel 4.33.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025	204
Tabel 4.34.	Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025	204

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Kepadatan Penduduk per km ² di Kabupaten Bangka Tahun 2021-2025	4
Grafik 1.2.	Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2021-2025	6
Grafik 1.3.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2025	7
Grafik 1.4.	Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif di Kabupaten Bangka Tahun 2025	7
Grafik 2.1.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025	52
Grafik 2.2.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025	52
Grafik 2.3.	Tingkat Pengangguran Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025	53
Grafik 2.4.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025	54
Grafik 2.5.	Pendapatan Perkapita Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025	54
Grafik 2.6.	Perkembangan Koefisien <i>Gini</i> di Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025	55
Grafik 2.7.	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi)	72
Grafik 2.8.	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel)	78
Grafik 2.9.	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat)	81
Grafik 2.10.	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bangka Tahun 2023-2025	83
Grafik 2.11.	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas” Tahun 2025	86
Grafik 2.12.	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025	87
Grafik 2.13.	Perkembangan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019-2025	88
Grafik 2.14.	Tren Prevalensi Stunting di Kabupaten Bangka Tahun 2019-2025	90
Grafik 2.15.	Rekap Faktor Determinan Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten Bangka Menurut Aplikasi E PPGBM (Agustus 2025)	91
Grafik 2.16.	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” Tahun 2025	95
Grafik 2.17.	Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025 “Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk”	97
Grafik 2.18.	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025 “Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk”	99
Grafik 2.19.	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka Tahun 2019-2025	101
Grafik 2.20.	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda)	107
Grafik 2.21.	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)	108
Grafik 2.22.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPD	109
Grafik 2.23.	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)	112
Grafik 2.24.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka (persen), 2020-2025	114

Grafik 2.25.	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka (Juta Rupiah) 2021-2025	115
Grafik 2.26.	Konsumsi Per Kapita (Harga Berlaku) Kabupaten Bangka 2021-2025 (Juta Rupiah)	116
Grafik 2.27.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Tahun 2021-2025	120
Grafik 2.28.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2021-2025	121
Grafik 2.29.	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2025	123
Grafik 2.30.	Perkembangan <i>Spending of Money</i> (Milyar Rupiah) Tahun 2020-2025	125
Grafik 2.31.	Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Bangka Tahun 2020-2025	126
Grafik 2.32.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Bulan Tahun 2020-2025	128
Grafik 2.33.	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan)	137
Grafik 2.34.	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Pemerataan Pendapatan)	142
Grafik 2.35.	Perkembangan Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2021-2025	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bangka	2
Gambar 1.2. Peta Geologi Kabupaten Bangka	3
Gambar 2.1. Skor Penilaian Mandiri PPE Kabupaten Bangka Tahun 2025	102
Gambar 2.2. Pantai Pulau Punggur Tuing Desa Mapur Kecamatan Riau Silip	124
Gambar 2.3. Wisata Sejarah Prasasti Kota Kapur di Desa Kota Kapur, Mendo Barat	128
Gambar 2.4. Promosi Kegiatan Sungailiat Trail Run Tahun 2025	131
Gambar 2.5. Kalender Event Pariwisata Tahun 2025	132
Gambar 2.6. Desa Wisata Kampung Gedong Desa Lumut Kecamatan Belinyu	133
Gambar 2.7. Promosi Pariwisata Melalui Website exotic.bangka.go.id dan Instagram tic_bangka	135

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Bangka merupakan salah satu daerah yang memiliki perjalanan historis dan administratif yang cukup panjang dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Pada awal pembentukannya, wilayah Kabupaten Bangka secara yuridis masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pembentukan berbagai daerah tingkat II di wilayah Sumatera Selatan pada masa awal konsolidasi pemerintahan daerah pascakemerdekaan. Melalui regulasi tersebut, Kabupaten Bangka secara resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah administratif yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan dinamika perkembangan politik, ekonomi dan kebutuhan pengelolaan wilayah yang lebih efektif, muncul aspirasi masyarakat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk membentuk provinsi tersendiri yang terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan. Aspirasi tersebut didorong oleh karakteristik wilayah kepulauan, potensi sumber daya alam yang besar terutama pertambangan timah serta kebutuhan percepatan pembangunan daerah. Setelah melalui proses panjang secara politik dan administratif, pemerintah pusat akhirnya menetapkan pembentukan provinsi baru melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, wilayah Kepulauan Bangka Belitung resmi menjadi provinsi tersendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan mengenai Kabupaten Bangka kembali dipertegas melalui regulasi yang lebih mutakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Undang-undang ini menjadi landasan hukum terbaru yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai kedudukan, batas wilayah, serta penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penetapan regulasi tersebut tidak hanya berfungsi penguatan aspek legal formal keberadaan Kabupaten Bangka, tetapi juga sebagai upaya penyesuaian perkembangan sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang terus mengalami dinamika. Dengan adanya dasar hukum yang lebih mutakhir, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai isu strategis seperti pembangunan berkelanjutan, mitigasi bencana dan penguatan ketahanan wilayah.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Bangka memiliki luas kurang lebih sebesar 3.016,85 Km² dengan batas wilayah:

- sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang;
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 1.1.
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bangka



Sumber : Kabupaten Bangka Dalam Angka, 2026

Secara geografis, Kabupaten Bangka terletak di bagian utara pulau Bangka pada posisi antara 105°38' sampai 106°18' Bujur Timur dan 1°3' sampai 2°21' Lintang Selatan. Kabupaten Bangka terdiri dari 2 kategori daerah yaitu: (1) daerah pantai meliputi Kecamatan Sungailiat, sebagian wilayah Kecamatan Merawang, sebagian wilayah Kecamatan Riau Silip, sebagian wilayah Kecamatan Belinyu dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Mendo Barat; (2) daerah dataran rendah meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Mendo Barat, Pemali, Puding Besar dan Bakam.

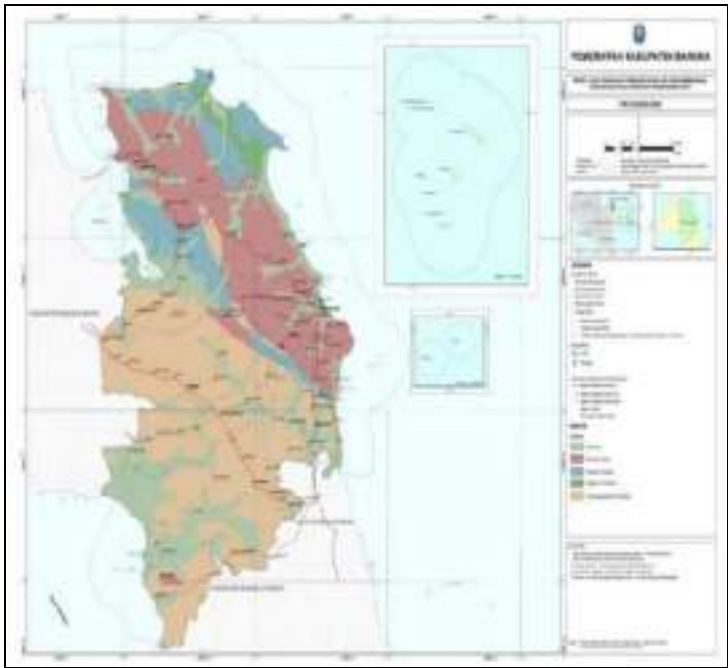
Tanah di daerah Kabupaten Bangka mempunyai pH rata-rata di bawah 5, didalamnya mengandung mineral bijih timah dan bahan galian lainnya seperti: pasir kwarsa, kaolin, batu gunung dan lain-lain. Bentuk dan keadaan tanahnya adalah sebagai berikut:

- 4% berbukit seperti Gunung Maras lebih kurang 699 m, Bukit Pelawan, Bukit Rebo dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut adalah Komplek Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dan Litosol berasal dari Batuan Plutonik Masam.
- 51% berombak dan bergelombang, tanahnya berjenis Asosiasi Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu Pasir Kwarsit dan Batuan Plutonik Masam.
- 20% lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya asosiasi Podsolik berasal dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit.
- 25% rawa dan bencah/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi Alluvial Hedromotif dan *Glei Humus* serta *Regosol* Kelabu Muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat.

Secara fisiografi, Pulau Bangka termasuk ke dalam *Sunda Land* dan merupakan bagian terangkat dari peneplain Sunda. Bila ditinjau dari sudut geologi, Pulau Bangka merupakan kelanjutan dari *Granite Belt* yang berumur Yura-Kapur yang membentang mulai dari Birma, Muangthai, Malaysia, Kepulauan Riau (Pulau Singkep, Pulau Karimun dan Pulau Kundur), Pulau Bangka dan Pulau Belitung hingga Pulau Karimata. *Granite Belt* sendiri merupakan deretan formasi batuan granit kaya akan mineral *cassiterite* yang kemudian dikenal dengan sebutan *The Tin Belt*.

Pulau-pulau dari *The Tin Belt* diinterpretasikan merupakan sisa bagian resisten dari gunung yang muncul pada masa terbentuknya *Sunda Shelf*. Pupili (1973) menyatakan bahwa Malaysia, Kepulauan Riau dan Bangka berada dalam kelompok elemen tektonik yang sama. Evolusi tektonik di wilayah ini telah dimulai sejak Paleozoikum Bawah dimana berdasarkan Teori Tektonik Lempeng bahwa daerah penunjaman (*subduction zone*) berada di bagian timur Malaysia dan pada Mesozoikum Bawah-tengah menghasilkan busur gunung api (*magmatic arc*) dalam bentuk deretan Pulau Kundur, Pulau Singkep, Pulau Bangka, Pulau Belitung dan sebagian dari Kalimantan Barat.

Gambar 1.2.
Peta Geologi Kabupaten Bangka



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka 2010-2030

Proses dan kondisi geologi Pulau Bangka sangat mempengaruhi terbentuknya potensi sumber daya bahan galian yang ada di Kabupaten Bangka. Proses geologi tersebut diantaranya berupa intrusi magma, tektonik, perlipatan, pelapukan, pengayaan (*leaching*), erosi, dan pengendapan. Sedangkan berdasarkan kondisi geologisnya yang ditunjukkan pada Gambar 1.2. Pulau Bangka dan wilayah sekitarnya berada pada Paparan Sunda atau bagian tepi dari kerak benua (*craton*) Asia. Oleh karena itu, batuan dasar penyusun Kabupaten Bangka ini selain batuan malihan adalah batuan inti benua berupa batuan beku asam atau granitik. Batuan beku asam ini yang merupakan batuan pembentuk mineral timah yang ada di Pulau Bangka.

Pada umumnya kondisi hidrologi di Kabupaten Bangka lebih didominasi oleh air permukaan sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka berhulu di daerah perbukitan yang berada di bagian tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai laut. Secara detail, Kabupaten Bangka mempunyai 38 aliran sungai, salah satunya Sungai Batu Rusa yang merupakan sungai tepanjang dengan panjang mencapai 31.250 meter yang terletak di Kecamatan Merawang. Nama dan panjang sungai-sungai di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Daftar Sungai di Kabupaten Bangka Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (m)
1.	Sungailiat	Jeliti	3.000
2.	Bakam	Telang	5.000
		Mabat	15.000
		Layang	32.500
3.	Merawang	Baturusa	31.250
4.	Puding Besar	Perai	10.000
		Kerang	8.000
		Kotawaringin	20.000
		Kayubesi	500
		Jeruk	15.000
		Lubang	6.000
5.	Mendo Barat	Mendo	28.500
		Rukam	20.000
		Air Pandan	20.000
		Sembilang	2.000
		Penagan	2.500
		Penjirang	5.000
		Kelabingil	3.000
6.	Belinyu	Panji	10.000
		Pasir	5.000
		Pejem	4.500
		Tengkalak	2.000

No.	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (m)
		Jeliti	3.000
		Bayat	9.000
		Layang	12.000
		Jelutung	12.000
		Belinyu	6.000
		Berok	3.000
		Romodong	3.000
		Bubus	4.000
		Sembuang	5.000
		Sekak	5.000
		Buntang	1.500
7.	Riau Silip	Tengkalak	5.000
		Bedukang	900
		Deniang Laut	1.300
		Mapur	21.250
		Semubur	3.000
		Perimping	2.750

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bangka Dalam Angka 2026

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 berjumlah 341.760 jiwa. Dengan luas wilayah Kabupaten Bangka seluas 3.016,85 Km², maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 sebesar 113 jiwa per km². Kondisi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024 sebanyak 337.775 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 112 jiwa per km². Secara rinci, jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2025 seperti tersaji pada Tabel 1.2 berikut.

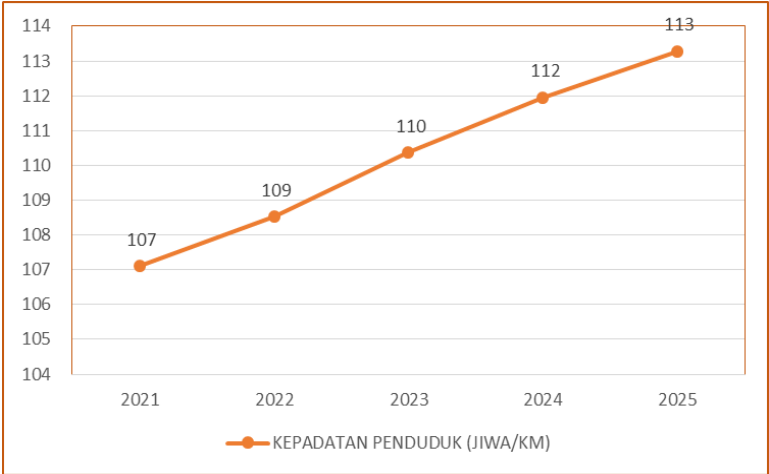
Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Sungailiat	97.317	147,05	662
2	Belinyu	52.041	503,54	103
3	Merawang	31.869	215,89	148
4	Mendo Barat	53.238	685,64	78
5	Pemali	36.357	140,46	259
6	Bakam	19.727	426,26	46
7	Riau Silip	30.262	625,91	48
8	Puding Besar	20.949	272,1	77
Kabupaten Bangka		341.760	3.016,85	113

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, 2025

Dari Grafik 1.1 diketahui bahwa selama periode 2021-2025, kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka mengalami tren yang semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan kondisi jumlah penduduk di Kabupaten Bangka yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara luas wilayah Kabupaten Bangka tetap.

Grafik 1.1.
Kepadatan Penduduk per km² di Kabupaten Bangka Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, 2025

Pertumbuhan penduduk suatu daerah dipengaruhi oleh faktor alami/demografi yaitu kelahiran (natalitas) dan kematian (mortalitas), serta faktor non alami yaitu migrasi penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2025, terdapat 11.223 orang penduduk yang datang dan sebanyak 11.391 orang penduduk yang keluar dari Kabupaten Bangka selama Tahun 2025. Sementara itu, jumlah kelahiran di Kabupaten Bangka selama Tahun 2025 sebanyak 3.087 orang dan jumlah kematian sebanyak 3.382 orang. Secara rinci, jumlah angka kelahiran, kematian dan migrasi penduduk di Kabupaten Bangka selama Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Jumlah Kelahiran, Kematian dan Migrasi Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Datang		Jumlah Penduduk Pergi		Jumlah Kelahiran	Jumlah Kematian
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan		
1	Mendo Barat	337	1.069	768	768	824	523
2	Merawang	179	651	469	488	411	292
3	Sungailiat	809	2.869	1.815	1863	278	1.018
4	Pemali	278	1.008	668	697	506	323
5	Puding Besar	125	430	238	245	344	199
6	Bakam	110	410	247	286	225	169
7	Riau Silip	265	771	433	460	297	258
8	Belinyu	444	1.468	956	990	202	600
Kabupaten Bangka		2.547	8.676	5.594	5.797	3.087	3.382

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, 2025

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2025, baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan. Secara lebih rinci, komposisi penduduk Kabupaten Bangka berdasarkan jenis kelamin seperti disajikan pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4.
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2025

Kecamatan	Penduduk				Jumlah	Sex Ratio
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Sungailiat	49.344	50,70	47.973	49,30	97.317	102,86
Belinyu	26.577	51,07	25.464	48,93	52.041	104,37
Merawang	16.323	51,22	15.546	48,78	31.869	105,00
Mendo Barat	27.706	52,04	25.532	47,96	53.238	108,51
Pemali	18.569	51,07	17.788	48,93	36.357	104,39
Bakam	10.277	52,10	9.450	47,90	19.727	108,75
Riau Silip	15.699	51,88	14.563	48,12	30.262	107,80
Puding Besar	10.935	52,20	10.014	47,80	20.949	109,20
2025	175.430	51,33	166.330	48,67	341.760	105,47
2024	173.294	51,31	164.461	48,69	337.755	105,37
2023	170.809	51,30	162.155	48,70	332.964	105,34
2022	167.890	51,28	159.504	48,72	327.394	105,26
2021	165.869	51,34	157.238	48,66	323.107	105,49

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, 2025

Berdasarkan Tabel 1.4, jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 sebanyak 175.430 jiwa, mengalami peningkatan sebesar 1,23 % dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk perempuan sebanyak 166.330 jiwa, mengalami peningkatan sebesar 1,14 % dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk perempuan yang ditunjukkan dengan angka sex ratio Kabupaten Bangka sebesar 105. Hal ini berarti bahwa di setiap 105 orang penduduk laki-laki, terdapat 100 orang penduduk perempuan. Angka sex ratio di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka juga lebih besar dari 100, yang menunjukkan bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka selama periode Tahun 2021-2025 mengalami tren yang semakin meningkat sebagaimana tersaji pada Grafik 1.2 berikut.

Grafik 1.2.
Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, 2021-2025 (diolah)

Pada Tahun 2025, pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka sebesar 1,23 persen, mengalami penurunan sebesar 0,25 % dibandingkan Tahun 2024. Menurut jenis kelamin, maka pertumbuhan penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk perempuan pada Tahun 2025 sebesar 1,14 persen, mengalami penurunan sebesar 0,28 % dibandingkan Tahun 2024. Sementara itu, pertumbuhan penduduk laki-laki pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,22 % menjadi 1,23 persen.

Selama periode 2021-2025, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka sebesar 1,29 % dimana rata-rata laju pertumbuhan penduduk perempuan sebesar 1,32 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk laki-laki yaitu sebesar 1,26 persen. Sebaran jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2025 berdasarkan kelompok umur seperti tercantum pada berikut.

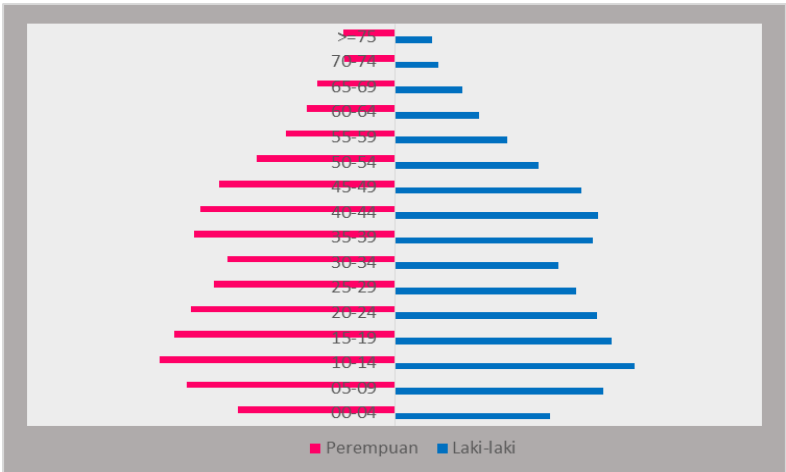
Tabel 1.5.
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Tahun 2025

Kelompok Umur	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
00-04	11.145	6,35	10.594	6,37	21.739	6,36
05-09	14.977	8,54	14.085	8,47	29.062	8,50
10-14	17.183	9,79	15.930	9,58	33.113	9,69
15-19	15.570	8,88	14.921	8,97	30.491	8,92
20-24	14.534	8,28	13.818	8,31	28.352	8,30
25-29	13.010	7,42	12.293	7,39	25.303	7,40
30-34	11.720	6,68	11.311	6,80	23.031	6,74
35-39	14.206	8,10	13.572	8,16	27.778	8,13
40-44	14.564	8,30	13.168	7,92	27.732	8,11
45-49	13.388	7,63	11.869	7,14	25.257	7,39
50-54	10.279	5,86	9.387	5,64	19.666	5,75
55-59	8.082	4,61	7.338	4,41	15.420	4,51
60-64	6.031	3,44	5.927	3,56	11.958	3,50
65-69	4.860	2,77	5.266	3,17	10.126	2,96
70-74	3.173	1,81	3.381	2,03	6.554	1,92
>=75	2.708	1,54	3.470	2,09	6.178	1,81
Jumlah	175.430	100,00	166.330	100,00	341.760	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, 2025

Menurut kelompok umur dan jenis kelamin, penduduk di Kabupaten Bangka didominasi oleh penduduk usia 10-14 tahun, yaitu sebesar 9,69 % dari total penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2025. Kelompok umur berikutnya yang menduduki jumlah kedua terbanyak adalah usia 15-19 tahun yaitu sebesar 8,92 persen. Sementara itu, kelompok usia dengan jumlah paling sedikit adalah kelompok usia di atas 75 tahun. Sebaran penduduk tersebut, jika digambarkan dalam grafik akan membentuk piramida yang mengerucut ke atas sebagaimana tergambar pada Grafik berikut.

Grafik 1.3.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2025

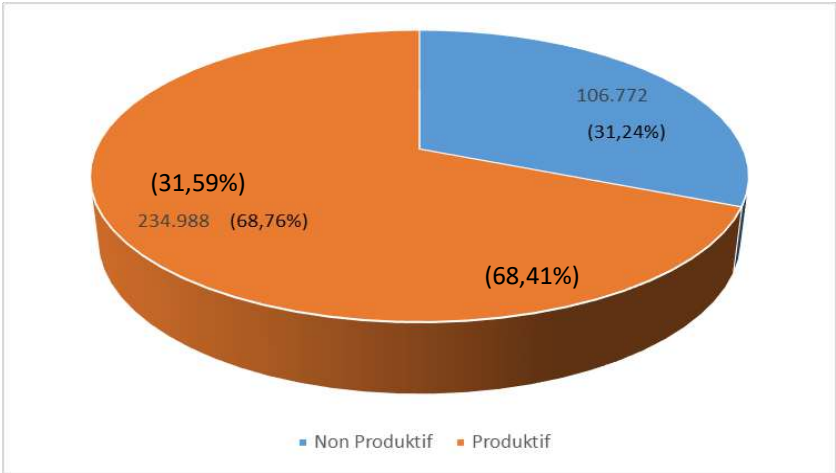


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, 2025 (Diolah)

Piramida sebagaimana tergambar pada Grafik 1.3 disebut juga piramida penduduk muda atau ekspansif, yang menunjukkan bahwa komposisi penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tua. Selain itu, penggambaran bentuk piramida ekspansif juga dapat menunjukkan kondisi penduduk di suatu daerah dengan angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Untuk Kabupaten Bangka, kondisi tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.3.

Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2025 juga didominasi oleh penduduk dengan usia produktif, yaitu penduduk yang berusia 15 - 64 tahun. Berdasarkan Grafik 1.4 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif sebanyak 234.988 jiwa atau sebesar 68,76 persen, sementara itu jumlah usia non produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) sebanyak 106.772 jiwa atau sebesar 31,24 persen. Dari data tersebut, dapat diketahui rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk usia produktif dengan usia non produktif di Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 yaitu sebesar 45 persen. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus mendukung 45 penduduk usia non produktif. Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif.

Grafik 1.4. Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif
di Kabupaten Bangka Tahun 2025



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, 2025 (Diolah)

d. Jumlah Kecamatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.01.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah dan Administrasi Pemerintahan dan Pulau,

Kabupaten Bangka memiliki luas wilayah ± 3.016,85 km², yang terdiri dari 8 kecamatan, 62 desa dan 19 kelurahan, dengan rincian seperti tercantum pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6.
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Bangka

No	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Kelurahan	Desa
1	Sungailiat	147,05	12	1
2	Bakam	503,54	-	9
3	Pemali	215,89	-	6
4	Merawang	685,64	-	10
5	Puding Besar	140,46	-	7
6	Mendo Barat	426,26	-	15
7	Belinyu	625,91	7	5
8	Riau Silip	272,1	-	9
Kabupaten Bangka		3.016,85	19	62

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Jumlah perangkat daerah di Kabupaten Bangka Tahun 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit dimana sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perangkat daerah termasuk kategori tipe A, 6 (enam perangkat) Perangkat Daerah termasuk kategori tipe B dan 1 (satu) Perangkat daerah tipe C. Daftar perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut.

Tabel 1.7.
Daftar Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1.	Sekretariat Daerah	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
2.	Sekretariat DPRD	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
3.	Inspektorat	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
5.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perda Kabupaten Bangka No.11/2019
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda Kabupaten Bangka No. 7/2018
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
10.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
11.	Dinas Kesehatan	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
13.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
14.	Dinas Sosial	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
16.	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan UKM	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
17.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
19.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
20.	Dinas Perhubungan	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
22.	Dinas Lingkungan Hidup	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
23.	Dinas Perikanan	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
24.	Dinas Pangan dan Pertanian	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
25.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
26.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
27.	Kecamatan Sungailiat	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
28.	Kecamatan Pemali	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
29.	Kecamatan Merawang	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
30.	Kecamatan Riau Silip	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
31.	Kecamatan Belinyu	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
32.	Kecamatan Bakam	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
33.	Kecamatan Puding Besar	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019
34.	Kecamatan Mendo Barat	Perda Kabupaten Bangka No.3/2019

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019

Begitu juga dengan jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 25 unit, berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana tersaji pada Tabel 1.8 berikut.

Tabel 1.8.
Daftar Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kabupaten Bangka

No	Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)	Dasar Hukum
A.	Dinas Pangan dan Pertanian	
1.	UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Perbup Bangka No.67/2022
2.	UPTD Balai Pembibitan Ternak	Perbup Bangka No.67/2022
3.	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Perbup Bangka No.67/2022
4.	UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	Perbup Bangka No.67/2022
B.	Dinas Perikanan	
1.	UPTD Balai Benih Ikan (BBI)	Perbup Bangka No.67/2022
2.	UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Perbup Bangka No.67/2022
C.	Dinas Kesehatan	
1.	UPTD Laboratorium Kesehatan	Perbup Bangka No.67/2022
2.	UPTD Public Safety Center 119	Perbup Bangka No.67/2022
D.	Dinas Perhubungan	
1.	UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan	Perbup Bangka No.67/2022
E.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.	UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Perbup Bangka No.67/2022
F.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	
1.	UPTD Metrologi Legal dan Pengelolaan Pasar	Perbup Bangka No.67/2022
G.	Dinas Lingkungan Hidup	
1.	UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Perbup Bangka No.67/2022
2.	UPTD Laboratorium Lingkungan	Perbup Bangka No.67/2022
3.	UPTD Persampahan dan Pertamanan	Perbup Bangka No.67/2022
H.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1.	UPTD Satuan Pendidikan Formal (TK, SD, SMP)	Perbup Bangka No.67/2022
2.	UPTD Satuan Pendidikan Nonformal (SKB)	Perbup Bangka No.67/2022
I.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A	
1.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	
J.	BPPKAD	
1.	UPTD BPPKAD di Sungailiat	Perbup Bangka No.67/2022
2.	UPTD BPPKAD di Pemali	Perbup Bangka No.67/2022
3.	UPTD BPPKAD di Kecamatan Belinyu	Perbup Bangka No.67/2022
4.	UPTD BPPKAD di Riau Silip	Perbup Bangka No.67/2022
5.	UPTD BPPKAD di Kecamatan Bakam	Perbup Bangka No.67/2022
6.	UPTD BPPKAD di Puding Besar	Perbup Bangka No.67/2022
7.	UPTD BPPKAD di Merawang	Perbup Bangka No.67/2022
8.	UPTD BPPKA di Mendo Barat	Perbup Bangka No.67/2022

Sumber: Peraturan Bupati Bangka Nomor 67 Tahun 2022

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 berjumlah 4.560 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 3.177 orang atau sebesar 69,67 % dan PPPK sebanyak 1.383 orang atau sebesar 30,33 persen. Dari 69,67 % jumlah PNS tersebut, sebanyak 3.004 orang atau sebanyak 65,88 % adalah pegawai perempuan, sementara itu pegawai laki-laki sebanyak 1.556 orang atau sebesar 34,12 %.

Berdasarkan tingkat pendidikan, maka ASN di Kabupaten Bangka didominasi oleh ASN dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 3.155 orang atau 69,19 persen, kemudian ASN dengan tingkat pendidikan D.III/SM sebanyak 697 orang atau sebesar 15,29 persen. Masih terdapat ASN dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 6 orang atau 0,13 % dan SMP sebanyak 11 orang atau

0,24 persen. Secara lebih rinci, jumlah ASN di Kabupaten Bangka berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin disajikan berikut.

Tabel 1.9.
Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Bangka
Berdasarkan Tingkat Pendidikan & Jenis Kelamin Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	PNS			PPPK			Jumlah	%
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
SD	3	3	6	-	-	-	6	0.13%
SLTP	8	3	11	-	-	-	11	0.24%
SLTA	182	113	295	17	4	21	316	6.93%
D.I	2	5	7	-	-	-	7	0.15%
D.II	19	12	31	-	-	-	31	0.68%
D.III/SM	107	372	479	48	170	218	697	15.29%
D.IV	32	32	64		8	8	72	1.58%
S.1	721	1,341	2,062	296	797	1093	3,155	69.19%
S.1 Profesi	4	7	11	12	31	43	54	1.18%
S.2	103	105	208	-	-	-	208	4.56%
S.3	2	1	3	-	-	-	3	0.07%
Jumlah	1,183	1,994	3,177	373	1,010	1,383	4,560	100.00%

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka, 2025

Berdasarkan jabatan, maka ASN Kabupaten Bangka didominasi oleh jabatan fungsional guru sebanyak 2.160 orang atau 47,37 persen. Selanjutnya adalah fungsional kesehatan sebanyak 774 orang atau 16,97 persen, fungsional teknis sebanyak 456 orang atau 10 % dan sisanya terdiri dari pegawai dengan jabatan administrasi/struktural sebanyak 1.170 orang atau 25,66 persen. Secara rinci, jumlah ASN Kabupaten Bangka berdasarkan jabatan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1.10.
Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Bangka Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	PNS			PPPK			Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Jabatan Fungsional Tertentu							
Fungsional Guru	348	823	1,171	253	736	989	2,160
Fungsional Kesehatan	94	384	478	61	235	296	774
Fungsional Teknis	163	195	358	59	39	98	456
Jumlah JFT	605	1,402	2,007	373	1,010	1,383	3,390
Jabatan Administrasi/Struktural							
Pelaksana/Fungsional Umum	359	407	766	-	-	-	766
Pengawas/Eselon IV	117	138	255	-	-	-	255
Administrator/Eselon III	85	44	129	-	-	-	129
JPT/Eselon II	17	3	20	-	-	-	20
Jumlah Struktural	578	592	1,170	-	-	-	1,170
Jumlah/Total							
Jumlah	1,183	1,994	3,177	373	1,010	1,383	4,560

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka, 2025

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.. Secara lebih rinci, laporan realisasi anggaran Kabupaten Bangka Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.11.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
PENDAPATAN DAERAH	1,184,641,848,917.00	1,192,925,755,980.24	100.69	1,268,251,881,897.22
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	209,720,085,298.00	243,059,103,573.24	115.89	193,778,804,356.22
Pajak Daerah	98,083,200,000.00	100,891,722,132.86	102.86	70,412,283,774.55
Retribusi Daerah	102,913,778,651.00	130,713,478,973.00	127.01	106,290,352,830.24
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,920,076,647.00	5,920,076,646.83	99.99	7,369,115,847.42
Lain-lain PAD yang Sah	2,803,030,000.00	5,533,825,820.55	197.42	9,707,051,904.01
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	209,720,085,298.00	243,059,103,573.24	115.89	193,778,804,356.22
PENDAPATAN TRANSFER	968,467,036,497.00	943,302,374,864.00	97.40	1,074,473,077,541.00
Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	909,207,128,116.00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0.00	0.00	0.00	131,911,451,000.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0.00	0.00	0.00	547,802,621,272.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0.00	0.00	0.00	101,694,681,362.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0.00	0.00	0.00	127,798,374,482.00
Dana Bagi Hasil (DBH)	102,137,333,000.00	99,011,123,000.00	96.93	0.00
Dana Alokasi Umum (DAU)	554,827,656,000.00	546,273,554,547.00	98.45	0.00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	171,168,382,000.00	164,492,085,111.00	96.09	0.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	828,133,371,000.00	809,776,762,658.00	97.78	909,207,128,116.00
Dana Desa	59,907,742,000.00	51,308,940,540.00	85.64	59,475,922,000.00
Insentif Fiskal	15,785,588,000.00	15,785,588,000.00	100.00	22,958,813,000.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	75,693,330,000.00	67,094,528,540.00	88.63	82,434,735,000.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	64,640,335,497.00	66,431,083,666.00	102.77	82,831,214,425.00
Pendapatan Bagi Hasil	59,165,099,497.00	61,004,747,666.00	103.10	77,872,214,425.00
Bantuan Keuangan	5,475,236,000.00	5,426,336,000.00	99.10	4,959,000,000.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	64,640,335,497.00	66,431,083,666.00	102.77	82,831,214,425.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	968,467,036,497.00	943,302,374,864.00	97.40	1,074,473,077,541.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6,454,727,122.00	6,564,277,543.00	101.69	0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6,454,727,122.00	6,564,277,543.00	101.69	0.00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6,454,727,122.00	6,564,277,543.00	101.69	0.00
JUMLAH PENDAPATAN	1,184,641,848,917.00	1,192,925,755,980.24	100.69	1,268,251,881,897.22
BELANJA DAERAH	1,228,612,070,525.65	1,160,141,606,442.29	94.42	1,258,221,056,830.05
BELANJA OPERASI	997,378,596,025.12	952,165,812,308.87	95.46	955,308,794,292.23
Belanja Pegawai	559,973,749,922.97	518,855,903,457.00	92.65	468,901,466,339.00
Belanja Barang dan Jasa	374,031,622,570.15	375,065,312,347.87	100.27	426,396,640,540.00
Belanja Subsidi	1,100,000,000.00	919,900,710.00	83.62	1,015,368,390.00
Belanja Hibah	57,232,658,032.00	52,424,465,994.00	91.59	54,300,749,456.00
Belanja Bantuan Sosial	5,040,565,500.00	4,900,229,800.00	97.21	4,694,569,567.23
JUMLAH BELANJA OPERASI	997,378,596,025.12	952,165,812,308.87	95.46	955,308,794,292.23
BELANJA MODAL	88,339,985,611.00	78,001,222,843.42	88.29	165,787,383,786.82
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,490,016,406.00	27,440,880,026.71	87.14	35,561,323,174.92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32,256,182,385.00	26,436,323,759.46	81.95	41,086,347,735.82
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19,458,858,104.00	19,192,260,953.25	98.62	84,957,344,419.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,804,067,716.00	4,720,020,054.00	98.25	4,162,666,457.08
Belanja Modal Aset Lainnya	330,861,000.00	211,738,050.00	63.99	19,702,000.00
JUMLAH BELANJA MODAL	88,339,985,611.00	78,001,222,843.42	88.29	165,787,383,786.82
BELANJA TIDAK TERDUGA	6,800,422,989.53	2,480,306,850.00	36.47	1,994,391,051.00
Belanja Tidak Terduga	6,800,422,989.53	2,480,306,850.00	36.47	1,994,391,051.00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	6,800,422,989.53	2,480,306,850.00	36.47	1,994,391,051.00
BELANJA TRANSFER	136,093,065,900.00	127,494,264,440.00	93.68	135,130,487,700.00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9,808,320,000.00	9,808,320,000.00	100.00	7,732,550,000.00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	776,642,800.00	776,642,800.00	100.00	896,828,300.00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	0.00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	125,208,103,100.00	116,609,301,640.00	93.13	126,501,109,400.00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	136,093,065,900.00	127,494,264,440.00	93.68	135,130,487,700.00
JUMLAH BELANJA	1,228,612,070,525.65	1,160,141,606,442.29	94.42	1,258,221,056,830.05
SURPLUS/DEFISIT	(43,970,221,608.65)	32,784,149,537.95	(74.55)	10,030,825,067.17
PEMBIAYAAN DAERAH	43,970,221,608.65	44,943,233,891.65	102.21	33,939,396,541.48
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43,970,221,608.65	44,943,233,891.65	102.21	33,939,396,541.48
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43,970,221,608.65	43,970,221,608.65	100.00	33,120,847,861.48
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	973,012,283.00	0.00	818,548,680.00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43,970,221,608.65	44,943,233,891.65	102.21	33,939,396,541.48
PEMBIAYAAN NETTO	43,970,221,608.65	44,943,233,891.65	102.21	33,939,396,541.48
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	77,727,383,429.60	0.00	43,970,221,608.65

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA)-Unaudited, BPPKAD Kabupaten Bangka, 2025

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tahun 2025 terdiri dari pos pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut uraian masing-masing pos anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025.

1. Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebesar Rp.1.192.925.755.980,24 atau terealisasi sebesar 100,69 % dari total anggaran pendapatan sebesar Rp.1.184.641.848.917,00. Realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp.243.059.103.573,24; pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp.943.302.374.864,00; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp.6.564.277.543,00. Secara lebih rinci, realisasi pendapatan menurut jenisnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.12.
Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
PENDAPATAN DAERAH	1,184,641,848,917.00	1,192,925,755,980.24	100.69	1,268,251,881,897.22
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	209,720,085,298.00	243,059,103,573.24	115.89	193,778,804,356.22
Pajak Daerah	98,083,200,000.00	100,891,722,132.86	102.86	70,412,283,774.55
Retribusi Daerah	102,913,778,651.00	130,713,478,973.00	127.01	106,290,352,830.24
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,920,076,647.00	5,920,076,646.83	99.99	7,369,115,847.42
Lain-lain PAD yang Sah	2,803,030,000.00	5,533,825,820.55	197.42	9,707,051,904.01
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	209,720,085,298.00	243,059,103,573.24	115.89	193,778,804,356.22
PENDAPATAN TRANSFER	968,467,036,497.00	943,302,374,864.00	97.40	1,074,473,077,541.00
Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	909,207,128,116.00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0.00	0.00	0.00	131,911,451,000.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0.00	0.00	0.00	547,802,621,272.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0.00	0.00	0.00	101,694,681,362.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0.00	0.00	0.00	127,798,374,482.00
Dana Bagi Hasil (DBH)	102,137,333,000.00	99,011,123,000.00	96.93	0.00
Dana Alokasi Umum (DAU)	554,827,656,000.00	546,273,554,547.00	98.45	0.00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	171,168,382,000.00	164,492,085,111.00	96.09	0.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	828,133,371,000.00	809,776,762,658.00	97.78	909,207,128,116.00
Dana Desa	59,907,742,000.00	51,308,940,540.00	85.64	59,475,922,000.00
Insentif Fiskal	15,785,588,000.00	15,785,588,000.00	100.00	22,958,813,000.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	75,693,330,000.00	67,094,528,540.00	88.63	82,434,735,000.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	64,640,335,497.00	66,431,083,666.00	102.77	82,831,214,425.00
Pendapatan Bagi Hasil	59,165,099,497.00	61,004,747,666.00	103.10	77,872,214,425.00

Bantuan Keuangan	5,475,236,000.00	5,426,336,000.00	99.10	4,959,000,000.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	64,640,335,497.00	66,431,083,666.00	102.77	82,831,214,425.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	968,467,036,497.00	943,302,374,864.00	97.40	1,074,473,077,541.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6,454,727,122.00	6,564,277,543.00	101.69	0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6,454,727,122.00	6,564,277,543.00	101.69	0.00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6,454,727,122.00	6,564,277,543.00	101.69	0.00
JUMLAH PENDAPATAN	1,184,641,848,917.00	1,192,925,755,980.24	100.69	1,268,251,881,897.22

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), BPPKAD Kabupaten Bangka, 2025

2. Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 mencapai Rp.1.160.141.606.442,29 atau terealisasi sebesar 94,42 % dari total anggaran belanja sebesar Rp.1.228.612.070.525,65. Realisasi belanja daerah tersebut terdiri atas realisasi belanja operasi sebesar Rp.952.165.812.308,87; belanja modal sebesar Rp.78.001.222.843,42; belanja tak terduga sebesar Rp.2.480.306.850,00 dan belanja transfer Rp.127.494.264.440,00.. Secara lebih rinci, realisasi pendapatan menurut jenisnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.13.
Realisasi Belanja Menurut Jenisnya Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
BELANJA DAERAH	1,228,612,070,525.65	1,160,141,606,442.29	94.42	1,258,221,056,830.05
BELANJA OPERASI	997,378,596,025.12	952,165,812,308.87	95.46	955,308,794,292.23
Belanja Pegawai	559,973,749,922.97	518,855,903,457.00	92.65	468,901,466,339.00
Belanja Barang dan Jasa	374,031,622,570.15	375,065,312,347.87	100.27	426,396,640,540.00
Belanja Subsidi	1,100,000,000.00	919,900,710.00	83.62	1,015,368,390.00
Belanja Hibah	57,232,658,032.00	52,424,465,994.00	91.59	54,300,749,456.00
Belanja Bantuan Sosial	5,040,565,500.00	4,900,229,800.00	97.21	4,694,569,567.23
JUMLAH BELANJA OPERASI	997,378,596,025.12	952,165,812,308.87	95.46	955,308,794,292.23
BELANJA MODAL	88,339,985,611.00	78,001,222,843.42	88.29	165,787,383,786.82
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,490,016,406.00	27,440,880,026.71	87.14	35,561,323,174.92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32,256,182,385.00	26,436,323,759.46	81.95	41,086,347,735.82
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19,458,858,104.00	19,192,260,953.25	98.62	84,957,344,419.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,804,067,716.00	4,720,020,054.00	98.25	4,162,666,457.08
Belanja Modal Aset Lainnya	330,861,000.00	211,738,050.00	63.99	19,702,000.00
JUMLAH BELANJA MODAL	88,339,985,611.00	78,001,222,843.42	88.29	165,787,383,786.82
BELANJA TIDAK TERDUGA	6,800,422,989.53	2,480,306,850.00	36.47	1,994,391,051.00
Belanja Tidak Terduga	6,800,422,989.53	2,480,306,850.00	36.47	1,994,391,051.00

JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	6,800,422,989.53	2,480,306,850.00	36.47	1,994,391,051.00
BELANJA TRANSFER	136,093,065,900.00	127,494,264,440.00	93.68	135,130,487,700.00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9,808,320,000.00	9,808,320,000.00	100.00	7,732,550,000.00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	776,642,800.00	776,642,800.00	100.00	896,828,300.00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	0.00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	125,208,103,100.00	116,609,301,640.00	93.13	126,501,109,400.00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	136,093,065,900.00	127,494,264,440.00	93.68	135,130,487,700.00
JUMLAH BELANJA	1,228,612,070,525.65	1,160,141,606,442.29	94.42	1,258,221,056,830.05

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), BPPKAD Kabupaten Bangka, 2025

3. Pembiayaan Daerah

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebesar Rp.33.885.030.741,48 atau terealisasi sebesar 102,21 % dari total anggaran pembiayaan sebesar Rp.32.066.482.061,48. Realisasi pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp.33.885.030.741,48.

Realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp.44.943.233.891,65 atau terealisasi sebesar 105,67 % dari total anggaran pembiayaan sebesar Rp.43.970.221.608,65 yang merupakan penerimaan pembiayaan terdiri dari Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp.43.970.221.608,65 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebesar Rp.973.012.283,00. Secara lebih rinci, realisasi pembiayaan menurut jenisnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.14.
Realisasi Pembiayaan Daerah Menurut Jenisnya Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4/3)*100	6
PEMBIAYAAN DAERAH	43,970,221,608.65	44,943,233,891.65	102.21	33,939,396,541.48
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43,970,221,608.65	44,943,233,891.65	102.21	33,939,396,541.48
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43,970,221,608.65	43,970,221,608.65	100.00	33,120,847,861.48
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	973,012,283.00	0.00	818,548,680.00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43,970,221,608.65	44,943,233,891.65	102.21	33,939,396,541.48
PEMBIAYAAN NETTO	43,970,221,608.65	44,943,233,891.65	102.21	33,939,396,541.48
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	77,727,383,429.60	0.00	43,970,221,608.65

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), BPPKAD Kabupaten Bangka, 2025

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja per urusan, capaian *SDG's* dan capaian SPM Tahun 2025, permasalahan pembangunan Tahun 2025 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.15.
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan dari Hasil Capaian Kinerja Per Urusan,
Capaian *SDG's* dan Capaian SPM



URUSAN PEMERINTAHAN	CAPAIAN TAHUN 2023 BERBANDING TARGET RPD 2025	RUMUSAN MASALAH
Pemerintahan Umum	Belum Tercapai (44,10)	Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Pengawas	Belum Tercapai (86,94)	
Kepegawaian	Belum Tercapai (63,66)	
Perencanaan	Belum Tercapai (90,34)	Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel
Keuangan	Belum Tercapai (80,00)	
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum Tercapai (69,42)	Kualitas Pelayanan Publik
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Belum Tercapai (88,53)	
Kearsipan	Belum Tercapai (62,86)	
Pendidikan	Belum Tercapai (76,85)	Kualitas Pendidikan
Perpustakaan	Belum Tercapai (62,59)	
Pendidikan dan Pelatihan	Belum Tercapai (87,41)	
Kepemudaan dan Olah Raga	Belum Tercapai (52,94)	
Penelitian dan Pengembangan	Belum Tercapai (71,43)	
Kesehatan	Belum Tercapai (96,26)	Kualitas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan KB	Belum Tercapai (98,87)	Laju Pertumbuhan Penduduk
Sosial	Belum Tercapai (55,42)	Standar Hidup Layak
Tenaga Kerja	Belum Tercapai (50,96)	
Pangan	Belum Tercapai (74,10)	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum Tercapai (70,34)	
Pekerjaan Umum	Belum Tercapai (67,82)	Kualitas Dan Pemerataan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belum Tercapai (75,62)	
Perhubungan	Belum Tercapai (81,65)	Jumlah Uang Yang Dibelanjakan Masyarakat
Pariwisata	Belum Tercapai (69,78)	
Kebudayaan	Belum Tercapai (51,84)	Produksi Barang Jasa Sektor Unggulan
Kelautan dan Perikanan	Belum Tercapai (76,40)	
Pertanian	Belum Tercapai (82,24)	
Perdagangan	Belum Tercapai (70,64)	
Industri	Tercapai (14,17)	Pemerataan Pendapatan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Belum Tercapai (65,25)	
Penanaman Modal	Belum Tercapai (89,77)	
Pertanahan	Belum Tercapai (66,67)	
Kewilayahan	Belum Tercapai (79,05)	Kualitas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup	Belum Tercapai (69,04)	

Sumber: RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Akuntabilitas kinerja menjadi suatu hal yang penting dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

governance). Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terus menerus dilakukan, namun ada beberapa permasalahan diantaranya adalah:

- Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi
- Belum optimalnya capaian evaluasi reformasi birokrasi, karena ada beberapa area perubahan yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.
- Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah
- Belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran berdampak pada kurang optimalnya pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan
- Belum sempurnanya seluruh unsur-unsur kunci dalam perencanaan (tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama) pada seluruh Perangkat daerah serta keberlanjutan implelementasi manajemen kinerja
- Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
- Belum optimalnya cakupan akses teknologi, informasi dan komunikasi
- Belum optimalnya integrasi sistem informasi
- Belum terpetakannya secara keseluruhan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk layanan administrasi kepegawaian
- Belum optimalnya program pengembangan kompetensi sebagai salah satu infrastruktur pendukung manajemen talenta ASN.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Namun demikian, pembangunan pendidikan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain:

- Belum optimalnya manajemen pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah
- Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD sehingga pembiayaan pembangunan daerah masih sangat bergantung dengan dana dari pemerintah pusat.

3. Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat

Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif dan inovatif, sarana pelayanan publik yang inklusif, *open government* melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan di antaranya:

- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.
- Belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik.
- Belum optimalnya peran teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan indek SPBE masih dalam kategori cukup.

4. Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Namun demikian, pembangunan pendidikan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain:

- Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang berkisar 8,32 tahun atau setara kelas VIII akibat masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka melanjutkan antar jenjang pendidikan.
 - Terjadi kenaikan Angka Putus Sekolah (APUS) SD/MI dan Angka Putus Sekolah (APUS) SMP/ MTs serta cakupan PAUD yang masih sangat rendah.
 - Akar masalah yang mempengaruhi capaian kemampuan literasi SD/MI dan SMP/MTs adalah masih kurangnya Indeks Distribusi Guru yaitu Tahun 2023
 - sebesar 0,38 untuk jenjang SD dan 0,32 untuk jenjang SMP/MTs, serta masih kurangnya Kecukupan Formasi Guru ASN untuk Sekolah sebesar 5,5% untuk jenjang SMP/Mts.
 - Akar masalah yang memengaruhi capaian Kemampuan Numerasi SD/MI dan SMP/MTs tahun 2023 meliputi Indeks Distribusi Guru sebesar 0,38 untuk jenjang SD/MI dalam kategori masih kurang dan 0,32 untuk jenjang SMP/MTs.
 - Rendahnya Iklim inklusivitas SD/MI dan SMP/MTs
 - Masih rendahnya angka harapan lama sekolah yang berkisar 13,11 tahun masih dibawah angka nasional
 - Kualitas dan kapasitas tenaga pengajar masih perlu ditingkatkan
 - Ketersediaan tenaga pengajar antar wilayah belum merata
 - Akses menuju sarana pendidikan jauh
 - Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai SPM
5. Kualitas Kesehatan Masyarakat Pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain:
- Masih rendahnya angka harapan hidup yaitu 73,03 masih di bawah angka nasional
 - Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu hamil
 - Belum maksimalnya sosialisasi terkait konsumsi gizi ibu hamil, dan pencegahan kehamilan di usia dini
 - Masih tingginya kasus penyakit tidak menular yang menjadi faktor penyerta pada komplikasi kehamilan
 - Masih belum meratanya kemampuan layanan fasilitas kesehatan, khususnya di tingkat primer dalam menangani kedaruratan kehamilan
 - Belum optimalnya pelaksanaan deteksi dini terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - Kondisi lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan lingkungan sehingga meningkatkan angka penyakit menular
6. Laju Pertumbuhan Penduduk
- Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, akan tetapi juga dapat menjadi hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini akan terjadi apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, serta kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan. Dalam pelaksanaannya, dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain:

- Pemahaman masyarakat tentang kependudukan masih rendah
- Pelaksanaan advokasi dan komunikasi informasi edukasi belum efektif
- Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak
- Pengembangan Data base kependudukan yang belum optimal

7. Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Dalam peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda terdapat beberapa permasalahan antara lain:

- Belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan gender
- Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
- Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender
- Angka rata-rata perkawinan usia anak yang masih di atas angka rata-rata nasional
- Belum optimalnya penanganan terhadap anak korban bencana/konflik
- Belum optimalnya pembentukan Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak

8. Standar Hidup Layak Masyarakat

Untuk meningkatkan standar hidup layak masyarakat ditemukan berbagai permasalahan antara lain:

- Pendidikan angkatan kerja yang relatif rendah
- *Soft skill* angkatan kerja yang kurang
- Sebaran tenaga kerja yang tidak merata
- Jumlah Uang yang Dibelanjakan Masyarakat
- Pendataan yang belum maksimal baik untuk program jaminan sosial, rumah tangga miskin dan rentan, dan penerima bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan Nasional.
- Masyarakat miskin belum sepenuhnya tercover layanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan
- Perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang masalah sosial belum optimal.

9. Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur

a. Jalan dan Jembatan

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan serta untuk meningkatkan arus distribusi barang, jasa, dan orang utamanya dalam mendukung perekonomian. Dalam pelaksanaannya yang masih perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- Masih adanya jalan dan jembatan dalam kondisi sedang dan rusak, serta terdapat jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar
- Terdapat ruas jalan non status yang mempunyai fungsi strategis dan perlu penanganan

b. Sumber Daya Air

Air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian. Sehingga dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu diperhatikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Belum adanya pengujian kualitas sungai dan penggunaan air sungai sebagai sumber air baku.
- Belum adanya identifikasi cadangan air baku yang *sustainable* dan memiliki kapasitas yang cukup untuk melayani rumah tangga.
- Kondisi sumber air baku eksisting yang tidak terpelihara dan tercemar aktivitas pertambangan
- Masih adanya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sedang dan rusak ringan.
- Kebutuhan terhadap infrastruktur penampung air, seperti embung, kolam retensi dan waduk buatan sebagai sumber air minum dan irigasi
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melindungi sumber-sumber air bersih.

c. Air Minum dan Sanitasi

Ketersediaan air minum dan pelayanan sanitasi menjadi hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan permasalahan yang harus diatasi yaitu:

- Keterbatasan kuantitas dan kualitas air minum di wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai standar SDG's sehingga pelayanan air minum perkotaan dan perdesaan belum optimal serta keterbatasan sumber daya pengelolaan air minum
- Akses air minum aman sesuai dengan Permenkes 2 Tahun 2023 masih rendah
- Akses penyediaan air bersih, khususnya jaringan perpipaan masih terfokus ke wilayah perkotaan, sedangkan wilayah perdesaan Sebagian besar masih mengandalkan air tanah dan sumber-sumber air permukaan lainnya.
- Akses pelayanan sanitasi air limbah domestik masih harus dikembangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perlunya peningkatan kapasitas pengelola instalasi pengolahan limbah domestik komunal.
- Belum maksimalnya ketersediaan sistem air limbah setempat maupun sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
- Masih rendahnya keberfungsian infrastruktur air minum dan air limbah terbangun
- Belum maksimalnya pengelolaan air limbah domestik (lumpur tinja) sehingga akses sanitasi aman masih sangat rendah
- Belum maksimalnya pengelolaan persampahan, ditandai dengan tidak berfungsinya infrastruktur TPS3R terbangun
- Kurangnya keterlibatan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan persampahan, seperti pemilahan sampah rumah tangga di rumah tangga, pengelolaan sampah di TPS-TPS, dan kontribusi iuran persampahan

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- Masih tingginya angka Backlog/kebutuhan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

- Beragamnya besaran alokasi bantuan stimulan penanganan RTLH dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota maupun CSR berpotensi ketidaksamaan ketuntasan penanganan RTLH sebagai bagian dari penanganan kemiskinan; keterbatasan APBD untuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni
- Penanganan kawasan kumuh

e. Perhubungan

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- Diperlukannya integrasi antar moda transportasi dalam mendukung pengembangan pelayanan angkutan umum untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah
- Belum optimalnya kondisi sebagian sarana dan prasarana lalu lintas yang ada
- Belum maksimalnya penyediaan lampu penerangan jalan umum
- Belum optimalnya pendapatan daerah dari prasarana perhubungan yang terbangun dan menjadi kewenangan kabupaten.

f. Jumlah Uang yang Dibelanjakan Masyarakat

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Namun demikian, dalam pengembangannya terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian, yaitu:

- Belum optimalnya penataan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW)
- Sarana promosi dan informasi pariwisata yang belum sesuai dengan tren teknologi informasi dan komunikasi
- Masih terbatasnya kualitas pelayanan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masih terbatasnya infrastruktur fisik maupun teknologi informasi komunikasi (TIK) yang dibutuhkan pelaku ekonomi kreatif
- Masih kurangnya kemitraan dan kerja sama lintas sektor, publik dan privat.
- Belum optimalnya kemitraan dan keterpaduan antara sektor pariwisata dengan sektor pendukung lainnya
- Minimnya pembinaan bagi pelaku pariwisata (pokdarwis, pengelola usaha pariwisata, seniman, kelompok seni budaya, pemandu wisata, aparatur terkait).

g. Produksi Barang dan Jasa di sektor ekonomi unggulan daerah

Kondisi kapasitas dan daya saing perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan, yang didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur.

h. Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan

dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Permasalahan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- Perkembangan industri di Kabupaten Bangka masih didominasi oleh industri pengolahan timah sebagai pengungkit perekonomian. Industri ini sangat rentan terhadap pengaruh kebijakan harga dan permintaan luar negeri. Efeknya sangat berpengaruh pada lapangan usaha jasa lainnya.
- Industri pertanian dan pariwisata sebagai alternatif pengungkit ekonomi daerah belum berkembang optimal seperti yang diharapkan
- Kendala pengembangan industri lokal yaitu ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor dari luar daerah dan luar negeri

i. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

- Masih rendahnya produktivitas beberapa komoditas pada sektor pertanian terutama tanaman pangan, perkebunan dan peternakan
- Keterbatasan akses petani sebagai kelompok masyarakat miskin terhadap akses sumber daya pertanian
- Kenaikan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan pestisida yang berimbas pada kenaikan biaya produksi sehingga pendapatan petani cenderung stagnan atau turun
- Masih lemahnya kelembagaan usaha tani;
- Belum optimalnya prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan;
- Masih terbatasnya akses petani ke permodalan dan teknologi;

j. Perikanan

Pembangunan sektor perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dengan menjaga produksi perikanan, mengoptimalkan usaha pengolahan ikan, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi sektor perikanan yaitu:

- Belum optimalnya produktivitas perikanan tangkap dan budidaya perikanan, teknologi pengolahan perikanan, dukungan rantai tata niaga/pemasaran komoditi ikan.
- Sarana prasarana perikanan tangkap masih belum memadai
- Ketersediaan Stok Sumber Daya Ikan yang semakin menurun akibat terganggunya ekosistem laut oleh aktivitas penambangan di wilayah laut oleh masyarakat dan perusahaan
- Masih adanya illegal fishing (penggunaan alat tangkap terlarang, bahan peledak) akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat
- Masih rendahnya produksi perikanan budidaya
- Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan tidak seimbang dengan tingkat kerusakan yang terjadi
- Biaya produksi untuk perikanan budidaya cukup tinggi

b. Pemerataan Pendapatan

Indikator penting terkait pemerataan pendapatan adalah kesenjangan wilayah dimana akses antar daerah dalam rangka peningkatan konektivitas dan kemudahan distribusi barang dan jasa antar daerah dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah. Selain itu persebaran pusat-pusat pertumbuhan yang belum merata juga menjadi persoalan penting yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah. Penanaman modal diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan penanaman modal antara lain :

- Kurang optimalnya akses masyarakat terhadap pemenuhan atas legalitas usaha sebagai akibat dampak pandemi dan penyesuaian regulasi.
- Masih adanya disparitas penyebaran pelaksanaan penanaman modal di wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka.
- Kurang intensifnya upaya untuk melakukan strategi promosi investasi karena keterbatasan anggaran dan SDM.
- Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi
- Kurangnya kesiapan infrastruktur pendukung, ketersediaan dan kompetensi tenaga kerja

Pemberdayaan dan peningkatan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan serta memperkuat struktur perekonomian nasional dan daerah, menggerakkan aktivitas ekonomi sektor riil, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka kesempatan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, dan menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi UMKM masih ditemukan permasalahan antara lain:

- Kelembagaan Usaha, masih banyak koperasi yang belum mengimplementasikan prinsip dan jati diri perkoperasian serta menjalankan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Sedangkan dari sisi UMKM, masih banyak UMKM yang bersifat informal dan belum memiliki badan usaha atau ijin berusaha;
- Produksi dan pemasaran koperasi dan UMKM masih menghadapi kendala keterbatasan sarana prasarana produksi, sistem manajemen produksi yang kurang efisien, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses produksi dan pemasaran produk, dan kurang tanggap atas tren pasar yang ada
- Sumber daya manusia, baik bagi koperasi dan UMKM adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus/pengelola sehingga belum dapat menerapkan manajemen usaha modern dalam pengelolaan usahanya.

c. Kualitas Lingkungan Hidup

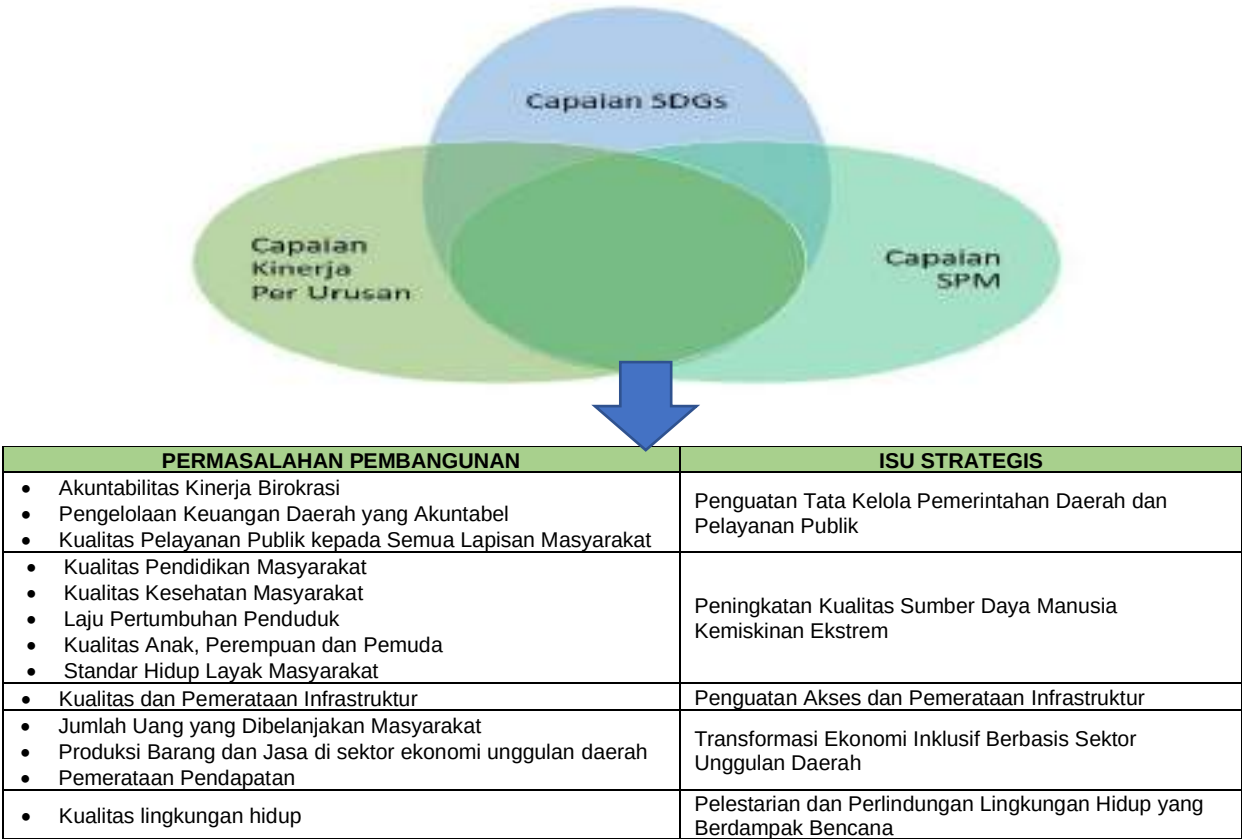
Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, ditemukan permasalahan meliputi:

- Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan;
- Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah
- Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti truk sampah
- Masih minimnya bank sampah dan TPS3R
- Penanganan Kerusakan DAS, lahan kritis dan penurunan kualitas sumberdaya air

- Penambangan yang belum menerapkan Good Mining Practice
- Belum optimalnya integrasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- Belum ada early warning system terkait kebencanaan dan rendahnya kesadaran masyarakat yang masih mendiami daerah rawan bencana
- Masih rendahnya kualitas/skills dan kuantitas SDM bidang kebencanaan
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana, terlihat dari masih adanya aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan bencana seperti illegal logging, illegal mining, membuang sampah sembarangan, dan sebagainya.

Identifikasi isu strategis merupakan inti dari proses perencanaan strategis. Isu strategis berperan penting dalam pengambilan keputusan politis. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu tersebut ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Untuk melihat keterkaitan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.16.
Konsistensi Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis



Sumber: RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025

Berdasarkan informasi dalam permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi isu strategis di Kabupaten Bangka sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
4. Penguatan akses dan Pemerataan Infrastruktur
5. Transformasi Ekonomi Inklusif Berbasis Sektor Unggulan Daerah
6. Pelestarian dan Perlindungan Lingkungan Hidup Yang Berdampak Bencana

a. Visi dan Misi Kepala Daerah

Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengahnya pada Tahun 2023 sebagaimana berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2019-2023. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati hingga dilakukannya pemilihan Kepala Daerah serentak dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang sekaligus merupakan penetapan visi misi Kepala Daerah yang dituangkan dan ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Dengan kondisi di atas, otomatis sampai dengan penetapan Kepala Daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir Tahun 2023 maka telah diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang didalamnya menyatakan bahwa bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RKPD Tahun 2024, yang merupakan pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 sebagai rangkaian proses/tahapan penyusunan APBD Tahun 2024, diinstruksikan kepada Kepala Daerahnya untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 (untuk daerah yang berakhir masa jabatan Kepala Daerah Tahun 2023), yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2024-2026.

Dokumen RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi sehingga tidak disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Dokumen RPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang akan menjadi pedoman strategis pembangunan tahunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 hingga ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024.

b. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai berikut.

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- 4) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- 5) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- 6) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 7) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
- 8) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 9) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 10) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- 11) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- 12) Program Kepegawaian Daerah
- 13) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 14) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 15) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 16) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 17) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 18) Program Pendaftaran Penduduk
- 19) Program Pencatatan Sipil
- 20) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 21) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan)
- 22) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan)
- 23) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan)
- 24) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 25) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- 26) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 27) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- 28) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
- 29) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 30) Program Pengelolaan Arsip
- 31) Program Penataan Desa
- 32) Program Pengelolaan Pendidikan
- 33) Program Pengembangan Kurikulum
- 34) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 35) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
- 36) Program Pembinaan Perpustakaan
- 37) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 38) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 39) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 40) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan
- 41) Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minuman
- 42) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
- 43) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 44) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 45) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 46) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 47) Program Pengendalian Penduduk

- 48) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 49) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- 50) Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 51) Program Perlindungan Perempuan
- 52) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 53) Program Pengelolaan Data Gender dan Anak
- 54) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 55) Program Perlindungan Khusus Anak
- 56) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 57) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 58) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- 59) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 60) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 61) Program Pengembangan Pemukiman
- 62) Program Penataan Bangunan Gedung
- 63) Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
- 64) Program Penyelenggaraan Jalan
- 65) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 66) Program Pengembangan Perumahan
- 67) Program Kawasan Permukiman
- 68) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 69) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- 70) Program Pengelolaan Izin Lokasi
- 71) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- 72) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
- 73) Program Penatagunaan Tanah
- 74) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 75) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 76) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 77) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- 78) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- 79) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 80) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 81) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 82) Program Pengembangan Ekspor
- 83) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- 84) Program Pengguna dan Pemasaran Produk dalam Negeri
- 85) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 86) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 87) Program Pengendalian Kesehatan Masyarakat dan Veteriner
- 88) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 89) Program Penyuluh Pertanian
- 90) Program Perizinan Usaha Pertanian
- 91) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 92) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 93) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- 94) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 95) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 96) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- 97) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 98) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- 99) Program Pengembangan UMKM
- 100) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 101) Program Promosi Penanaman Modal
- 102) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 103) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 104) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 105) Program Pemberdayaan Sosial
- 106) Program Rehabilitasi Sosial
- 107) Program Perlindungan Jaminan Sosial
- 108) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- 109) Program Perencanaan Tenaga Kerja
- 110) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 111) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 112) Program Hubungan Industrial
- 113) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- 114) Program Pemasaran Pariwisata
- 115) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 116) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 117) Program Pengembangan Kebudayaan
- 118) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 119) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 120) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 121) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 122) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (8 Kec)
- 123) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 124) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 125) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- 126) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- 127) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 128) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
- 129) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 130) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 131) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 132) Program Pengelolaan Persampahan
- 133) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- 134) Program Penanggulangan Bencana
- 135) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 136) Program Penanganan Bencana

c. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025. Kegiatan-kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2025 di dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 adalah kegiatan-kegiatan yang fokus mendukung prioritas pada Tahun 2025.

Perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD-P) Kabupaten Bangka Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut:

- 1. Penambahan/pengurangan tolok ukur kinerja (berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan);
- 2. Penambahan kegiatan baru, salah satunya untuk memenuhi ketentuan dari pemerintah pusat;
- 3. Tambahan karena kebutuhan mendesak berkaitan dengan kerjasama pihak ketiga.

Secara rinci kegiatan yang direncanakan di dalam P-RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 disajikan pada Tabel 1.17 berikut:

Tabel 1.17.
Rincian Program dan Kegiatan dalam P-RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	URUSAN RUTIN
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	URUSAN WAJIB
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
	Pengadaan Mebel Sekolah
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
	Pengadaan Mebel Sekolah
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
	Pengadaan Mebel PAUD
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
	Pengelolaan Dana BOP PAUD
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
	Pengadaan Mebel Sekolah
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
2.2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
	Pembangunan Puskesmas
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
	Pengembangan Rumah Sakit
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
	Pengembangan Puskesmas
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
	Operasional Pelayanan Puskesmas
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
2.2.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
	Normalisasi/Restorasi Sungai
	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	<i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	Penggantian Jembatan
	Pembangunan Jalan
	Rekonstruksi Jalan
	Pemeliharaan Berkala Jalan
	Pembangunan Jembatan
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
	Pemeliharaan Rutin Jalan
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
2.2.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>
	Penyadarkan Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
2.2.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
	<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
	<i>Investigasi Kejadian Kebakaran</i>
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i>
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
2.2.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	<i>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>
	Penyediaan Permakanan
	Penyediaan Sandang
	Penyediaan Alat Bantu
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
	Pemberian Layanan Rujukan
	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>
	Penyediaan Permakanan
	Penyediaan Alat Bantu
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
	Pemberian Layanan Rujukan
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	<i>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</i>
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	Penyediaan Makanan
	Penyediaan Sandang
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2	URUSAN WAJIB
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	Job Fair/Bursa Kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/
2.2.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2.2.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan rehabilitasi
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
	Penyimpanan sementara Limbah B3
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	Pengelolaan Sampah
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
2.2.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Penataan Pendaftaran Penduduk
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	Pelayanan Pencatatan Sipil
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
2.2.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PENATAAN DESA
	Penyelenggaraan Penataan Desa
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2.2.7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
2.2.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Pelayanan Informasi Publik
	Manajemen Komunikasi Krisis
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2.2.9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
	Membangun Metadata Statistik Sektoral
2.2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
	Pemulihan Usaha Mikro
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>
	Pengembangan Usaha Mikro
2.2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
	Pengawasan Penanaman Modal
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
	<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	<i>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>
	Pelindungan Cagar Budaya
2.2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	<i>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
2.2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	<i>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
	<i>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</i>
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
	<i>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</i>
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
2.2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
2.2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
	Penyediaan, pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
2.2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	Pengendalian Program KKBPK
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
3	URUSAN PILIHAN
3.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Kabupaten/Kota
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	Pengembangan Prasarana Pertanian
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
	Pembangunan Prasarana Pertanian
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
3.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
3.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
4.1	PERENCANAAN
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
	Pelaksanaan Konsultasi Publik
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
4.2	KEUANGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Penyusunan Standar Harga
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
	Pengamanan Barang Milik Daerah
	Penilaian Barang Milik Daerah
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	Penagihan Pajak Daerah
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
4.3	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	<i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
	Pengelolaan Data Kepegawaian
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
	<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>
	Pengelolaan Promosi ASN
	<i>Pengembangan Kompetensi ASN</i>
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
	<i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	Pembinaan Disiplin ASN
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
4.4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
	<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
5	FUNGSI PENUNJANG UNSUR PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
5.1	INSPEKTORAT DAERAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
	Reviu Laporan Kinerja
	Reviu Laporan Keuangan
	Pengawasan Desa
	Kerja Sama Pengawasan Internal
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
6	FUNGSI PENUNJANG UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
6.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
7	UNSUR STAF PENDUKUNG KEPALA DAERAH
7.1	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>
	Penataan Administrasi Pemerintahan
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
	Fasilitasi Bantuan Hukum
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
	<i>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</i>
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
	<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
8	UNSUR STAF PENDUKUNG DPRD
8.1	SEKRETARIAT DPRD
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
	<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>
	Pembahasan APBD
	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>
	Pengawasan Penggunaan Anggaran
	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>
	Pendalaman Tugas DPRD
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD
	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>
	Kunjungan Kerja dalam Daerah
	Pelaksanaan Reses
	<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
9	FUNGSI KEWILAYAHAN
9.1	KECAMATAN
9.1.1	KECAMATAN SUNGAILIAT
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
9.1.2	KECAMATAN BELINYU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
9.1.3	KECAMATAN RIAU SILIP
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
9.1.4	KECAMATAN MENDO BARAT
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
9.1.5	KECAMATAN BAKAM
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
9.1.6	KECAMATAN PUDING BESAR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
9.1.7	KECAMATAN PEMALI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
9.1.8	KECAMATAN MERAWANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Sumber: RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024, Bappeda Kabupaten Bangka, 2024

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Otonomi daerah digulirkan dengan alasan utama untuk memperbaiki kinerja pemerintah, dengan cara memperkuat kinerja Pemerintah Daerah. Harapannya adalah jika kinerja pemerintahan daerah menguat, maka pelayanan publik juga akan membaik dan akhirnya kesejahteraan masyarakat meningkat yang ditandai dengan membaiknya indikator-indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi meningkat, kemiskinan menurun, dan pengangguran juga akan menurun. Salah satu upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pemerintah Daerah berkewajiban menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan

Mutu Pelayanan Dasar, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Bangka berusaha menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam menyelenggarakan pelayanan dasar yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum. Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah juga dipandang perlu agar pelayanan dasar yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur. Hal ini dikarenakan SPM sudah disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparat pemerintah sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /Prt/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 13) Peraturan Bupati Bangka Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar pelayanan Minimal Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 111);
- 14) Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 40);

c. Kebijakan Umum Daerah dalam Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024–2026 terkait penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat, serta penguatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas. Arah kebijakan ini sejalan dengan tema pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 yaitu **“Penguatan Pembangunan Ekonomi untuk Daya Saing Daerah”**, yang menekankan pada peningkatan kapasitas ekonomi daerah sekaligus memastikan terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Penggunaan dokumen RPD sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah dilakukan karena pada periode tersebut belum terdapat kepala daerah definitif hasil pemilihan umum yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, pemerintah daerah menggunakan RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat transisional guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk dalam pemenuhan SPM.

RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024–2026 berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program, kegiatan, dan penganggaran yang tetap selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui dokumen ini, arah kebijakan pembangunan daerah tetap dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur sampai dengan ditetapkannya kepala daerah definitif yang kemudian akan menyusun RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024–2026 tersebut, maka kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Bangka yang berkaitan dengan rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut.

Tabel 1.18.
Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka
Terkait Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2025

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3
1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	❖ Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Institusionalisasi Inovasi dan Reformasi Birokrasi Dalam Proses Bisnis Di Semua Level Pemerintahan ❖ Melakukan Akselerasi Pembangunan Melalui Optimalisasi Teknologi Informasi dan Membangun Sistem Pengendalian Yang Berorientasi Pada Hasil	❖ Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat ❖ Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasidan penegakan peraturan daerah ❖ Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi informasi ❖ Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yangbersih dan efisien ❖ Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalammonitoring dan evaluasi pembangunan dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan yang berorientasi padahasil ❖ Mengembangkan sistem monitoring berbasis ITterintegrasi dengan sistem informasi manajemen kinerjaapembangunan daerah ❖ Fasilitasi dan Pendampingan Aparatur Pemerintah desadalam pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan danpembangunan
1.2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel		
1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat		
2.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	❖ Membangun Generasi Yang Handal melalui Jaminan Kesehatan yang Komprehensif dan Pengembangan Pendidikan Yang Berorientasi Pada Potensi Daerah guna meningkatkan standar hidup layak masyarakat ❖ Pengarusutamaan Gender Berbasis Penguatan Kelembagaan Perempuan Dalam Peran Serta Aktif Dalam Pembangunan	❖ Jaminan akan akses dan kualitas Pendidikan bagi seluruh masyarakat ❖ Jaminan akan akses dan kualitas Kesehatan bagi seluruh masyarakat ❖ Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan pendidikan ❖ Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan kesehatan ❖ Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh-tokoh pembangunan perempuan ❖ Penegakan hukum dan pencegahan konflik sosial ❖ Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
2.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		
2.3 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk		
2.1.5 Meningkatnya Kualitas Anak dan Perempuan		
3.1 Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	❖ Percepatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian melalui kemitraan (partnership) Pembiayaan Pembangunan	❖ Memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antarKawasan ❖ Penguatan investasi dalam dan luar negeri, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership. ❖ sistem jaringan infrastruktur yang mendukung struktur ruang ❖ Pemenuhan kebutuhan ketersediaan air bersih bagi masuarakat ❖ Pemenuhan kebutuhan ketersediaan perumahan yang layak bagi masyarakat ❖ Pemenuhan kebutuhan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas kumuh ❖ Penciptaan sanitasi yang layak bagi

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		masyarakat
4.1 Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa 4.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat 4.3 Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan Wisatawan 4.4 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	❖ Penciptaan Inklusivitas Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Industrialisasi Pertanian serta Penumbuhan Kewirausahaan melalui UMKM	❖ Peningkatan kemudahan usaha melalui stimulasi penguatan sektor pertanian, UMKM dan Ekonomi Kreatif ❖ Pengembangan perencanaan terintegratif terhadap potensi pariwisata dan pertanian ❖ Penguatan kelembagaan ekonomi dan menjamin kemudahan usaha melalui regulasi yang afirmatif ❖ Pengembangan KEK Pariwisata ❖ Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan pertanian ❖ Pengintegrasian perencanaan penganggaran daerah dan desa dalam menekan angka kemiskinan ❖ Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan pertanian ❖ Pemberian insentif kemudahan investasi dalam mendorong industrialisasi pertanian ❖ Pemanfaatan E-commerce dalam efisiensi tata niaga produk pertanian ❖ Peningkatan produktivitas komoditi unggulan pertanian ❖ Optimalisasi pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan sinergis
5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	❖ Melaksanakan Pembangunan yang Berorientasi pada <i>Pro Environment</i>	❖ Melaksanakan Pembangunan yang Berorientasi pada <i>Pro Environment</i>

Sumber: RPD Kabupaten Bangka 2024-2026

d. **Gambaran Orientasi dan Komitmen yang Ditetapkan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam Kebijakan Umum Anggaran**

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Sesuai dengan Dokumen RPJ tersebut, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah **“Peningkatan Kualitas SDM Menuju Pembangunan Ekonomi Inklusif”**.

Merujuk pada tema pembangunan di atas, maka arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Bangka Tahun 2025, dititikberatkan pada pembangunan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik.

Kemudian sebagai komitmen daerah terhadap penerapan dan pencapaian SPM dilakukan dengan menjadikan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM sebagai dasar penentuan prioritas serta menetapkan target penerapan dan pencapaian SPM di dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025. Selanjutnya RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Bangka Tahun 2025.

Selain itu, sebagai upaya melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai wujud nyata komitmen meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dilaksanakan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang salah satunya merupakan komitmen penerapan dan pencapaian SPM yang didukung dengan program dan anggaran untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Bangka Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan 6 (enam) urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu 1) Urusan Pendidikan; 2) Urusan Kesehatan; 3) Urusan Pekerjaan Umum; 4) Urusan Perumahan Rakyat; 5) Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum; dan 6) Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial. Adapun total anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025, yang direncanakan untuk mendukung pelaksanaan 6 urusan SPM tersebut sebesar Rp. 203.961.730.075,33 Selain sumber anggaran dari APBD Kabupaten Bangka, pelaksanaan urusan SPM juga dilaksanakan dengan sumber dana lain yang sah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun rincian perjanjian kinerja serta rencana anggaran untuk masing-masing SPM berdasarkan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.19.
Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran Dalam Penerapan SPM Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Pemerataan Pendidikan	APS SD	Indeks	99,42	Program Pengelolaan Pendidikan	91.482.782.875
		APS SMP	Indeks	96,05		
2	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Hasil Belajar	Kemampuan Literasi SD/MI	Angka	2,11	Program Pengembangan Kurikulum	113.946.850
		Kemampuan Numerasi SD/MI	Angka	2,01	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	120.265.850
		Kemampuan Literasi SMP/MTs	Angka	2,18	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	27.336.298
		Kemampuan Numerasi SMP/MTs	Angka	2,05		
3	Meningkatnya Akses Satu Tahun Prasekolah dari PAUD	Angka Kesiapan Anak Sekolah	Persentase	55,90		
4	Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal	APS Non Formal	Persentase	55		
5	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	99,50	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	99.601.876.543,33
		Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	4,75		
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,016		
		Angka Kesakitan (Morbiditas)	Indeks	9,86		
4	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar	Persentase RT yang memiliki Akses Air Minum	%	92,04	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.460.241.993,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)
		Persentase RT yang memiliki Akses Sanitasi	%	95,54	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	447.382.140,00
5	Meningkatnya Pemenuhan Rumah yang Layak bagi Masyarakat	Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	99,25	Program Pengembangan Perumahan	192.858.825,00
6	Meningkatnya Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial	%	95	Program Rehabilitasi Sosial	1.509.540.200,00
7	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	%	100	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	6.488.008.985,00
8	Penanggulangan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	1.517.489.516,00

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Bangka, 2025

BAB II

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Kabupaten Bangka berdasarkan indikator kinerja makro sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1.
Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	2	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,66	75,38	0,96
2	Persentase Penduduk Miskin	4,24	4,71	11,08
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,91	4,75	-3,26
4	Pertumbuhan Ekonomi	-0,44	4,96	-1227.27
5	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	58.572	63.272	8,02
6	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,211	0,218	3,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2026

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan yang digunakan secara universal di seluruh dunia. IPM yang semakin baik menandakan makin baiknya pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah. Dalam pengukurannya, IPM merupakan komposit dari indikator pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indikator pendidikan direpresentasikan oleh harapan lama sekolah dan rataan lama pendidikan. Indikator kesehatan direpresentasikan oleh tingkat harapan hidup saat lahir. Indikator perekonomian direpresentasikan oleh *purchasing power parity* atau paritas daya beli masyarakat.

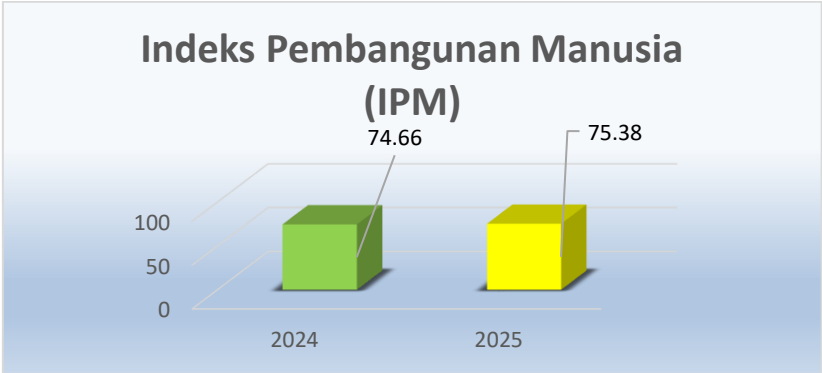
Pendidikan yang akan melahirkan sumber daya manusia handal merupakan faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi, bahkan dapat menjadi modal dasar dari kekayaan suatu daerah. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang pada dasarnya bersifat pasif sedangkan pendidikan akan membuat sumber daya manusia menjadi agen-agen aktif yang akan mengumpulkan modal, mengeksplotasikan sumber daya alam, membangun berbagai macam organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta melaksanakan pembangunan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa jika di suatu wilayah tidak dikembangkan sistem pendidikan untuk mengembangkan keahlian, pengetahuan dan potensi masyarakat secara efektif, maka untuk selanjutnya wilayah tersebut tidak akan dapat melaksanakan pembangunan dan pengelolaan ekonomi. Kondisi inilah yang menyebabkan indikator pendidikan menjadi ukuran penting dalam Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan kesehatan dalam rangka terciptanya kualitas sumber daya manusia sebagai insan harus dilakukan dalam keseluruhan proses kehidupannya mulai dari dalam kandungan bahkan jauh sebelumnya, yaitu dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan para calon ibu, kemudian sebagai bayi, balita, usia sekolah, remaja, pemuda, usia produktif, sampai usia lanjut.

Dengan demikian pembangunan kesehatan juga mempunyai peranan yang amat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Oleh karena itu, sektor ini dapat dipastikan menjadi faktor penentu bagi perkembangan suatu wilayah. Daya beli masyarakat merupakan ukuran ekonomi yang menggambarkan seberapa besar kemampuan atau kesejahteraan masyarakat sebagai dampak pembangunan. Oleh karena itu, sebagai representasi indikator perekonomian, daya beli masyarakat menjadi bagian penting dalam pengukuran IPM.

Di Kabupaten Bangka, nilai IPM berdasarkan metode terbaru terus menunjukkan perbaikan yang sekaligus juga menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah mengarah pada pencapaian hasil seperti yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan oleh capaian angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.1. Pada Tahun 2025, capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka sebesar 75,38 mengalami peningkatan sebesar 0,96 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 74,66. *Trend* peningkatan tersebut secara lebih jelas tersaji pada Grafik 2.1.

Grafik 2.1.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2026

b. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan fenomena kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari angka absolut. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, namun juga mencakup kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin serta keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Mereka yang pendapatan per kapita bulannya di bawah garis kemiskinan dianggap miskin. Ketika seseorang atau sekelompok individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak mempertahankan tingkat penghidupan tertentu, maka hal tersebut disebut berada dalam kemiskinan.

Grafik 2.2.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025



Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2026

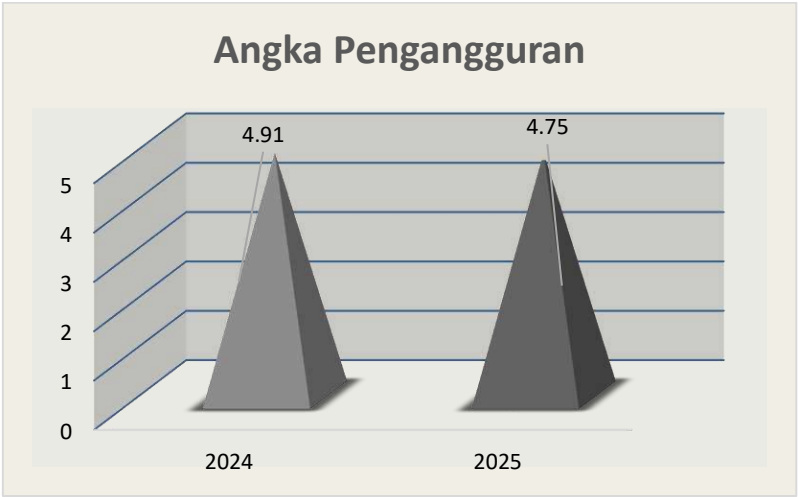
Grafik 2.2 menggambarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025. Selama periode tersebut, grafik persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Perkembangan yang positif terjadi pada Tahun 2025 dimana angka kemiskinan naik menjadi 4,71, sebesar 11,08% dari angka Tahun 2024 yang sebesar 4,24%.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka Pengangguran menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya angka pengangguran akan mengindikasikan perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi regional khususnya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan instabilitas kondisi geopolitik dimana hal ini berbanding lurus dengan kondisi ketenagakerjaan regional.

Pada Tahun 2024 angka pengangguran di Kabupaten Bangka sebesar 4,91 artinya dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata ada 4 orang yang mencari pekerjaan. Angka pengangguran Tahun 2025 turun sebanyak 3,26% dari angka pengangguran tahun sebelumnya. Perkembangan angka pengangguran tersebut, secara jelas tersaji pada Grafik 2.3 berikut.

Grafik 2.3.
Tingkat Pengangguran Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025



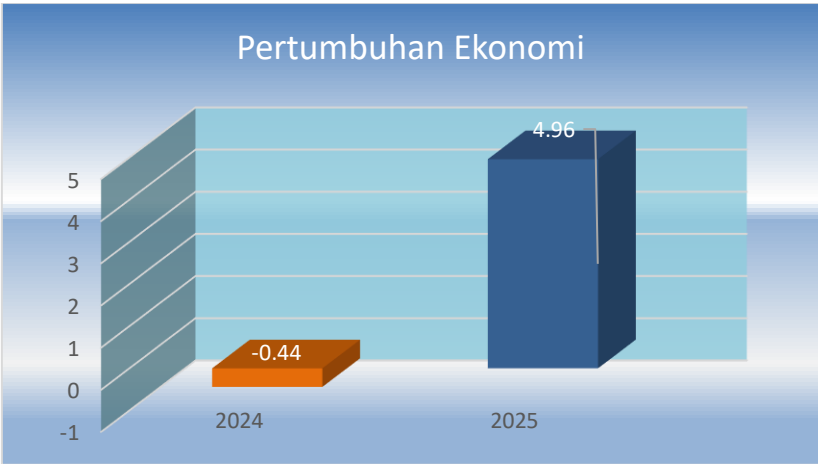
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2026

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Tingkat pertumbuhan ekonomi meningkatkan persentase kenaikan pendapatan pada satu Tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan pada Tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga proses perkembangan wilayah semakin baik.

Berdasarkan penghitungan sangat sementara angka PDRB Lapangan usaha ADHK 2010, pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka berkontraksi sebesar 0,44 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2025 kembali melambat dari Tahun 2025 yang mencapai 4,96%. Secara rinci perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025 tersaji pada Grafik 2.4 berikut.

Grafik 2.4.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2026

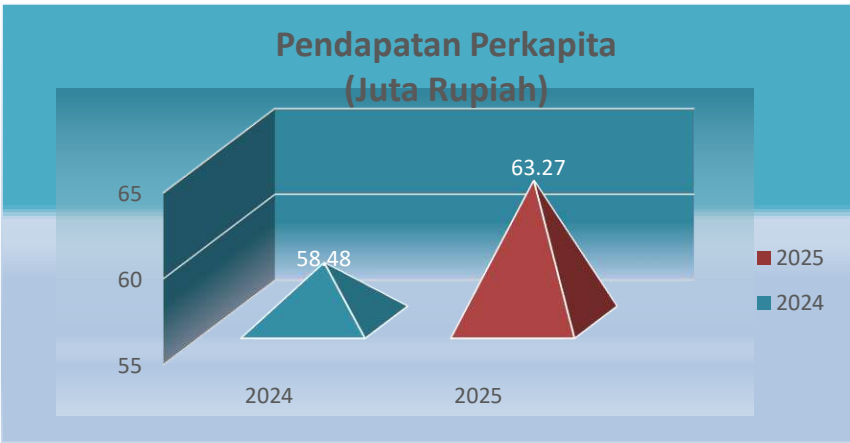
e. **Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku**

Pendapatan perkapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu wilayah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Semakin tinggi nilai pendapatan per kapita suatu negara, artinya masyarakat semakin makmur.

Apabila pada skala nasional menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maka untuk mengetahui pendapatan per kapita pada skala daerah, menggunakan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduknya maka akan diketahui nilai PDRB perkapita tersebut.

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah Rp. 58,48 juta, naik sebanyak 8,19 persen dari Tahun sebelumnya yaitu Rp. 63,27 juta. Meskipun tipis, namun kenaikan ini mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Tahun 2025 berkembang ke arah yang positif. Selengkapnya, perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Bangka Tahun 2024-2025 tersaji pada Grafik 2.5 berikut.

Grafik 2.5.
Pendapatan Perkapita Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2026

f. **Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)**

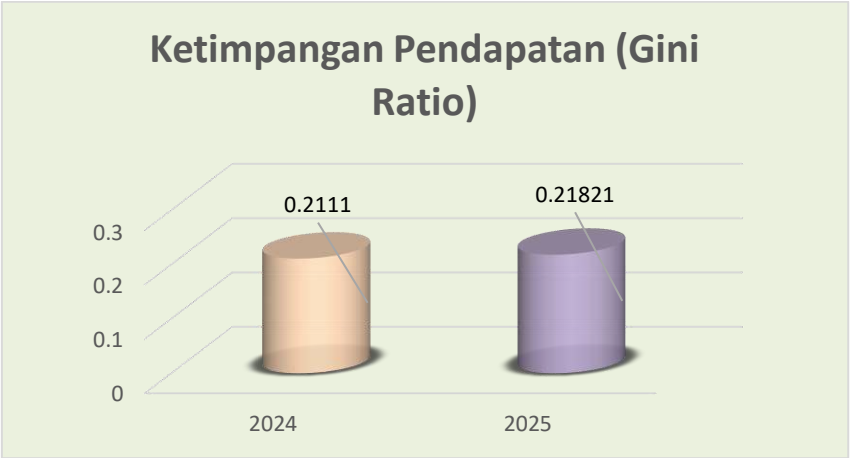
Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1. Semakin besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai satu berarti ketimpangan

sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- $GR < 0,3$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0.3 \leq GR \leq 0.4$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat)
- $GR > 0.4$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Perhitungan indeks gini di Kabupaten Bangka secara khusus belum dilakukan. Oleh karena itu, capaian indikator tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bangka mengacu pada hasil perhitungan indeks gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Tabel 2.1, bahwa pada Tahun 2025 capaian nilai indeks gini Bangka Belitung sebesar 0,2182 atau mengalami penurunan sebesar 3,36 persen dari Tahun 2025.

Grafik 2.6.
Perkembangan Koefisien *Gini* di Kabupaten Bangka Tahun 2024–2025



Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2026

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporam capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan, sebagaimana disajikan pada uraian berikut ini:

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	84,16	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka	-
		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,11		
		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	25,80		
		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	56,98		
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	52,39		
2.	Kesehatan	Persentase kematian ibu	0,09	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka	-
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	1,07		
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	86,78		
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	90,34		
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	93,94		
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00		
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100,00		
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	93,82		
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91,46		
		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100,00		
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100,00		
		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100,00		
		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100,00		
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai standar	100,00		
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	67,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka	-
		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	100,00		
		Persentase kemandapan jalan kabupaten/kota	93,03		
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	86,54		
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,57		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	53,16		
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	14,41		
		Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	2,17		
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100,00		
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	76,67		
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka	
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100,00		
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	3,53		
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100,00		
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka	-
		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100,00		
		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100,00		
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00		
		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00		
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	76,47		
6.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00	Dinas Sosial Kabupaten Bangka	-
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00		
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00		
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00		
		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100,00		
		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	79,15		
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	60,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka	-
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	29,70		
		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	100,00		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A Kabupaten Bangka	-
		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00		
7.	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	76,75	Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka	-
8.	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	100,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka	-
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	94,16		
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	20,00		
9.	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	75,00	Dinas Lingkungan Hidup	-
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	96,32		
10.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	100,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka	-
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	73,41		
		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100,00		
		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	98,51		
		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00		
		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00		
		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00		
11.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100,00	Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka	-
		Persentase peningkatan status desa mandiri	100,00		
		Persentase fasilitasi kerja sama desa	100,00		
12.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A Kabupaten Bangka	-
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</i>	71,88		
		Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	63,28		
13.	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,70	Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka	-
		<i>Volume/Capacity Ratio</i> di Jalan Kabupaten/Kota	0,17		
		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	66,67		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
14.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka	-
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	51,67		
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00		
15.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	27,23	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka	-
		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	98,70		
16.	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-44,74		
		Realisasi total terhadap target investasi	57,43		
17.	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	100,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka	-
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,25		
		Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	50,00		
		Persentase jumlah atlet berprestasi	100,00		
18.	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka	-
19.	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	60,57		
20.	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	100,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka	-
		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	5,73		
21.	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	57,5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka	-
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	11,96		
22.	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	69,58		
23.	Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	100,00	Dinas Perikanan Kabupaten Bangka	-
		Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	64,6		
24.	Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	0,01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka	-
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	22,64		
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	34,29		
25.	Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	41,15	Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka	-
		Peningkatan produksi hortikultura	-36,69		
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	17,06		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari <i>survey</i> penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	12,48		
26.	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	95,34	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka	-
27.	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	100,00		
		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	2,53		
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	10,71		
		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	21,15		

Sumber: Diolah oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka dari SILPPD, 2026

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka	-
2.	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	45,58	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka	-
		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	20,38		
		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	61,83		
		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	19,49		
3.	Kelembagaan, Kepegawaian,	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80,43	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya	-

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pendidikan dan Pelatihan			Manusia Daerah Kabupaten Bangka	
4.	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka	-
5.	Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,00	Inspektorat Kabupaten Bangka	-
		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	3,00		
		Manajemen risiko Indeks	2,00		
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	93,07		
6.	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	
		Pemanfaatan sistem pengadaan	21,86		
		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	21,00		
7.	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1,00	Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	-
		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	27,27		
8.	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	95,75	Inspektorat Kabupaten Bangka dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	-

2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/ target kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Klasifikasi Derajat Capaian Kinerja Sasaran

NO	SKALA	KINERJA SASARAN	KODE
1	> 100%	Melebihi Target	MT
2	= 100%	Tercapai	T
3	< 100%	Tidak Tercapai	TT
4	n/a	Tidak Ada Target	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 terdiri dari 24 (dua puluh empat) indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan. IKU tersebut diukur dengan membandingkan realisasi masing-masing indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun capaian IKU Kabupaten Bangka Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN S.D 2025 TERHADAP KONDISI AKHIR RPD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	BB (71,53)	BB (72,05)	BB (72,49)	100,61	BB (72.65)	99,78
Indeks SPBE	Nilai	2,80	2,85	3,00	105,26	2,65	113,21
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	76,31	77,83	79,06	101,58	64,87	121,87
Opini Hasil Pemeriksaan Atas	Kategori	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN S.D 2025 TERHADAP KONDISI AKHIR RPD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
LKPD Tahun Sebelumnya							
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	85,29	64,63	64,63	100,00	85,25	75,81
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,35	87,54	88,87	101,52	85,09	104,44
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,45	8,47	8,77	103,54	8,33	105,28
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,12	13,13	13,13	100,00	12,86	102,10
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,24	73,28	73,56	100,38	71,47	102,92
Angka Stunting	Persentase	0,99	0,98	1,07	91,59	1,31	122,43
Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>)	Anak	2,34	2,32	2,27	102,20	2,28	100,44
Indeks Pembangunan Gender	Nilai	89,07	89,11	89,23	100,13	88,43	100,90
Status Kabupaten Layak Anak	Status/nilai	Nindya (794)	Nindya (794)	Nindya (794)	100,00	Madya (653)	121,59
Indeks Pemerataan Infrastruktur	Nilai	0,187	0,186	0,185	100,54	0,185	100,00
Indeks Williamson	Nilai	0,219	0,211	0,206	102,43	0,173	83,98
Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	-0.44	3,79	4,96	130,87	4,33	114,55
Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	13.205	13.308	13.411	100,77	12.958	103,50
Konsumsi Per Kapita	Ribu Rupiah	20.494	21.314	21.896	102,73	21.724	100,79
Angka Kemiskinan	Persentase	4,24	4,23	4,71	89,81	4,21	89,38
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,91	4,89	4,75	102,95	5,33	112,21
<i>Spending Of Money</i>	Milyar Rupiah	197,96	205,91	207,02	100,54	185,76	111,44
Indeks Gini	Nilai	0,21	0,21	0,21	100,00	0,21	101,43
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	64,76	65,95	72,94	110,60	65,50	111,36
Indeks Ketahanan Bencana Daerah	Nilai	0,50	0,51	0,52	101,96	0,35	148,57

b. Pengukuran Capaian Kinerja DiBandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 24 (dua puluh empat) indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2025, diketahui bahwa 17 (tujuh belas) indikator kinerja sasaran termasuk dalam kategori Melebihi Target (MT) dan sebanyak 5 (lima) indikator kinerja utama termasuk dalam kategori Tercapai (T), sementara 2 (dua) indikator kinerja utama lainnya termasuk kategori Tidak Tercapai (TT).

Indikator kinerja utama dengan capaian kinerja tertinggi yang termasuk dalam kategori melebihi

target yang ditetapkan yakni Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian sebesar 130,87 persen, sedangkan indikator kinerja utama dengan capaian kinerja terendah yang termasuk dalam kategori tidak tercapai yakni Angka Kemiskinan dengan capaian 89,81 persen.

Indikator kinerja sasaran yang dipaparkan pada tabel di atas merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam RPD Kabupaten Bangka tahun 2024-2026. Pencapaian kinerja sasaran tahun 2024 merupakan gambaran kinerja tahun pertama untuk sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

c. **Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah**

1. **Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tujuan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai perwujudan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsibilitas, peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan kepentingan publik. Dalam konteks tersebut, pencapaian kinerja pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dapat dianalisis secara komprehensif melalui hasil evaluasi AKIP Kabupaten, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Indeks Profesionalitas ASN sebagai indikator yang merepresentasikan kualitas manajemen kinerja, transformasi digital pemerintahan, serta kapasitas dan profesionalitas sumber daya aparatur.

Pencapaian kinerja pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang tercermin dari hasil evaluasi AKIP Kabupaten menunjukkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang semakin selaras dan berorientasi pada *outcome*. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi tolak ukur kematangan sistem manajemen kinerja daerah.

Selain itu, peningkatan Indeks SPBE menggambarkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, terintegrasi, dan efisien. Sementara itu, kenaikan Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan penguatan kompetensi, kinerja, dan penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur. Secara keseluruhan, perbaikan pada ketiga indikator tersebut merefleksikan sinergi antara penguatan sistem kinerja, digitalisasi pemerintahan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang akuntabel.

Indikator kinerja dan capaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi pada Tahun 2025 adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Atas SasaranTahun 2025
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	BB (72,05)	BB (72,49)	100,61	MT
2.	Indeks SPBE	Indeks	2,85	3,00	105,26	MT
3.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77,83	79,06	101,58	MT
Rata-Rata Capaian					102,48	MT

Sumber: - LHE AKIP Kabupaten Bangka Tahun 2025, Kementerian PAN dan RB, 2026
- LHE SPBE Instansi Pusat dan Pemda Tahun 2025, Kementerian PAN dan RB, 2025
- Data IP ASN Kab. Bangka Tahun 2025, BKPSDMD Kab. Bangka, 2025
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja atas indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi sebesar 102,48 persen termasuk kategori Melebihi Target (MT). Dari 3 (tiga) indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, semua indikator

capaiannya telah melebihi target. Indikator Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten capaian kinerjanya sedikit melebihi target (MT) yaitu sebesar 100,61 persen dari target nilai 72,05 tercapai 72,49 dengan kategori nilai yang sama yaitu BB, indikator Indeks SPBE capaiannya melebihi target (MT) yaitu sebesar 105,26 persen, dari target 2,85 tercapai 3,00 dan indikator Indeks Profesionalitas ASN capaiannya melebihi (MT) dari target 77,83 tercapai 79,06 dengan capaian kinerja 101,58 persen.

Selanjutnya perbandingan antara capaian indikator atas sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan dengan target jangka menengah dalam RPD Kabupaten Bangka 2024-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPD	REALISASI TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPD (%)
1	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	BB (71,53)	BB (72,49)	BB (72,65)	99,78
2	Indeks SPBE	Indeks	2,80	3,00	2,65	113,21
3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76,31	79,06	64,87	121,87

Sumber: - LHE AKIP Kabupaten Bangka Tahun 2025, Kementerian PAN dan RB, 2026
- LHE SPBE Instansi Pusat dan Pemda Tahun 2025, Kementerian PAN dan RB, 2025
- Data IP ASN Kab. Bangka Tahun 2025, BKPSDMD Kab. Bangka, 2025
- Dokumen RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa dari ketiga indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi yaitu Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten, Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks SPBE menunjukkan perkembangan yang sangat positif dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Realisasi kinerja Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten tahun 2025 kategorinya sama dengan tahun 2024, yaitu BB, dengan peningkatan nilai sebesar 0,96 dari 71,53 di tahun 2024 menjadi 72,49 di tahun 2025. Capaian kinerja tersebut jika dibandingkan dengan target akhir masa RPD Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 tercapai sebesar 99,78 persen.

Capaian kinerja Indeks SPBE tahun 2025 meningkat sebesar 0,20 poin menjadi 3,00 dibandingkan dengan kondisi tahun 2024 sebesar 2,80 dan jika dibandingkan dengan target akhir masa RPD Kabupaten Bangka tahun 2024-2026, capaian Indeks SPBE tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 113,21 persen. Pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun 2024 meningkat sebesar 2,75 poin, dari 76,31 di tahun 2024 menjadi 79,06 di tahun 2025. Capaian tersebut jika dibandingkan dengan target akhir masa RPD Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 121,87 persen.

Penjelasan lebih lanjut terhadap masing-masing indikator dijelaskan di bawah ini.

a) Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten

Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten adalah ringkasan penilaian resmi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di tingkat pemerintah kabupaten. Evaluasi ini menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2025 menunjukkan predikat “BB” dengan nilai 72,49. Hal tersebut menunjukkan implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka “Sangat Baik”. Rincian perkembangan Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bangka periode 2023-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.6.
Perkembangan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bangka Tahun 2023-2025

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai		
		2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	23,73	23,83	24,12
2	Pengukuran Kinerja	17,45	17,54	17,83
3	Pelaporan Kinerja	10,70	10,72	10,86
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	19,16	19,44	19,68
	Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas	71,04 (BB)	71,53 (BB)	72,49 (BB)

Sumber : LHE AKIP Kabupaten Bangka 2023, 2024 dan 2025

Dilihat dari tabel diatas capaian tingkat akuntabilitas kinerja Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 dan 2024 walaupun dengan predikat yang masih sama yaitu “BB” dengan kategori implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”. Kenaikan yang terjadi secara bertahap tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka terus melakukan perbaikan sistematis terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), baik pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, maupun evaluasi internal. Capaian tahun 2025 menjadi refleksi dari konsolidasi kebijakan dan penguatan manajemen kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Secara lebih rinci, pada tahun 2025 komponen perencanaan kinerja memperoleh nilai 24,12, meningkat dari 23,83 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka semakin mampu menyusun dokumen perencanaan yang selaras antara visi dan misi kepala daerah dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan berorientasi pada hasil. Perbaikan dalam komponen ini antara lain dilakukan melalui penajaman cascading kinerja dari tingkat pimpinan daerah hingga perangkat daerah, penyelarasan antara dokumen RPJMD, Renstra, dan Perjanjian Kinerja, serta penguatan integrasi antara perencanaan dan penganggaran agar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mendukung pencapaian sasaran strategis daerah. Dengan demikian, perencanaan tidak lagi berorientasi pada daftar kegiatan semata, tetapi lebih menitikberatkan pada kontribusi terhadap *outcome* pembangunan daerah.

Pada komponen pengukuran kinerja, nilai tahun 2025 mencapai 17,83, meningkat dari 17,54 pada tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya penguatan dalam mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan validasi data kinerja di Kabupaten Bangka. Upaya perbaikan dilakukan melalui penyempurnaan indikator kinerja agar lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu (SMART), serta peningkatan kapasitas aparatur dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dan pelaporan berbasis digital turut mendukung ketepatan dan keakuratan data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan sistem pengukuran yang semakin baik, Pemerintah Kabupaten Bangka memiliki dasar yang lebih kuat dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Komponen pelaporan kinerja juga mengalami kenaikan dari 10,72 menjadi 10,86, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas penyusunan laporan kinerja yang lebih sistematis, transparan, dan berorientasi pada analisis capaian *outcome* dibandingkan sekadar output. Upaya perbaikan dalam aspek ini meliputi penyajian informasi kinerja yang lebih komprehensif, analisis deviasi antara target dan realisasi, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut yang lebih konkret. Upaya ini dilakukan dengan publikasi Laporan Akuntabilitas Kinerja pada tingkat Pemda terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Perbaikan dalam aspek pelaporan ini dilakukan dengan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan kualitas reviu internal sebelum laporan disampaikan, serta memastikan adanya konsistensi antara data yang dilaporkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Adapun pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, nilai tahun 2025 mencapai 19,68, meningkat dari 19,44 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan semakin optimalnya peran evaluasi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, khususnya melalui penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan reviu, evaluasi, dan pendampingan terhadap implementasi SAKIP di setiap perangkat daerah. Upaya perbaikan pada komponen ini mencakup peningkatan kualitas evaluasi atas capaian kinerja, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi secara lebih sistematis, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan program pembangunan daerah. Dengan evaluasi internal yang semakin kuat, siklus manajemen kinerja di Kabupaten Bangka menjadi lebih terintegrasi dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

b) Indeks SPBE

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah. Nilai Indeks SPBE menggambarkan tingkat kematangan digitalisasi pemerintahan suatu daerah. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin baik tingkat integrasi sistem, efisiensi proses birokrasi, transparansi, serta kualitas pelayanan publik berbasis elektronik. Dengan demikian, Indeks SPBE tidak hanya menjadi ukuran administratif, tetapi juga cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi digital.

Perkembangan nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bangka Tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB yang diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2026, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan SPBE ini, Indeks SPBE Kabupaten Bangka meningkat dari 2,80 pada Tahun 2024 menjadi 3,00 pada Tahun 2025.

Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2025 dilaksanakan menggunakan instrumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dengan 47 indikator. Nilai aspek-aspek yang menjadi komponen penyusun Indeks SPBE mengalami perkembangan yang fluktuatif sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.7.
Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2023-2025

NO	KOMPONEN PENILAIAN INDEKS SPBE	2023	2024	2025
1.	Indeks Domain Kebijakan	2,70	2,50	2,50
2.	Indeks Domain Tata Kelola	1,20	1,80	2,20
3.	Indeks Domain Manajemen	1,00	1,36	2,00
4.	Indeks Domain Layanan	3,57	3,95	3,95
IndeksSPBE		1,85	2,24	3,00
Predikat		Cukup	Baik	Baik

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kab. Bangka Tahun 2023, 2024, dan 2025

Berdasarkan tabel Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2023–2025 yang bersumber dari laporan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka selama tiga tahun terakhir. Secara agregat, nilai Indeks SPBE mengalami kenaikan dari 1,85 pada tahun 2023 dengan predikat *Cukup*, meningkat menjadi 2,24 pada tahun 2024 dengan predikat *Baik*, dan kembali meningkat secara signifikan menjadi 3,00 pada tahun 2025 dengan predikat *Baik*. Kenaikan ini menunjukkan adanya

perbaikan yang sistematis dan terencana dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital birokrasi.

Apabila dianalisis berdasarkan domain penilaian, Domain Kebijakan menunjukkan nilai 2,70 pada tahun 2023, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 2,50 pada tahun 2024 dan tetap stagnan pada angka yang sama pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kerangka regulasi dan kebijakan SPBE di Kabupaten Bangka pada dasarnya telah berada pada tingkat yang cukup memadai sejak awal periode pengamatan, namun belum mengalami penguatan atau inovasi kebijakan yang signifikan pada dua tahun berikutnya. Dengan kata lain, fondasi normatif sudah tersedia, tetapi optimalisasi substansi dan harmonisasi kebijakan lintas perangkat daerah masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar mampu mendorong peningkatan indeks secara lebih progresif.

Berbeda dengan Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan cukup signifikan, dari 1,20 pada tahun 2023 menjadi 1,80 pada tahun 2024 dan meningkat lagi menjadi 2,20 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek koordinasi, struktur kelembagaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan SPBE. Kenaikan skor pada domain ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mulai memperkuat integrasi antarunit kerja serta meningkatkan efektivitas fungsi pengelolaan SPBE secara terpusat dan terarah.

Pada Domain Manajemen, terlihat peningkatan dari 1,00 pada tahun 2023 menjadi 1,36 pada tahun 2024 dan melonjak menjadi 2,00 pada tahun 2025. Perkembangan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan risiko, manajemen keamanan informasi, pengelolaan layanan, serta pemanfaatan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi. Lonjakan nilai pada tahun 2025 dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari upaya pembenahan manajerial yang lebih terstruktur, termasuk kemungkinan adanya penyusunan standar operasional prosedur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi internal.

Sementara itu, Domain Layanan sejak awal periode telah menunjukkan capaian yang relatif tinggi dibandingkan domain lainnya, yakni 3,57 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 3,95 pada tahun 2024, kemudian stabil pada angka 3,95 pada tahun 2025. Tingginya skor pada domain ini mengindikasikan bahwa pelayanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Bangka telah berkembang dengan cukup baik dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Stabilitas nilai pada dua tahun terakhir menunjukkan konsistensi kualitas layanan digital, meskipun ruang inovasi dan integrasi layanan kemungkinan masih dapat ditingkatkan untuk mencapai kategori yang lebih unggul.

Secara keseluruhan, pola perkembangan ini memperlihatkan bahwa peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Bangka tidak hanya dipengaruhi oleh satu domain tertentu, melainkan merupakan hasil kumulatif dari perbaikan tata kelola dan manajemen yang secara bertahap memperkuat implementasi kebijakan serta kualitas layanan. Kenaikan indeks dari 1,85 menjadi 3,00 dalam kurun waktu tiga tahun merefleksikan proses transformasi digital yang semakin matang, di mana aspek kelembagaan dan manajerial mulai menyusul kekuatan yang sebelumnya telah terlihat pada domain layanan. Dengan demikian, secara akademik dapat disimpulkan bahwa dinamika peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Bangka menunjukkan adanya korelasi antara penguatan tata kelola dan manajemen internal dengan peningkatan kualitas implementasi pemerintahan berbasis elektronik secara keseluruhan.

Pada Tahun 2025 Kabupaten Bangka mengalami peningkatan nilai pada Domain Tata Kelola dan Domain Manajemen, sedangkan untuk Domain Kebijakan dan Domain Layanan menunjukkan nilai yang sama dengan tahun sebelumnya. Untuk mengetahui lebih rinci capaian komponen pembentuk Indeks SPBE dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Rincian Capaian Indeks SPBE Kabupaten BangkaTahun 2024-2025

NO	INDEKS	NILAI	
		2024	2025
	SPBE	2,80 (Baik)	3,00 (Baik)
1	Domain Kebijakan SPBE	2,50	2,50
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,50	2,50
2	Domain Tata Kelola SPBE	1,80	2,20
	Perencanaan Strategis SPBE	1,25	2,25
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,75	1,75
	Penyelenggaraan SPBE	3,00	3,00
3	Domain Manajemen SPBE	1,36	2,00
	Penerapan Manajemen SPBE	1,50	2,38
	Audit TIK	1,00	1,00
4	Domain Layanan SPBE	3,95	3,95
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,70	3,70
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,33	4,33

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kab. Bangka Tahun 2024 dan 2025

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan walaupun Indeks SPBE Kabupaten Bangka berada pada predikat “Baik” namun masih banyak diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh guna meningkatkan Indeks SPBE Kabupaten Bangka secara signifikan.

Pada Domain Kebijakan SPBE, Pemerintah Kabupaten Bangka telah memiliki beberapa peraturan yang berfungsi sebagai kebijakan internal pelaksana SPBE. Peraturan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2024 yang memuat struktur arsitektur data, arsitektur aplikasi, kondisi eksisting, kondisi target, serta peta rencana SPBE dalam rangka mengintegrasikan layanan dan proses pemerintahan berbasis elektronik di daerah.
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2025 yang menjadi pedoman teknis bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik agar terstruktur dan berkualitas.
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 18 Tahun 2025 yang menjadi dasar internal bagaimana perubahan dalam sistem, proses, atau teknologi SPBE harus dikelola secara efektif untuk mencegah risiko kegagalan implementasi atau gangguan layanan.
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2025 ang menentukan standar kompetensi, pembinaan, dan pembinaan SDM dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kabupaten Bangka.

Dokumen ini penting untuk memastikan ASN yang terlibat dalam SPBE memiliki kompetensi dan kapabilitas sesuai kebutuhan sistem pemerintahan digital. Pada Domain Tata Kelola SPBE menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka berada pada jalur penguatan SPBE yang berkelanjutan, dengan fokus tidak hanya pada penyediaan layanan digital, tetapi juga pada perencanaan strategis yang matang, pemanfaatan teknologi yang optimal, dan implementasi layanan yang terukur serta akuntabel. Peningkatan nilai indeks di setiap komponen menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan di daerah ini berlangsung secara sistematis dan sejalan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Beberapa implementasi tersebut, antara lain aplikasi seperti layanan perizinan, sistem informasi pemerintahan dan layanan publik digital makin berjalan dan terpakai, integrasi antara sistem satu OPD dengan OPD lainnya makin terwujud sehingga data tidak lagi terisolasi, serta monitoring capaian layanan digital semakin rutin dilakukan dan menjadi bagian dari evaluasi kinerja organisasi.

Pada Domain Manajemen SPBE, kondisi Kabupaten Bangka menunjukkan perkembangan yang positif namun masih memiliki ruang untuk penguatan, terutama pada aspek audit TIK. Penerapan manajemen SPBE di daerah ini relatif baik, terlihat dari pengelolaan sistem, layanan, dan sumber daya yang semakin terstruktur dan terkoordinasi antar unit kerja. Pemerintah daerah telah menerapkan perencanaan risiko, manajemen layanan, serta pengelolaan SDM yang mendukung keberlangsungan

SPBE, sehingga operasional layanan digital semakin konsisten dan akuntabel. Sementara itu, audit TIK di Kabupaten Bangka masih memerlukan peningkatan. Meskipun sebagian mekanisme pengawasan terhadap keamanan sistem, kepatuhan regulasi, dan integritas data telah diterapkan, pelaksanaan audit secara rutin belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengendalian internal dan evaluasi teknis sistem SPBE masih menjadi prioritas untuk diperkuat agar tata kelola SPBE lebih andal, aman, dan transparan, namun perlu diperkuat melalui audit dan pengawasan yang lebih sistematis sehingga tata kelola SPBE dapat berjalan secara berkelanjutan bagi seluruh layanan publik.

Untuk Domain Layanan SPBE Kabupaten Bangka sudah menerapkan hampir semua layanan, baik Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik maupun Layanan Publik Berbasis Elektronik. Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bangka telah diterapkan melalui sistem pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan dokumen secara digital, yang meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan koordinasi antarunit kerja. Meskipun demikian, integrasi sistem antar OPD masih perlu diperkuat agar alur kerja internal menjadi lebih lancar dan transparan. Sementara itu, Layanan Publik Berbasis Elektronik menunjukkan perkembangan positif dengan adanya layanan perizinan *online*, administrasi kependudukan digital, dan beberapa layanan publik lainnya yang dapat diakses masyarakat secara daring. Aksesibilitas dan kemudahan penggunaan layanan mulai meningkat, namun masih terdapat tantangan dalam penyediaan layanan yang sepenuhnya terintegrasi dan dalam pemantauan kepuasan pengguna secara rutin.

c) Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Indeks ini menggambarkan sejauh mana ASN telah memenuhi standar kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Pengukuran IP ASN mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pembina manajemen ASN secara nasional. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka dengan realisasi pada Tahun 2025 yang meningkat dibandingkan dengan Tahun 2024, yaitu sebesar 2,75 poin, dari 76,31 menjadi 79,06.

Secara konseptual, IP ASN disusun berdasarkan empat dimensi utama, yaitu kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dimensi kualifikasi mencerminkan kesesuaian tingkat pendidikan formal ASN dengan standar jabatan yang diduduki. Dimensi kompetensi menilai pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, baik pelatihan kepemimpinan, teknis, maupun fungsional. Dimensi kinerja mengukur capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menjadi dasar evaluasi prestasi kerja ASN setiap tahun. Sementara itu, dimensi disiplin berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk rekam jejak pelanggaran disiplin.

Dalam konteks Kabupaten Bangka, IP ASN menjadi instrumen strategis untuk menilai kualitas sumber daya manusia aparatur sekaligus sebagai dasar perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan ASN. Nilai indeks ini mencerminkan tingkat kematangan sistem manajemen kepegawaian daerah, termasuk dalam hal perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi berbasis merit, serta penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur. Apabila nilai IP ASN menunjukkan tren peningkatan, hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan SDM aparatur, seperti meningkatnya partisipasi ASN dalam pengembangan kompetensi, membaiknya capaian kinerja individu, serta menurunnya tingkat pelanggaran disiplin.

Komposit pencapaian unsur penunjang Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 - 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.9.
Perkembangan Komposit Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Tahun 2023-2025

NO	UNSUR PENILAIAN INDEKS PROFESIONALITAS	HASIL PENILAIAN 2023	HASIL PENILAIAN 2024	HASIL PENILAIAN 2025
1.	Unsur Kualifikasi Pendidikan	12,83	21,02	21,14
2.	Unsur Kompetensi	21,06	26,10	28,00
3.	Unsur Kinerja	26,25	24,20	24,91
4.	Unsur Disiplin	5,00	5,00	5,00
Total		65,14	76,31	79,06

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka, 2023, 2024, 2025

Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka dari Tahun 2023 sampai dengan 2025 terus mengalami peningkatan, Tahun 2023 dengan nilai sebesar 65,14 mengalami kenaikan di Tahun 2024 menjadi 76,31 dan Tahun 2025 terus mengalami peningkatan secara signifikan menjadi 79,06. Indeks Profesionalitas ASN berangsur angsur meningkat dengan cukup baik. Data dimensi kinerja didapat dari aplikasi e-kinerja BKN atau rekon data laporan kinerja ke SI ASN sehingga apabila ada ASN yang tidak menyusun dan dinilai SKP nya dengan tepat waktu maka nilai dimensi kinerja akan rendah. Hasil pengukuran IP ASN Tahun 2025 menunjukkan capaian rata-rata dengan kategori “Sedang” yang merupakan capaian angka tertinggi selama lima tahun terakhir. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia aparatur secara bertahap dan terstruktur, baik dari aspek pendidikan, kompetensi, maupun pengelolaan kinerja.

Jika ditinjau berdasarkan unsur penilaiannya, unsur kualifikasi pendidikan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 12,83 pada tahun 2023 menjadi 21,02 pada tahun 2024, dan relatif stabil pada 21,14 pada tahun 2025. Lonjakan ini mengindikasikan adanya peningkatan jenjang pendidikan formal ASN, kemungkinan melalui penyelesaian studi lanjutan atau penyesuaian kualifikasi pendidikan dengan persyaratan jabatan. Stabilitas pada tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian tersebut berhasil dipertahankan, meskipun belum mengalami peningkatan tambahan yang besar.

Pada unsur kompetensi, terlihat tren kenaikan yang konsisten dari 21,06 pada tahun 2023 menjadi 26,10 pada tahun 2024 dan meningkat lagi menjadi 28,00 pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pengembangan kompetensi, seperti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, maupun peningkatan kapasitas manajerial dan teknis ASN. Peningkatan berkelanjutan pada unsur ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kemampuan profesional aparatur agar lebih adaptif terhadap tuntutan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Sementara itu, unsur kinerja menunjukkan dinamika yang berbeda. Nilainya menurun dari 26,25 pada tahun 2023 menjadi 24,20 pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat menjadi 24,91 pada tahun 2025. Penurunan pada tahun 2024 dapat mengindikasikan adanya evaluasi kinerja yang lebih ketat, perubahan indikator penilaian, atau tantangan dalam pencapaian target kerja. Kenaikan kembali pada tahun 2025 menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pencapaian sasaran kinerja individu maupun organisasi, meskipun nilainya belum sepenuhnya kembali seperti tahun 2023.

Adapun unsur disiplin menunjukkan nilai yang stabil pada angka 5,00 selama tiga tahun berturut-turut. Konsistensi ini mencerminkan tingkat kepatuhan ASN terhadap peraturan dan ketentuan disiplin yang relatif terjaga. Meskipun tidak mengalami peningkatan, stabilitas tersebut dapat diartikan sebagai indikator bahwa budaya disiplin dalam birokrasi telah terbentuk dengan cukup baik.

Secara keseluruhan, peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka dari tahun 2023 hingga 2025 terutama didorong oleh perbaikan signifikan pada aspek kualifikasi pendidikan dan kompetensi. Meskipun unsur kinerja mengalami fluktuasi, tren perbaikan pada tahun terakhir menunjukkan adanya proses penyesuaian dan penguatan sistem manajemen kinerja. Dengan demikian, perkembangan komposit indeks ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur secara menyeluruh, meskipun optimalisasi pada aspek kinerja masih menjadi

tantangan yang perlu terus diperkuat agar profesionalitas ASN dapat meningkat secara lebih seimbang dan berkelanjutan.

Berikut ini merupakan beberapa permasalahan dan langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah antara lain :

Tabel 2.10.
Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
- Dalam penyusunan pohon kinerja yang logis dan <i>cascading</i> (penjenjangan) kinerja mulai dari level tertinggi hingga terendah belum sepenuhnya selaras dan belum memperhatikan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i> (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sehingga program dan kegiatan yang disusun belum efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah.	- Memastikan kualitas dan keselarasan perencanaan Pemda dan PD terutama <i>cascading</i> kinerja dalam penyusunan RPJMD dan Renstra PD periode 2025-2029
- Terdapat indikator kinerja Perangkat Daerah yang belum memenuhi kriteria SMART dan tidak sesuai dengan levelnya, terdapat 2 sasaran yang menggunakan indikator yang sama	- Memastikan kualitas dan keselarasan perencanaan Pemda dan PD terutama <i>cascading</i> kinerja dalam penyusunan RPJMD dan Renstra PD periode 2025-2029
- Terdapat penetapan target yang tidak selaras	- Memastikan penetapan target Pemerintah Daerah dan PD yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra PD, Perjanjian Kinerja Bupati dan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2026, Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati dan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2026, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD Tahun 2026 serta RKPD dan Renja PD tahun 2027 terukur, selaras, <i>achievable</i> dan menantang
- Laporan kinerja pada level perangkat daerah belum cukup memberikan informasi tentang analisis capaian kinerja dan data pembandingan capaian kinerja serta belum digunakan sepenuhnya untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya.	- Melakukan perbaikan kualitas dokumen laporan kinerja perangkat daerah dan memastikan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD) telah memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya
- Aplikasi SILAKIP Kabupaten Bangka belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pemantauan kinerja secara berkala dan transparan kepada publik	- Mengembangkan aplikasi perencanaan, pelaporan, dan evaluasi pengganti aplikasi SILAKIP
- Belum ada kebijakan internal SPBE yang mengatur tentang layanan pusat data yang harus digunakan oleh seluruh unit kerja Pemerintah Kabupaten Bangka	- Melengkapi dan memperbaiki terhadap Kebijakan internal tata kelola SPBE Pemkab Bangka
- Penerapan pada aspek audit TIK belum terpenuhi	- Semua aspek audit TIK kedepannya akan segera diterapkan secara maksimal dan dilakukan secara periodik baik oleh Tim Audit internal maupun eksternal
- Kurangnya perencanaan kinerja yang terukur dan terstandarisasi	- Melakukan penyusunan rencana kinerja berbasis indikator SMART, penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara digital, peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penguatan budaya kerja berbasis kinerja melalui disiplin, motivasi, dan penghargaan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi didukung oleh pelaksanaan14 (empat belas) Program, yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 3) Program Perekonomian dan Pembangunan;
- 4) Program Pengelolaan Arsip;
- 5) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 6) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 8) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
- 9) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 10) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- 11) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 12) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- 13) Program Kepegawaian Daerah;

14) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Efektivitas program-program yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja atas sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi diukur dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja sasaran terhadap capaian realisasi keuangan atas program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran. Pada Tahun 2025, realisasi keuangan atas program-program yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi mencapai 95,69 persen dan mampu merealisasikan capaian kinerja sasaran sebesar 102,48 persen sehingga tingkat efektivitas program tersebut dalam mencapai sasaran mencapai 107,10 persen atau Sangat Efektif. Tingkat efektivitas terhadap capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.11.
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi)

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2025	95,69	102,48	107,10	Sangat Efektif

Sumber: LRA APBD Kab. Bangka Tahun 2025 (unaudited), BPPKAD Kab. Bangka, 2026

Sementara itu, ditinjau dari segi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, terlihat bahwa tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi mencapai 6,79 persen. Efisiensi ini diperoleh dengan mengurangi persentase capaian kinerja sasaran (102,48 persen) terhadap persentase realisasi anggaran program (95,69 persen) sebagaimana tertera pada Tabel berikut :

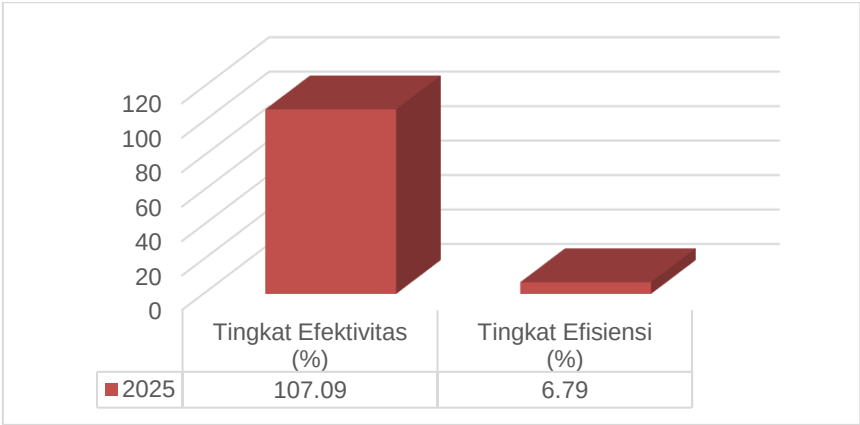
Tabel 2.12.
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi)

TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2025	759.576.158.850,79	726.875.225.771,58	95,69	102,48	6,79

Sumber: LRA APBD Kab. Bangka Tahun 2025 (unaudited), BPPKAD Kab. Bangka, 2026

Tingkat efektifitas dan efisiensi anggaran terhadap pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi tahun 2025 dapat dilihat dari Grafik berikut:

Grafik 2.7.
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025
“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi”



2. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel.

Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kinerja utama, antara lain opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran, persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta tingkat realisasi anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian indikator menunjukkan tren yang positif dan mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Dalam hal opini LKPD, Pemerintah Kabupaten Bangka berhasil mempertahankan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan terus mengalami peningkatan, sebagai bentuk komitmen perangkat daerah dalam memperbaiki sistem pengendalian internal dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Optimalisasi fungsi pengawasan internal juga dilakukan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Upaya yang dilakukan meliputi penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan, serta penegakan disiplin dalam pelaksanaan administrasi keuangan. Selain itu, koordinasi intensif dengan perangkat daerah turut mendorong keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.

Dari sisi realisasi anggaran, tingkat penyerapan anggaran menunjukkan capaian yang optimal dan selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan semakin baiknya kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung prioritas pembangunan daerah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan, penyempurnaan sistem informasi keuangan, serta penguatan manajemen risiko dalam pelaksanaan anggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangka terus melakukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan kompetensi aparatur, digitalisasi pengelolaan keuangan, serta penguatan sistem pengendalian intern.

Secara keseluruhan, capaian sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan berada pada jalur yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI merupakan bagian dari reformasi di bidang keuangan negara yang memaksa pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam mengukur kapasitas daerah atas pengelolaan keuangan daerah, terdapat 2 (dua) indikator yang dapat diperhatikan, yaitu Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Indikator kinerja dan capaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel pada tahun 2025 adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.13.
Capaian Kinerja Atas SasaranTahun 2025
(Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori	WTP	WTP	100,00	T
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	64,63	64,63	100,00	T
Rata-rata Capaian					100,00	T

Sumber: - LHP atas LKPD Kab. Bangka Tahun 2024, BPK RI, 2025
- Laporan Hasil Pengukuran IPKD Tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri, 2025
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja, indikator pertama yaitu Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya ditargetkan memperoleh kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Realisasi yang dicapai juga WTP, sehingga tingkat capaian mencapai 100,00 persen dengan kriteria Tercapai (T). Capaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka telah disusun dan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai.

Sementara itu, indikator kedua yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ditargetkan sebesar 64,63, realisasi yang diperoleh untuk Tahun 2025 sebesar 64,63 atau mencapai 100,00 persen dengan kriteria Tercapai (T). Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun aspek kepatuhan dan kualitas pelaporan keuangan telah baik, masih diperlukan peningkatan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Secara agregat, rata-rata capaian kinerja atas sasaran ini sebesar 100,00 dengan kriteria Tercapai (T). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik, terutama dalam mempertahankan opini WTP. Namun demikian, peningkatan kualitas tata kelola keuangan tetap menjadi perhatian, khususnya dalam upaya meningkatkan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah agar lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.14.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD
(Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR RPD	REALISASI TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPD (%)
1	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori	WTP	WTP	100	WTP	100
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	85,29	64,63	100	85,25	75,81

Sumber: - LHP atas LKPD Kab. Bangka Tahun 2024, BPK RI, 2025
- Laporan Hasil Pengukuran IPKD Tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri, 2025
- Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kab. Bangka Tahun 2024-2026
- Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kab. Bangka Tahun 2024

Berdasarkan Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Target Akhir RPD pada sasaran *Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada indikator Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD, realisasi tahun 2024 memperoleh opini WTP, dan pada tahun 2025 tetap mempertahankan opini WTP. Capaian tahun 2025 terhadap target mencapai 100%, dengan target akhir RPD juga WTP. Dengan demikian, realisasi tahun 2025 terhadap target akhir RPD tercapai 100%, yang menunjukkan konsistensi dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Sementara itu, pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, realisasi tahun 2024 sebesar 85,29, sedangkan realisasi tahun 2025 sebesar 64,63. Meskipun capaian tahun 2025 tercatat 100% terhadap target tahunan, jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 85,25, realisasi tahun 2025 baru mencapai 75,81%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target tahunan terpenuhi,

masih terdapat kesenjangan terhadap target akhir RPD yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara umum, kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dalam mempertahankan opini WTP, namun masih diperlukan upaya optimalisasi pada aspek indeks pengelolaan keuangan agar selaras dengan target akhir RPD.

Penjelasan lebih lanjut terhadap masing-masing indikator dijelaskan di bawah ini.

a) Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan amanat UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Daerah Kabupaten Bangka oleh BPK sesuai hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 Nomor: 96/LHP/XVIII.PPG/05/2025 tanggal 23 Mei 2025 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya. Capaian ini telah sesuai dengan target kinerja tahun 2025. Pada tahun 2025 opini hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun sebelumnya ditargetkan memperoleh opini WTP dan berhasil direalisasikan sesuai target sehingga memperoleh capaian kinerja 100 persen.

Opini WTP yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam pengelolaan keuangannya Pemerintah Kabupaten Bangka telah melalui sistem dan prosedur yang baik termasuk pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan, pencatatan dan penatausahaan bukti-bukti transaksi semuanya telah sesuai dengan SAP. Selain itu, opini WTP juga menunjukkan kehandalan SPI entitas Pemerintah Kabupaten Bangka telah berjalan dengan baik sehingga tujuan SPI telah tercapai berupa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan, pengamanan aset serta ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan. Kehandalan SPI selanjutnya akan mempersempit peluang atau kesempatan pejabat untuk melakukan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Realisasi kinerja atas opini hasil pemeriksaan LKPD Tahun Sebelumnya pada tahun 2025 telah sesuai dengan target akhir RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Ini artinya sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel merupakan salah satu sasaran yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026.

Capaian WTP atas pengelolaan keuangan tahun 2025 yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2025 telah menyamai capaian Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga memperoleh opini WTP atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerahnya pada tahun yang sama. Pemerintah Kabupaten Bangka bersama-sama dengan 6 (enam) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih opini WTP atas LKPD Tahun 2025. Predikat opini atas Laporan Keuangan Kabupaten Bangka dan Pemerintah se-Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15.
Predikat Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2025

No	Nama Pemda	Opini LKPD Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Provinsi Bangka Belitung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kabupaten Bangka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Bangka Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Bangka Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Bangka Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Belitung	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Belitung Timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kota Pangkal Pinang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LHP atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025, BPK RI

Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan perjalanan panjang dalam membangun tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang baik. Capaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel yang telah berjalan tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Komitmen dan integritas pimpinan dan pengelola kegiatan;
2. Sistem Pengendalian Internal yang memadai;
3. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran;
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;
5. Peningkatan kualitas laporan keuangan;
6. Peningkatan kualitas proses pengadaan barang/jasa;
7. Peningkatan pengelolaan barang milik Daerah;
8. Peningkatan kualitas pengawasan dan reviu atas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan dan kinerja; dan
9. Percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

Perolehan opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, capaian ini juga mencerminkan efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta konsistensi dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penatausahaan keuangan yang tertib, serta penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dan andal. Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan, serta optimalisasi sistem informasi keuangan daerah turut berkontribusi terhadap pencapaian tersebut.

b) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengeluarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.

Dimensi dan Indikator IPKD, terdiri dari 1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, 2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, 3) transparansi keuangan daerah, 4) penyerapan anggaran, 5) kondisi keuangan daerah, dan 6) opini BPK atas LPKD. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Bangka tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2024. Penurunan ini juga dikarenakan adanya metode Perhitungan terbaru dari Kemendagri. Secara detail, rincian dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.16.
Perkembangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Kabupaten Bangka Tahun 2021-2025

No	Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	11,62	14,93	8,24	14,97	9,2
2	Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	18,62	19,83	19,83	20,00	13,936
3	Transparansi Keuangan Daerah	12,93	12,93	14,74	14,48	7,5
4	Penyerapan Anggaran	15,00	15,00	20,00	20,00	20
5	Kondisi Keuangan Daerah	2,25	2,80	6,25	0,83	4
6	Opini BPK atas LPKD	15,00	15,00	15,00	15,00	10
Total		65,49	75,42	80,49	84,06	64,63

Sumber: Laporan Hasil Pengukuran IPKD Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025, Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) mengalami penurunan pada Tahun 2025. Untuk penilaian tahun 2025, penilaian IPKD oleh Kementerian Dalam Negeri mengalami perubahan metode terutama dalam pembobotan sehingga pada beberapa dimensi mengalami penurunan skor. Selain itu juga menurunnya pendapatan Daerah yang terjadi di hampir seluruh Daerah di Indonesia karena efek ekonomi global ditambah lagi dengan efisiensi transfer Dana Ke Daerah cukup memberikan pengaruh pada beberapa komponen penilaian IPKD

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan dan juga akar masalah pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dikemukakan di atas, beberapa upaya pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka untuk meningkatkan pengelolaan keuangannya menjadi semakin akuntabel sebagaimana rekomendasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17.
Permasalahan, akar masalah dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

Permasalahan	Akar Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
Kualitas perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja	Kualitas perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja	Kualitas perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah belum mencapai target akhir RPD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah belum mencapai target akhir RPD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah belum mencapai target akhir RPD
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan belum optimal	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan belum optimal	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan belum optimal
Ketepatan waktu dan kualitas pelaporan keuangan masih perlu ditingkatkan	Ketepatan waktu dan kualitas pelaporan keuangan masih perlu ditingkatkan	Ketepatan waktu dan kualitas pelaporan keuangan masih perlu ditingkatkan

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel ini didukung oleh pelaksanaan 5 (lima) program yaitu:

- 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 4. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Untuk mengukur tingkat efektivitas capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel)

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2025	90,26	100,00	110,79	Sangat Efektif

Sumber: LRA APBD Kab. Bangka Tahun 2025 (unaudited), BPPKAD Kab. Bangka, 2026

Berdasarkan tabel di atas, realisasi keuangan atas program-program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel pada tahun 2025 adalah sebesar 90,26 persen. Jika nilai realisasi keuangan tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 persen, maka tingkat efektivitas terhadap pencapaian sasaran pada tahun 2025 sebesar 110,79 persen atau sangat efektif.

Sementara efisiensi penggunaan sumber daya terutama sumber daya anggaran dalam menunjang pencapaian sasaran digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.19.
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel)

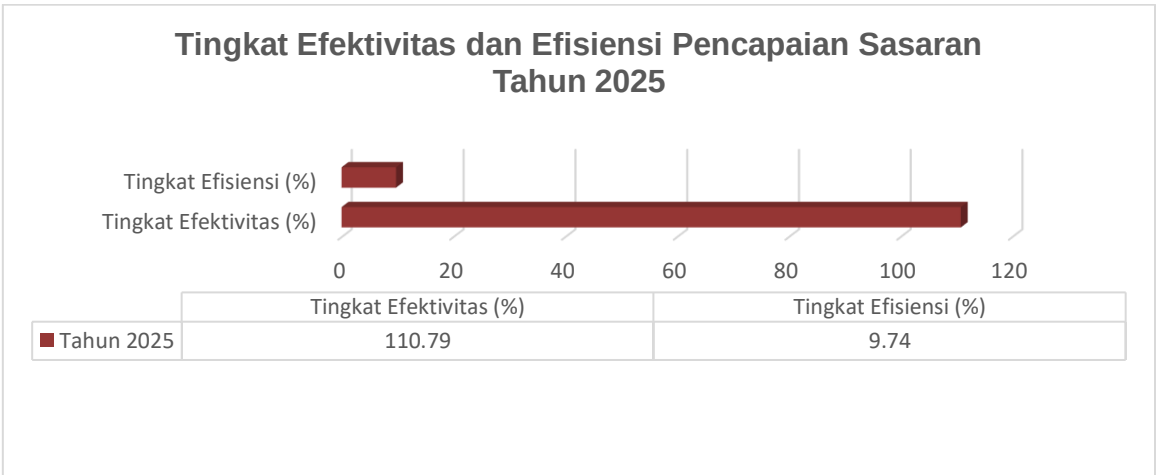
TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2025	150.983.414.606,53	136.280.794.314,00	90,26	100	9,74

Sumber: LRA APBD Kab. Bangka Tahun 2025 (unaudited), BPPKAD Kab. Bangka, 2026

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pagu belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel pada tahun 2025 sebesar Rp.150.983.414.605,53 dengan realisasi belanja mencapai Rp.136.280.794.314,00 atau sebesar 90,26 persen, sementara capaian kinerja sasaran sebesar 100 persen, sehingga terdapat efisiensi sebesar 9,74 persen.

Tingkat efektifitas dan efisiensi anggaran terhadap pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel tahun 2025 dapat dilihat dari Grafik berikut:

Grafik 2.8.
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel)



3. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat

Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi.

Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka telah mampu memenuhi harapan masyarakat maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi juga dilakukan agar dapat menentukan upaya terbaik untuk memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan zaman dan keinginan masyarakat saat ini. Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam hal ini adalah melalui Survey Kepuasan Masyarakat.

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat berikut target dan capaiannya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20.
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,54	88,87	101,52	MT
Rata-rata Capaian					101,52	MT

Sumber: - Hasil Pengukuran IKM Tahun 2025, Bappeda Kab. Bangka
- Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat untuk tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemkab Bangka tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka, diperoleh nilai IKM Kabupaten Bangka tahun 2025 mencapai 88,87. Capaian ini masuk dalam kategori melebihi target (MT) dengan persentase capaian sebesar 101,52 persen.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mutu kinerja pelayanan Pemkab Bangka berada dalam kategori A (interval 81,25-100,00) atau Sangat Baik, dengan sebagian besar masyarakat Kabupaten Bangka merasa puas terhadap kinerja Pemkab Bangka dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Pencapaian ini memberikan gambaran bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka sesuai dengan harapan semua lapisan masyarakat yang menikmati layanan tersebut.

Selanjutnya pada tabel berikut disajikan perbandingan antara capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat tahun 2025 dengan tahun sebelumnya serta dengan target akhir RPD Tahun 2024-2026.

Tabel 2.21.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPD	REALISASI TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPD (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,35	87,54	88,87	85,09	104,44

Sumber: - Hasil Pengukuran IKM Tahun 2025, Bappeda Kab. Bangka
- Rencana Pembangunan Daerah Kab. Bangka Tahun 2024-2026
- Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kab. Bangka Tahun 2024
- Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian tahun 2025 telah melampaui capaian tahun 2024. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024 -2026, realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 telah mencapai 104,44 persen. Hal ini menunjukkan perkembangan yang positif dan diharapkan akan terus meningkat hingga akhir periode RPD nantinya.

Sejatinya, pelayanan publik di Kabupaten Bangka sudah berada di jalur yang benar (*on the right track*) dan berjalan menuju pada peningkatan derajat pelayanan publik yang lebih baik. Lebih dari itu, pembangunan daerah juga sudah mulai dilaksanakan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang sudah disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka dalam rangka menjamin pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Berbagai inovasi pelayanan publik yang diimplementasikan oleh Perangkat Daerah dan dampak positif terhadap kualitas kinerja pelayanan publik meskipun berada ditengah-tengah keterbatasan yang ada;
2. Dukungan sistem pelayanan dan sarana prasarana pendukung;
3. Komitmen yang penuh dalam memberikan pelayanan publik yang tetap maksimal tetap dijalankan oleh seluruh elemen mulai dari level pimpinan hingga ke pelaksana.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh 10 (sepuluh) program pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan yaitu:

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
7. Program Pendaftaran Penduduk;
8. Program Pencatatan Sipil;
9. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Selanjutnya diuraikan beberapa permasalahan dan langkah-langkah pemecahan masalah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat di masa yang akan datang.

Tabel 2.22.
Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
- Keterbatasan anggaran yang berpengaruh pada output kinerja - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tahapan dan alur pelayanan.	- Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk tetap menjaga kualitas pelayanan - Mengeksplorasi strategi dan langkah-langkah yang lebih inovatif guna tetap memnuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan - Memamksimalkan kinerja personil yang ada untuk memberikan layanan secara langsung pada masyarakat

Untuk mengukur efektifitas capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat, diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.23.
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat)

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2025	91,86	101,52	110,52	Sangat Efektif

Sumber: LRA APBD Kab. Bangka Tahun 2025 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran yang diukur berdasarkan satu indikator sebesar 101, 52 persen dengan realisasi keuangan sasaran sebesar 91,86 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran sebesar 110,52 persen atau sangat efektif. Sementara efisiensi penggunaan sumber daya terutama sumber daya anggaran dalam menunjang pencapaian sasaran digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.24.
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat)

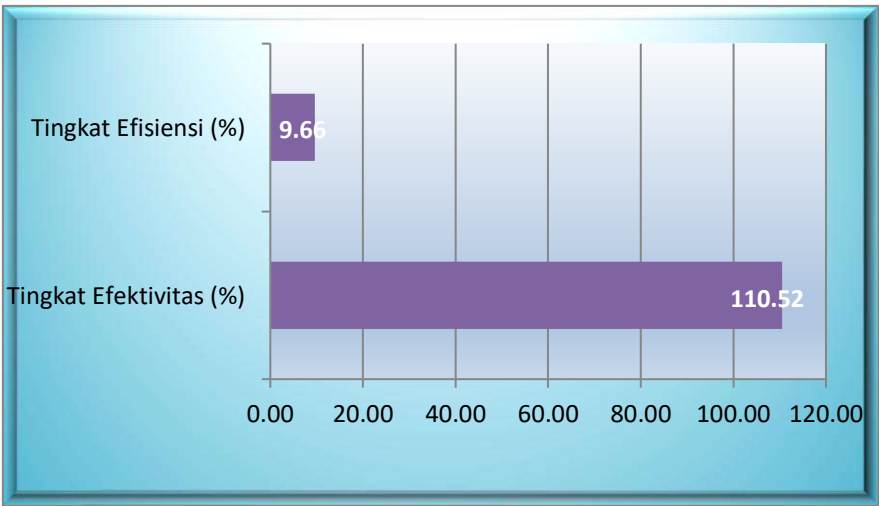
TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2025	45.855.287.977,00	42.124.827.035,00	91,86	101,52	9,66

Sumber: LRA APBD Kab. Bangka Tahun 2025 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pagu belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat pada tahun 2025 sebesar Rp.45.855.287.977,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp.42.124.827.035,00 atau sebesar 91,86 persen, sementara capaian kinerja sasaran sebesar 101,52 persen, sehingga terdapat efisiensi sebesar 9,66 persen.

Tingkat efektifitas pelaksanaan program dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat pada tahun 2025 sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.9.
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat)



4. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat merupakan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Pendidikan yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan kualitas pendidikan juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antar kelompok masyarakat. Intervensi kebijakan difokuskan pada wilayah dengan tingkat partisipasi sekolah yang masih rendah, angka putus sekolah yang tinggi, serta keterbatasan fasilitas pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan yang responsif dan berkelanjutan, dengan pendidikan yang lebih baik, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hasil yang diharapkan dari meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat adalah terciptanya sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan social. Untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah dapat diukur melalui indikator angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah disetiap jenjang pendidikan. Indikator ini akan menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan sistem pendidikan yang diselenggarakan. Indikator ini juga dapat dijadikan tolak ukur yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan. Indikator ini juga digunakan untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan kualitas pendidikan masyarakat pada tahun 2025, maka dilakukan pengukuran indikator keberhasilan pencapaian sasaran terhadap angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25.
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025

NO	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Angka Rata- Rata Lama Sekolah	Tahun	8,47	8.77	103,54	MT
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,13	13,13	100,00	T
	Rata- Rata Capaian				101,77	MT

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2026

Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator-indikator sebagaimana tertera pada tabel diatas diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah 101,77 persen yang berarti kinerja sasaran masuk kategori Melebihi Target (MT) atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Secara detail, Tabel di atas memberikan informasi kinerja yang sangat komprehensif dalam mendukung pencapaian sasaran yaitu :

1) Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS):

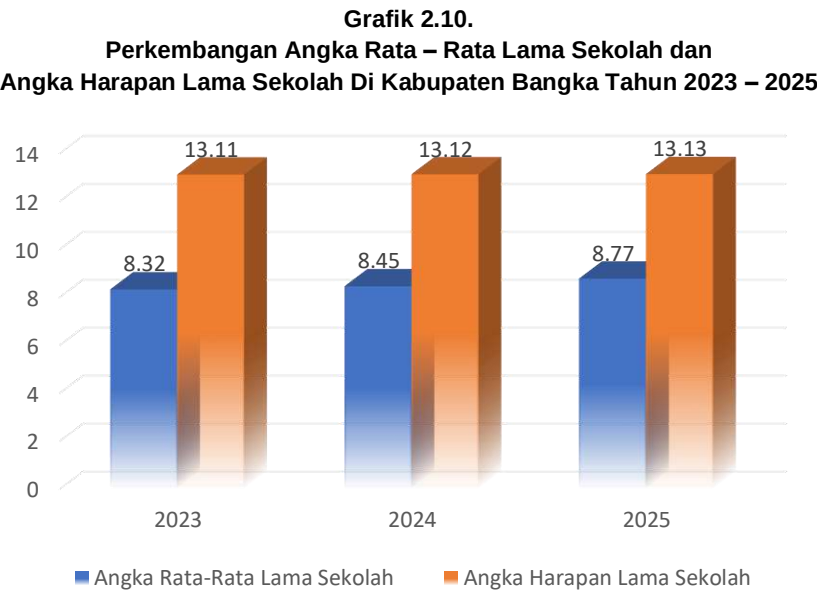
Tahun 2025 upaya peningkatan pendidikan Masyarakat yang telah dilakukan menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dimana target yang semula diharapkan sebesar 8,47 ternyata terealisasi sebesar 8,77 dengan persentase capaian sebesar 103,54% yang berarti telah melebihi target. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan akses pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah, serta dukungan kebijakan pemerintah dalam memperluas layanan pendidikan dasar dan menengah.

2) Angka Harapan Lama Sekolah

Untuk tahun 2025 Angka harapan lama Sekolah juga telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dimana target yang telah ditentukan sebesar 13,13 juga terealisasi sebesar 13,13 dengan capaian 100%, ini berarti bahwa pencapaian sasaran dapat tercapai dengan baik dan ini menjadi

sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang sekolah di Tahun 2024 serta memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia yang lebih baik. Dimana Pada tahun 2025, secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas pendidikanya telah mencapai 8.77 tahun atau menyelesaikan pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas 9).



Sumber : BPS Kabupaten Bangka,2026

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang sudah menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Perkembangan angka rata – rata lama sekolah di Kabupaten Bangka selama tahun 2023 – 2025 menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2023, angka rata – rata lama sekolah mencapai 8,32 tahun, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 8,45 tahun dan terus meningkat pada tahun 2025 menjadi 8,77 tahun. Meningkatnya angka rata – rata lama sekolah tersebut dipengaruhi menurunnya angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan dan meningkatnya peran serta masyarakat untuk mengikuti pendidikan penyetaraan (pendidikan paket A/B/C).

Angka harapan lama sekolah mengindikasikan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dan digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Searah dengan peningkatan angka rata – rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah Kabupaten Bangka selama tahun 2023 – 2025 juga menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Jika pada tahun 2023 angka harapan lama sekolah sebesar 13,11 tahun, maka pada tahun 2024 terkoreksi menjadi 13,12 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 13,13 tahun pada tahun 2025.

Selanjutnya perbandingan capaian indikator dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.26.
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2025 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1.	Angka Rata- Rata Lama Sekolah	Tahun	8,45	8,77	8.33	105,28
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,12	13,13	12.86	102,10

Sumber: - Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kab. Bangka, 2025
- Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kab. Bangka Tahun 2024-2026
- Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kab. Bangka Tahun 2023
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2024

Tabel diatas menjelaskan bahwa terjadi peningkatan terhadap masing – masing indikator sasaran dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Realisasi indikator angka rata – rata lama sekolah kondisi pada tahun 2024 mencapai 8,45 tahun dan meningkat pada tahun 2025 sebesar 8,77 tahun atau tumbuh sebesar 0,32 persen. Capaian sampai dengan tahun 2025 terhadap kondisi akhir RPJMD (2025) telah melebihi target sebesar 105,28 persen atau lebih 5,28 persen dari target yang telah ditetapkan. Untuk Angka harapan lama sekolah jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2024) sudah melebihi target yaitu 102,10 persen atau lebih 2,10 persen, sehingga kedepan, untuk angka harapan lama sekolah dan angka rata – rata lama sekolah di setiap jenjang pendidikan, perlu dilakukan akselerasi kinerja agar pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bangka berjalan dengan maksimal sebanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Selanjutnya perbandingan antara capaian indikator atas sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat pada tahun 2025 dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Standar Nasional

Indikator Sasaran	Capaian 2025		
	Nasional	Provinsi	Kabupaten
Angka Harapan Lama Sekolah	13,30	12,50	13,13
Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,07	8,65	8,77

Sumber : BPS Kabupaten Bangka , 2024

Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari dari angka rata – rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang dalam kurun beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan kinerja walaupun tidak signifikan. Angka rata – rata lama sekolah meningkat dari 8,45 tahun menjadi 8,77 tahun sedangkan angka harapan lama sekolah meningkat dari 13,12 tahun menjadi 13,13 tahun. Namun jika dibandingkan dengan standar nasional, angka rata – rata lama sekolah kabupaten hampir mendekati standar nasional (13,30 tahun), Apabila ditelaah secara spesifik, rendahnya peningkatan angka rata-rata lama sekolah kabupaten menjadi pemicu terjadinya degradasi peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan standar provinsi, kedua komposit IPM tersebut masih diatas standar provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa

tingkat pendidikan di kabupaten lebih tinggi dibandingkan standar provinsi yang hanya sebesar 12,50 tahun untuk angka harapan lama sekolah dan sebesar 8,65 tahun untuk angka rata – rata lama sekolah.

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Bangka dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1. Adanya Peningkatan kemampuan dan pemerataan tenaga pendidik
- 2. Penyelenggaraan Kurikulum pendidikan dasar yang sesuai standar
- 3. Terlaksananya Program untuk Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.
- 4. Adanya Akses yang memadai untuk menuju ke sarana pendidikan
- 5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
- 6. Pendapatan per kapita masyarakat

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari adanya 7 (lima) program pendukung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, program tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2. Program Pengembangan Kurikulum;
- 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- 5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- 7. Program Pembinaan Perpustakaan.

Berikut ini merupakan beberapa permasalahan dan Langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan masyarakat antara lain:

Tabel 2.28.
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
- Masih rendahnya angka rata – rata lama sekolah yang berkisar 8,77 tahun atau setara kelas VIII akibat masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka melanjutkan antar jenjang pendidikan	- Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) - Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan miskin melalui pola kerjasama dengan pihak terkait - Melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah.
- Kurangnya Strategi Pembelajaran dalam mendukung keberhasilan pendidikan	- Mengembangkan strategi pembelajaran - Memperkuat digitalisasi pendidikan - Memperkuat pembelajaran yang mendorong penguatan karakter di semua satuan pendidikan
- Tata kelola guru dan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan	- Redistribusi tenaga pengajar antar wilayah. - Melaksanakan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan - Pemberian insentif tenaga pengajar dengan pertimbangan jarak dan/atau daerah terpencil.
- Akses menuju sarana pendidikan jauh	- Pembukaan rute jalur transportasi umum menuju sarana pendidikan
- Kualitas dan kapasitas tenaga pengajar masih perlu ditingkatkan	- Peningkatan kompetensi guru melalui Pelatihan dan Sertifikasi - Bagi tenaga pengajar mata pelajaran prioritas yang telah berjenjang Strata I dilanjutkan dengan Strata II

Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran “meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat” diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.29.
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2025	101,77	95,43	106,64	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka 2025 (un audited)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan indikator utama dapat dicapai sebesar 101,77 persen dengan realisasi keuangan sasaran hanya sebesar 95,43 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran justru sebesar 106,64 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat digambarkan pada tabel berikut :

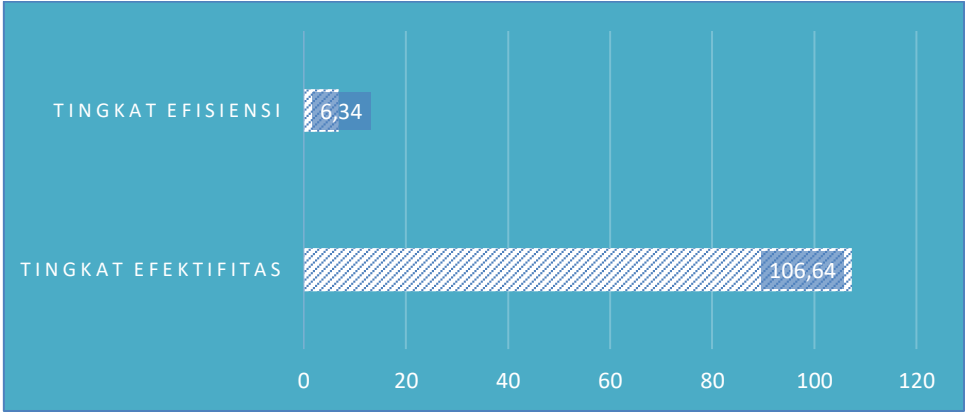
Tabel 2.30.
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025

Tahun	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2025	96.132.378.676,00	91.734.409.200,00	95,43	101,77	6,34

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka 2025 (un audited)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2025 sebesar Rp.96.132.378.676,00,- dengan realisasi belanja mencapai hanya Rp.91.734.409.200,00 atau sebesar 101,77 persen. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 6,34 persen.

Grafik 2.11.
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian
Sasaran “Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas”
Tahun 2025



5. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan wajib dasar yang harus disediakan Pemerintah untuk masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif baik secara sosial dan ekonomi. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka adalah Angka Harapan Hidup dan Angka Stunting. Berikut dijabarkan target dan capaian indikator terhadap target Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

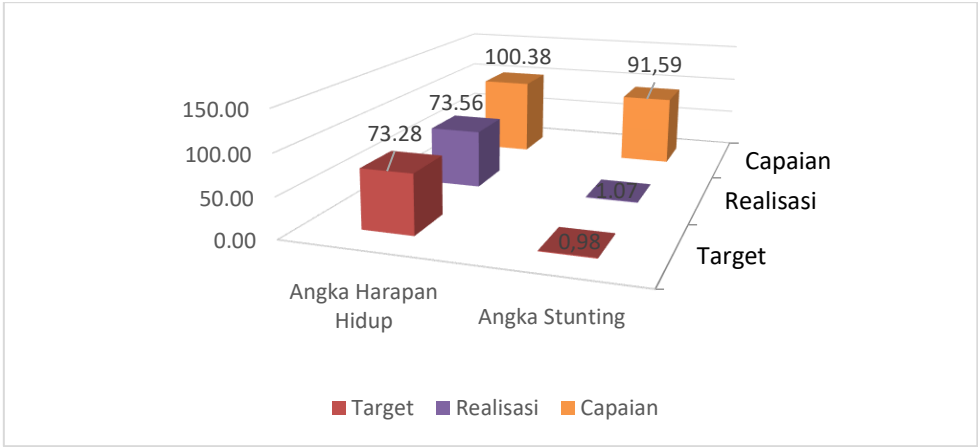
Tabel 2.31.
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,28	73,56	100,38	MT
2.	Angka Stunting	%	0,98	1,07	91,59	TT
Rata - Rata Capaian					95,99	TT

Sumber: - Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kab. Bangka, 2026
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025

Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator-indikator sebagaimana tertera pada tabel diatas diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah 95,99 persen. Dari kedua indikator sasaran diketahui bahwa indikator sasaran angka harapan hidup melebihi target (MT) dan indikator angka stunting tidak tercapai (TT), sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa sasaran “meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat” rata-rata capaian tidak mencapai target.

Grafik 2.12.
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025



Indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan sasaran “meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat” terdiri dari angka usia harapan hidup, penurunan angka stunting. Untuk indikator sasaran Angka Stunting adalah indikator yang menunjukkan semakin kecil angka realisasi berarti capaian atau keberhasilan sangat baik. Sedangkan untuk nilai indikator angka usia harapan hidup, semakin tinggi nilai indikator semakin baik.

Untuk angka usia harapan hidup tahun 2025 mencapai usia 73,56 tahun. Angka ini telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 73,28 tahun, dengan capaian sasaran sebesar 100,38 persen. Angka usia harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka dapat dipastikan bahwa status kesehatan masyarakat di daerah tersebut semakin baik.

Banyak hal yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas, antara lain faktor kesehatan, faktor ekonomi, lingkungan, budaya dan pendidikan. Dengan meningkatnya angka usia harapan hidup tahun 2025 menunjukkan semakin besarnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu meningkatnya usia harapan hidup juga menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Angka harapan hidup Kabupaten Bangka mencapai 73,56 berarti bahwa setiap bayi yang lahir hidup di Kabupaten Bangka mempunyai harapan untuk bertahan hidup sampai usia 73,56 tahun.

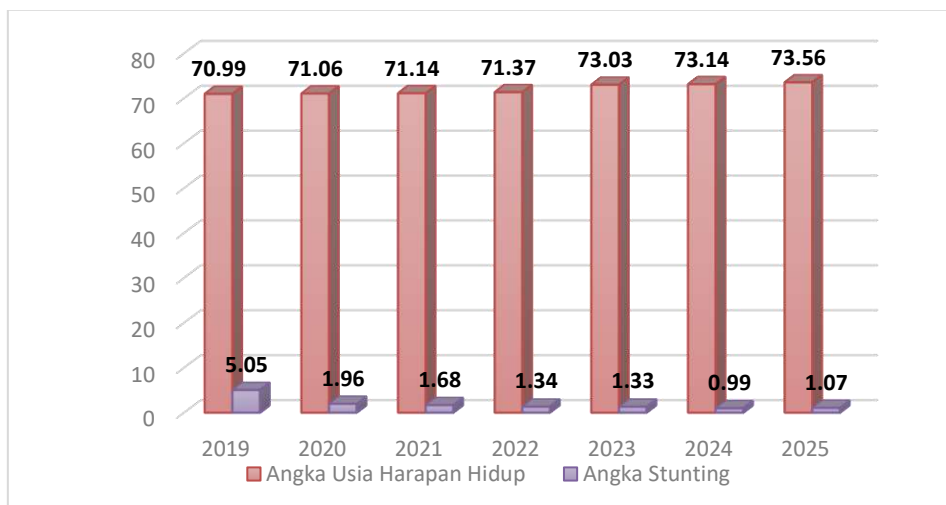
Selanjutnya untuk capaian indikator Angka Stunting belum dapat memenuhi target yang diperjanjikan. Pada Tahun 2025 capaian untuk indikator ini adalah 1,07 masih berada dibawah target yang ditetapkan yaitu 0,98. Maka jika dibandingkan dengan targetnya , diketahui capaian indikator angka stunting hanya sebesar 91,59 persen (Tidak Tercapai). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi

peningkatan prevalensi gizi buruk. Gizi buruk dapat disebabkan oleh adanya penyakit infeksi atau penyakit penyerta pada balita serta pola asuh orangtua tentang pemberian makanan sehat yang kurang baik sehingga menyebabkan asupan makanan anak menjadi tidak seimbang. Dengan meningkatnya persentase balita gizi buruk pada tahun 2025 menunjukkan bahwa status gizi balita di Kabupaten Bangka harus menjadi perhatian semua pihak agar penurunan stunting dapat berhasil dengan baik.

Pencapaian sasaran ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan surveilans gizi, pemantauan status gizi balita secara rutin setiap bulan di 237 Posyandu aktif yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Bangka, ketersediaan panti rehabilitasi gizi/*Therapeutic Feeding Centre* di Puskesmas Bakam dan Puskesmas Petaling sebagai sarana pelayanan kesehatan khusus bagi penderita masalah gizi, Pemberian Makanan Tambahan bagi balita gizi kurang dan gizi buruk, pemantauan kenaikan Berat Badan balita gizi buruk secara terus menerus dan pengawasan terhadap penyakit penyerta yang mungkin diderita balita gizi buruk merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran di atas.

Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Dana Bantuan Operasional Puskesmas dan Alokasi Dana Desa di beberapa desa turut mendukung penyediaan logistik PMT balita. Puskesmas juga melakukan berbagai inovasi seperti posyandu sore dan di hari libur serta rumah timbang balita. Fokus pemerintah pusat terhadap masalah gizi stunting juga meningkatkan kualitas pencatatan dan pemantauan status gizi balita melalui ePPGBM (Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik) yang dilanjutkan dengan intervensi dan pemantauan perbaikan status gizi.

Grafik 2.13.
Perkembangan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019 – 2025



Perkembangan indikator kinerja sasaran selama 2019 - 2025 menunjukkan hasil yang menggemblirakan dengan trend capaian yang terus mengalami hasil yang cukup baik. Angka usia harapan hidup meningkat dari 70,99 tahun di tahun 2019 terus meningkat menjadi 71,06 di tahun 2020, pada tahun 2021 meningkat menjadi 71,14, pada tahun 2022 meningkat menjadi 71,37, pada tahun 2023 terus meningkat menjadi 73,03 tahun dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 73,14. Pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 angka harapan hidup telah meningkat menjadi 73,56 tahun. Angka Stunting menurun signifikan dari 5,05 persen di tahun 2019 terus menurun menjadi 1,96 di tahun 2020 dan 1,68 tahun 2021 terus menurun menjadi 1,34 pada tahun 2022, pada tahun 2023 menurun menjadi 1,33 dan pada tahun 2024 menurun menjadi 0,99. Pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, angka stunting mengalami kenaikan menjadi 1,07.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.32.
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2025 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,24	73,56	71,47	102,92
2.	Angka Stunting	%	0,99	1,07	1,31	122,43

Sumber: - Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kab. Bangka, 2026
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025
- Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kab. Bangka Tahun 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran angka harapan hidup sampai tahun 2025 terhadap kondisi akhir RPD telah mencapai 102,92, menunjukkan telah melebihi target, sedangkan indikator angka stunting sampai tahun 2025 terhadap kondisi akhir RPD telah mencapai 122,43. menunjukkan telah melebihi target.

Angka usia harapan hidup pada tahun 2025 meningkat dibanding tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin baik sehingga pola hidup sehat semakin meningkat.

Pengukuran dan publikasi angka stunting adalah upaya kabupaten/kota untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan, puskesmas, kecamatan dan desa/kelurahan. Hasil pengukuran tinggi badan anak balita dan publikasi angka stunting dapat digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan bersama penurunan stunting.

Tujuan dari pengukuran angka stunting adalah untuk mengetahui status gizi anak sesuai umur dan untuk mengukur prevalensi stunting di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten secara berkala mulai dari posyandu sampai ke Dinas Kesehatan kabupaten.

Dalam penginputan melalui e-PPGBM terdapat 3 indikator pengukuran yaitu menurut BB/U (menentukan Sangat Kurang, Kurang, Berat Badan Normal dan Resiko Lebih), menurut TB/U (Menentukan Sangat Pendek, Pendek, Normal dan Tinggi) dan Menurut BB/TB (Menentukan Gizi Buruk, Gizi Kurang, Normal, Resiko Gizi Lebih, Gizi Lebih dan Obesitas).

Hasil pengukuran tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi E-PPGBM (Elektronik - Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang bertujuan untuk memudahkan kerja Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas dalam menentukan status gizi balita. Informasi status gizi tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan kategori status gizinya sehingga dapat ditentukan intervensi yang akan diberikan oleh tenaga pelaksana gizi (TPG) Puskesmas dalam hal ini status gizi yang di tentukan yaitu stunting (PB/U atau TB/U < -2 SD).

Prevalensi Stunting pada kelompok umur balita tertinggi di kelompok umur 36-47 bulan (28.24%) dan terendah kelompok umur 0-5 bulan (1.57%) di Kabupaten Bangka tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

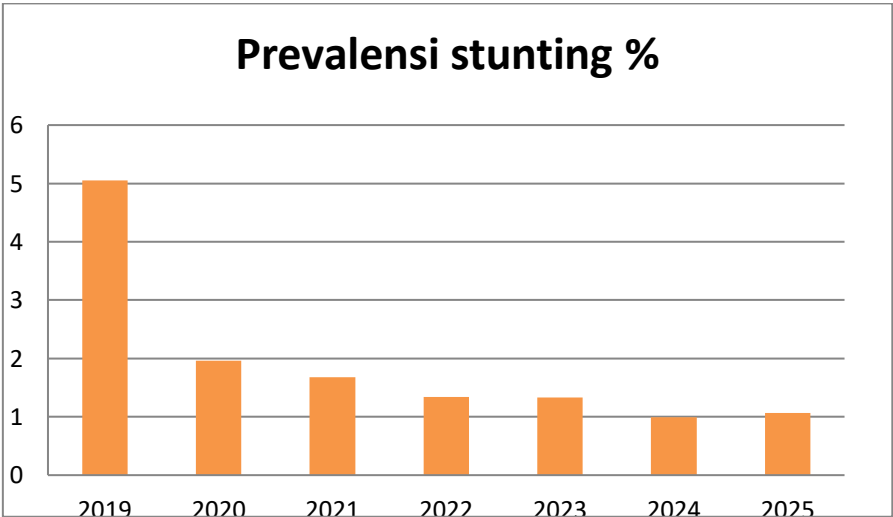
- 0 - 5 bulan : 1,57%
- 6 - 23 bulan : 16,07%
- 24 – 35 bulan : 27,06%

- 36 – 47 bulan : 28,24%
- 48 – 59 bulan :23,53%

Tren Prevalensi stunting balita hasil penimbangan Agustus 2025 berdasarkan laporan penimbangan bulan Agustus tahun 2025 prevalensi stunting pada balita sebesar 1,07% meningkatkan dari prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 0,99%. Kecamatan dengan prevalensi stunting tertinggi adalah kecamatan Mendo Barat yaitu 2,01% meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 1,9%. Kecamatan dengan prevalensi stunting terendah yaitu Kecamatan Puding Besar sebesar 0,43% meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 0,37%. Sedangkan kecamatan dengan prevalensi stunting turn dari tahun 2024 adalah Kecamatan Pemali, Bakam dan Merawang.

Prevalensi stunting balita Kabupaten Bangka dari Tahun 2019 – 2025 berdasarkan data e-PPGM sebagai berikut: tahun 2019 sebesar 5,05%, turun menjadi 1,96% pada tahun 2020, menurun kembali 1,68% pada tahun 2021, dan 1,34% tahun 2022 kemudian turun lagi menjadi 1,33% pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 turun menjadi 0,99%. Pada tahun 2025 angka stunting Kabupaten Bangka mengalami kenaikan menjadi 1,07%. Tren prevalensi stunting di Kabupaten Bangka berdasarkan aplikasi e-PPGBM tahun 2020 - 2025 pada grafik dibawah ini:

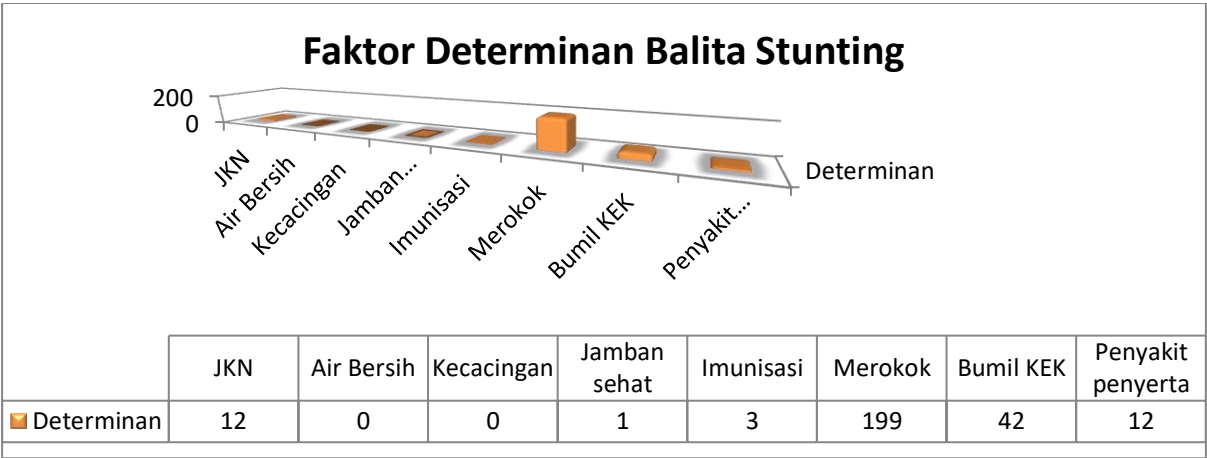
Grafik 2.14.
Tren Prevalensi Stunting di Kabupaten Bangka Tahun 2019-2025



- a) Pada bulan Agustus tahun 2020 jumlah balita stunting sebanyak 551 dari 28.061 balita yang diukur atau sebesar 1.96% dengan persen entry 91,45%.
- b) Sedangkan bulan Agustus 2021, jumlah balita stunting sebanyak 452 balita dari 26.915 balita yang diukur atau sebesar 1.68% dengan persen entry 94.5%
- c) Pada Agustus 2022, jumlah balita stunting sebanyak 329 balita dari 24.553 balita diukur (1.34%) dengan persen entry sebesar 93.2%
- d) Pada Agustus 2023, jumlah balita stunting sebanyak 320 balita dari 24.060 balita diukur (1.33%) dengan persen entry sebesar 91.16%
- e) Pada Agustus 2024, jumlah balita stunting sebanyak 240 balita dari 24.217 balita diukur (0,99%) dengan persen entry sebesar 99.84%
- f) Pada Agustus 2025, jumlah balita stunting sebanyak 255 balita dari 23.812 balita diukur (1,07%) dengan persen entry sebesar 98.18%

Faktor determinan yang memerlukan perhatian pada anak stunting adalah masih tingginya anggota keluarga yang merokok, untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.15.
Rekap Faktor Determinan Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten Bangka Menurut Aplikasi E PPGBM (Agustus 2025)



Dari rekap Riwayat Tindakan pada balita stunting yang dapat dilihat pada e PPGBM terdapat faktor determinan sebagai berikut :

- a) 12 balita tidak memiliki Jaminan Kesehatan
- b) tidak ada balita tidak punya air bersih
- c) tidak ada balita mengalami kecacingan
- d) 1 balita tidak mempunyai jamban sehat
- e) 3 balita belum Imunisasi lengkap
- f) 199 Anggota rumah tangga balita masih merokok
- g) 42 ibu balita sewaktu hamil KEK
- h) 12 balita memiliki riwayat penyakit ketika dilahirkan

Dari semua faktor determinan yang perlu perhatian adalah anggota keluarga yang merokok dan ibu balita sewaktu hamil mengalami kurang energi kronis (KEK). Faktor determinan yang paling tinggi adalah adanya anggota rumah tangga balita merokok pada keluarga balita stunting yaitu sebesar 199. Selain itu faktor determinan yang tertinggi kedua adalah ibu balita sewaktu hamil mengalami kurang energi kronis (KEK) sebesar (42). Masih adanya anggota rumah tangga merokok akan berisiko terhadap tingginya angka penyakit pernafasan pada balita sehingga akan memperberat terjadinya masalah gizi. Tingginya ibu balita sewaktu hamil mengalami kurang energi kronis karena disebabkan asupan nutrisi (kalori dan protein) yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh dalam jangka waktu lama, seringkali dimulai sebelum kehamilan. Faktor penyebab lainnya meliputi usia ibu hamil terlalu muda (<20 tahun) atau terlalu tua (>35 tahun), kehamilan jarak dekat, beban kerja fisik terlalu berat, infeksi, serta tingkat pengetahuan gizi dan ekonomi yang rendah.

Berdasarkan hasil entry data status gizi melalui aplikasi elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e.PPGBM) pada bulan Agustus tahun 2025 yang diunduh pada bulan September 2025 terdapat 2 desa yang masih memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi yaitu Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat.sebesar 6,85% dan Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat.sebesar 5,46%. Secara Umum Kabupaten Bangka termasuk kategori aman berdasarkan standar WHO yaitu prevalensi stunting balita dibawah 20%.

Apabila dibandingkan dengan target kinerja dalam RPD maka dapat dilihat bahwa capaian sasaran untuk indikator angka harapan hidup sudah menunjukkan tren meningkat bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan untuk angka stunting menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya namun untuk tahun 2025 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan setiap tahun terjadi perbaikan yang signifikan terhadap kinerja program kesehatan Pemerintah kabupaten Bangka.

Analisis terhadap penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja dalam keterkaitannya dengan sumber daya dapat dilihat dari kontribusi APBD dalam mendukung capaian kinerja indikator-indikator sasaran.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran adalah:

1. Penanganan daerah rawan pangan terutama daerah yang memiliki angka stunting tinggi yang penanganannya bersifat kolektif dari berbagai kalangan baik dari penyediaan pangan, pengetahuan tentang konsumsi pangan, layanan kesehatan maupun sarana sanitasi sehingga permasalahan stunting dapat dituntaskan dengan baik.
2. Pelaksanaan kegiatan surveilans gizi, pemantauan gizi balitas secara rutin setiap bulan di 237 Posyandu yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Bangka.
3. Tersedianya panti rehabilitasi gizi/Therapeutic Fedding Center di Puskesmas Bakam dan Petaling sebagai sarana pelayanan kesehatan khusus bagi penderita masalah gizi.
4. Pemberian Makanan Tambahan bagi balita gizi kurang dan gizi buruk.
5. Untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu dengan memberikan makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil, penguatan pemberian asi eksklusif untuk bayi pemberian dan pemantauan minum tablet tambah darah kepada remaja putri dan Ibu hamil, meningkatkan komitmen lintas sektor dalam mengupayakan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ketentuan usia perkawinan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), pendampingan oleh dokter spesialis anak untuk puskesmas PONED dan pelatihan asfiksia dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) bagi tenaga kesehatan, meningkatkan Pemenuhan standar sarana dan prasarana kesehatan ibu dan anak dengan pembangunan PONED, Pemenuhan alkes untuk pelayanan kesehatan anak.
6. Pemantauan kenaikan Berat Badan balita gizi buruk secara terus menerus dan pengawasan terhadap penyakit penyerta yang mungkin diderita balita gizi buruk.
7. Kegiatan inovasi seperti posyandu sore dan di hari libur serta rumah timbang balita.
8. Layanan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu yang siap melayani kegawatdaruratan yang terjadi di masyarakat yang terintegrasi dalam sistem aplikasi di android. Masyarakat hanya perlu menginstal aplikasi tersebut ke android, sehingga bila terjadi peristiwa kegawatdaruratan masyarakat hanya perlu mengakses aplikasi tersebut dan bantuan gawat darurat segera datang;
9. Kehamilan yang beresiko tinggi dapat dideteksi sedini mungkin dan dipantau melalui program aplikasi "Si Resti Cikar". Pelaksanaannya di lakukan oleh kader atau masyarakat yang mau dan mampu untuk melakukan pemantauan.
10. Semakin meningkatnya koordinasi antara bidan dan SPOG dalam menangani kehamilan beresiko tinggi;
11. Program Anak Bangka Sehat Cerdas adalah salah satu program pemerintah Kabupaten Bangka yang terpadu / terintegrasi baik secara lintas program maupun lintas sektor dalam penerapannya terjadi di setiap siklus kehidupan secara seimbang dengan menggugah kesadaran tentang hak dan kewajiban seteiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan dan kelembagaan dala memberi / menerima layanan kesehatan untuk menyongsong kehidupan yang berkualitas;
12. Akses ke Puskemas dan fasilitas kesehatan lainnya semakin mudah;
13. Dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Bangka untuk pelayanan kesehatan.
14. Ditetapkannya penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Bangka.
15. Pembinaan Pelayanan kesehatan peduli Remaja (PKPR) dan PKRT (perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) dalam mempersiapkan reproduksinya.

- 16. Pelaksanaan Program pelayanan Kesehatan antara lain: Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Dasar, Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Kegiatan Koordinasi Pelayanan Gizi Masyarakat, Kegiatan Koordinasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 17. Dukungan alokasi dana desa yang diperuntukan mengatasi masalah kesehatan dalam wilayah desa masing-masing.
- 18. Penanganan anak gizi buruk di Puskesmas Rawat inap sudah ada dibentuk Tim Asuhan gizi yang sudah mendapat Pelatihan tata Laksana.
- 19. Upaya Dinas Kesehatan untuk menurunkan AKI di Kabupaten Bangka, Memberikan pelayanan ibu hamil sesuai standar 10 T dan minimal kunjungan 6 kali selama kehamilan Meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan dalam pemantauan kehamilan risiko dan risiko tinggi dengan menerapkan Integrasi layanan primer (ILP) Meningkatkan Pemenuhan standar sarana dan prasarana kesehatan ibu dan anak dengan pembangunan PONED, pengadaan USG 2 dimensi di 12 puskesmas, menyediakan alkes kesehatan ibu anak sesuai standar, Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalau pelatihan PONED, USG bagi dokter puskesmas, Pendampingan dokter Spesialis kebidanan dan spesialis anak ke puskesmas, pemenuhan alkes PONEK di rumah sakit PONEK, Pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk serta pemantapan implementasi inovasi SMS Bunda Cerdas, SI RESTI CIKAR dan SI DORA dan Temenin.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari adanya 5 (Lima) program prioritas pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka terutama pada program-program sebagai berikut:

- 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- 5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Berikut ini merupakan beberapa permasalahan dan Langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan Kualitas kesehatan masyarakat antara lain:

Tabel 2.33.
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
- Penanganan gizi buruk belum optimal terlaksana karena sering terjadinya mutasi dan rotasi petugas puskesmas yang sudah terlatih tatalaksana gizi buruk. dan masih terdapat kasus gizi buruk	- Pemanfaatan Pustu Integrasi Layanan Primer (ILP) untuk siklus kehidupan - Pemanfaatan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) untuk siklus kehidupan - Meningkatkan cakupan kunjungan balita ditimbang dengan melakukan kunjunga rumah balita yang tidak datang ke posyandu, - Melibatkan kader dengan membagi tugas berdasarkan wilayah binaan (binwil). - Melakukan validasi dan konfirmasi balita yang bermasalah gizi dan merujuk ke puskesmas dan Rumah sakit jika ada penyakit penyerta untuk segera diobati. - Memperkuat keterlibatan lintas program dan lintas sektor dalam menerbitkan kartu jaminan kesehatan. - Mengaktifkan kembali TFC (<i>Theraupetic Feeding centre</i>) yaitu di Puskesmas Bakam dan Petaling. - Pemberian PMT pemulihan gizi buruk dan kunjungan rumah sehingga balita gizi buruk dapat segera meningkat status gizinya. - Meningkatkan pelaporan gizi buruk dalam aplikasi sigizi terpadu dimana dalam menu Pelita Kesmas bisa berkerjasama dengan rumah sakit untuk rujukan kasus dan penanganan kasus lebih cepat. - SDM/tenaga medis yang berkompotensi harus tersedia dalam proses mutasi dan rotasi
- Masih Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB)	- Memberikan Tablet Tambah darah pada Remaja Putri - Memberikan pelayanan dan edukasi kesehatan reproduksi pada calon pengantin - Memberikan makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil, - Penguatan pemberian asi eksklusif untuk bayi,

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
	- Pemberian dan pemantauan minum tablet tambah darah kepada remaja putri dan Ibu hamil, - Meningkatkan komitmen lintas sektor dalam Mengupayakan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ketentuan usia perkawinan, - Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan PONED, pendampingan oleh dokter spesialis anak untuk puskesmas PONED dan pelatihan asfiksia dan BBLR bagi tenaga kesehatan, - Meningkatkan Pemenuhan standar sarana dan prasarana kesehatan ibu dan anak dengan pembangunan PONED, - Pemenuhan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak
- Masih Terdapat Angka Kematian Ibu (AKI)	- Memberikan layanan persalinan di semua Puskesmas Kabupaten Bangka buka 24 jam dengan layanan terintegrasi sesuai standar (Puskesmas Mampu Salin 24 Jam) - Memberikan pelayanan ibu hamil sesuai standar 12 T dan minimal kunjungan 6 kali selama kehamilan. - Meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan dalam pemantauan kehamilan resiko dan resiko tinggi dengan menerapkan Integrasi layanan primer (ILP). - Meningkatkan Pemenuhan standar sarana dan prasarana kesehatan ibu dan anak dengan pembangunan PONED. - Menyediakan alkes kesehatan ibu dan anak sesuai standar termasuk USG 2 Dimensi disetiap Puskesmas. - Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan PONED, Pelatihan USG bagi dokter puskesmas. - Pendampingan dokter Spesialis kebidanan. - Pemenuhan alat kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit PONEK. - Pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk
- Masih tingginya angka kesakitan (Morbiditas)	- Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Bangka. - Meningkatkan skrining Kesehatan atau deteksi dini pada usia produktif dan lanjut usia - Meningkatkan program PROLANIS untuk penderita penyakit kronis - Meningkatkan promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)

Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran “Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas” diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.34.
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025

Tahun	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efektivitas (%)	Kriteria
2025	92,10	95,99	104,22	Sangat Efektif

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka 2025 (un audited)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan 2 (dua) indikator utama dapat dicapai sebesar 104,22 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain tercapai dengan sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat” dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

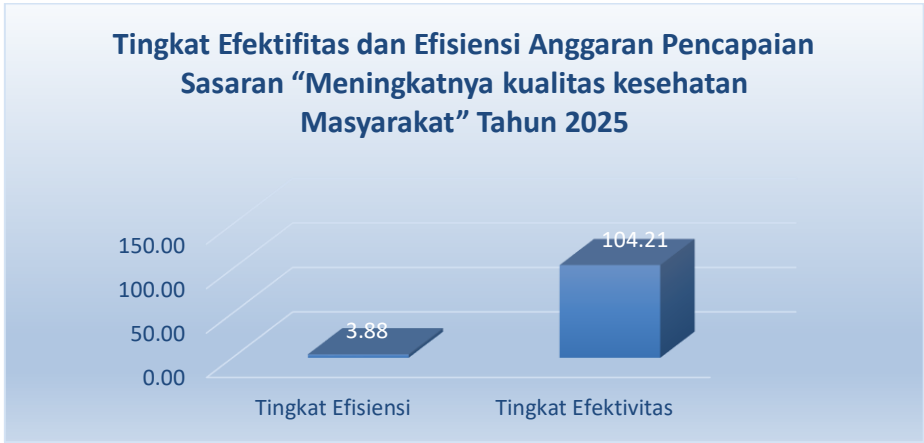
Tabel 2.35
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2025	95,99	101.801.588.463,33	93.756.147.097,46	92,10	3,89

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka 2025 (un audited)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja seluruh program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2025 sebesar Rp.101.801.588.463,33 dengan realisasi belanja mencapai Rp.93.756.147.097,46 atau sebesar 92,10 persen. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 3,89 persen.

Grafik 2.16.
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian
Sasaran “Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat” Tahun 2025



6. Pencapaian Kinerja Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pengendalian pertumbuhan penduduk tidak hanya berorientasi pada penurunan angka kelahiran, tetapi juga pada peningkatan kualitas penduduk melalui perencanaan keluarga yang terarah, peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi, serta penguatan edukasi kependudukan. Salah satu persoalan besar yang dihadapi dunia khususnya pada abad ke dua puluh satu adalah masalah kependudukan.

Jumlah penduduk dunia semakin menunjukan angka yang terus bertambah, dan telah menimbulkan berbagai masalah kesulitan dalam kehidupan. Pembangunan nasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana telah memberikan dampak positif terhadap pemecahan masalah-masalah kependudukan. Masalah kependudukan merupakan masalah jangka panjang sehingga penanggulangannya dilaksanakan secara berkesinambungan. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekeuatankekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. pertumbuhan penduduk di akibatkan oleh empat komponen yaitu: kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), migrasi masuk dan keluar. selisih antara kematian dan kelahiran disebut pertumbuhan alamiah (*natural increase*).



Seiring dengan berkembangnya zaman, di Kabupaten Bangka sendiri pertumbuhan penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menimbulkan masalah sosial yang diakibatkan oleh perkembangan penduduk yang tidak terkontrol, seperti permasalahan laju pertumbuhan penduduk, kebutuhan sandang dan pangan serta meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan tingkat kriminalitas.

Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena negara Indonesia memiliki tingkat kelahiran yang tinggi sehingga terjadilah kepadatan penduduk, kepadatan penduduk tersebut tentu saja menjadi suatu masalah bagi Kabupaten Bangka yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehingga upaya atau program yang dipilih oleh pemerintah untuk mengurangi kepadatan penduduk tersebut melalui program keluarga berencana. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol pertumbuhan penduduk di bidang kesehatan adalah melalui pembangunan keluarga sejahtera yaitu meningkatkan jumlah keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melaksanakan berbagai program pengendalian penduduk secara terpadu, antara lain melalui optimalisasi Program Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat dan metode kontrasepsi, serta penguatan peran penyuluh KB dan kader di tingkat desa/kelurahan. Selain itu, dilakukan pula pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Upaya tersebut menunjukkan hasil yang positif, yang tercermin dari terkendalinya angka kelahiran dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengaturan kelahiran. Kondisi ini turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, pengendalian rasio ketergantungan, serta mendukung keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung wilayah dan kapasitas pelayanan publik di Kabupaten Bangka.

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Uraian indikator kinerja sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangka berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

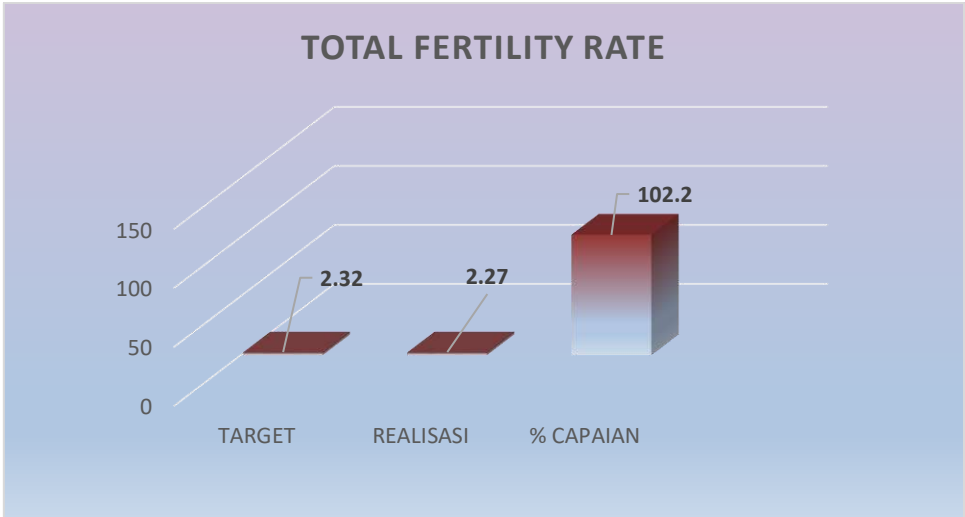
Tabel 2.36.
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025
“Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk”

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Anak	2,32	2,27	102,20	MT
Rata- Rata Capaian					102,20	MT

Sumber: - Pengukuran Angka Kelahiran Total/TFR Tahun 2025, DP2KBP3A Kab. Bangka, 2026
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025

Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator sebagaimana tertera pada tabel di atas diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah 102,20 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian sasaran “terkendalinya laju pertumbuhan penduduk” telah melebihi target.

Grafik 2.17.
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025
“Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk”



Indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran adalah *Total Fertility Rate*. Indikator sasaran *Total Fertility Rate* adalah indikator yang menunjukkan semakin rendah angka realisasi berarti capaian atau keberhasilan sangat baik.

Total Fertility Rate tahun 2025 mencapai angka 2,27. Angka ini sudah melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,32 dengan persentase capaian sebesar 102,20 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.37.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran “Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk” Tahun 2024 dengan Kondisi Tahun Sebelumnya dan Target Akhir RPD 2024-2026

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2025 TERHADAP KONDISI AKHIR RPD
1.	Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i>	Anak	2,34	2,27	2,28	100,44

Sumber: - Pengukuran Angka Kelahiran Total/TFR Tahun 2025, DP2KBP3A Kab. Bangka, 2026
- Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kab. Bangka Tahun 2024-2026
- Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kab. Bangka Tahun 2024
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, sebagai berikut:

1. Sinergitas antar lembaga, pemerintah/pemerintah, masyarakat dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, agar tingkat kelahiran pada wanita usia subur berhasil dengan baik dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam menjadi akseptor Keluarga Berencana.
3. Mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat terhambat.

Beberapa masalah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, antara lain:

Tabel 2.38.
Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
Masih rendahnya Tingkat Pendidikan	- Optimalisasi Program Perburuan Anak-anak putus sekolah ke sekolah kependidikan non formal pendidikan kesetaraan - Memperbanyak Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di setiap desa/ kelurahan - Peningkatan Akses dan pelayanan Pendidikan bagi perempuan salah satunya dengan mencanangkan sekolah perempuan.
Masih rendahnya Pengeluaran per kapita perempuan	- Melakukan pelatihan keterampilan khusus perempuan. - Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga baik melalui usaha ekonomi mikro, maupun dengan cara membuka peluang dan kesempatan kerja khusus perempuan. - Mengoptimalkan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di setiap desa / kelurahan

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari 3 (tiga) program prioritas beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Bangka. Ada pun program prioritas yang yang dimaksud yakni:

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

Selanjutnya, untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.39.
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk)

Tahun	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efektivitas (%)	Kriteria
2025	96,17	102,20	106,27	Sangat Efektif

Sumber: LRA APBD Kab. Bangka Tahun 2025 (unaudited), BPPKAD Kab. Bangka

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran yang diukur berdasarkan 1 (satu) indikator utama dapat dicapai sebesar 102,20 persen, sementara sumber daya anggaran yang digunakan sebesar 96,17 persen, sehingga diperoleh tingkat efektivitas pencapaian sasaran sebesar 106,27 persen dengan kriteria sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran “Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk” dihitung dengan mengurangi persentase capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

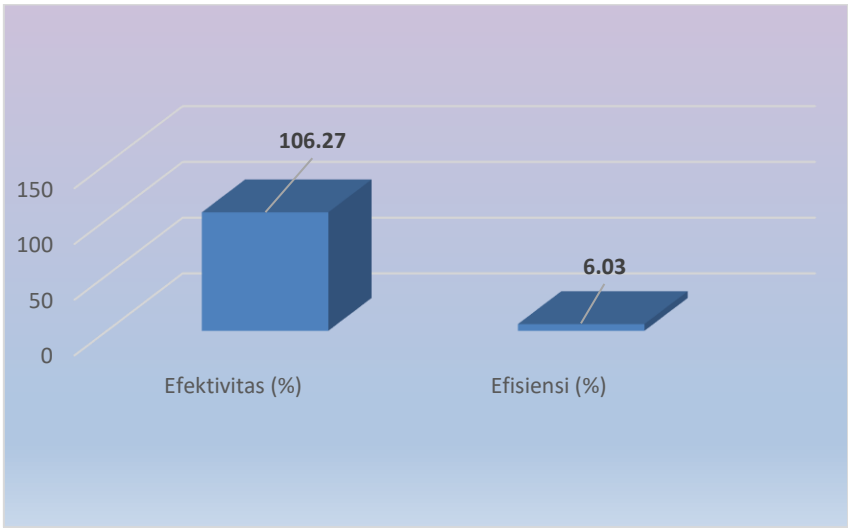
Tabel 2.40.
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk)

Tahun	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2025	102,20	3.871.079.346,00	3.722.677.199,00	96,17	6,03

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target belanja seluruh program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2025 sebesar Rp.3.871.079.346,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp 3.722.677.199,00 atau sebesar 96,17%, sementara capaian kinerja tercapai sebesar 102,20 persen, dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 6,03 persen.

Tingkat efektivitas pelaksanaan program dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2025 sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini

Grafik 2.18.
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025
“Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk”



7. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak

Hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan pada persoalan belum meratanya kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat dalam proses pembangunan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya dalam hal ini negara memberikan jaminan kepada setiap orang baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan dan mendapat layanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan merupakan definisi dari kesetaraan gender.

Konsep kesetaraan gender juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka karena jenis kelamin mereka. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Oleh karena itu perlu adanya pemerataan distribusi sumberdaya yang dibutuhkan oleh masyarakat secara adil. Pembangunan harus mengintervensi kebutuhan sumber daya tersebut sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah dalam pembangunan.

Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda di Kabupaten Bangka berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,11	89,23**	100,13	MT
2.	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Nindya (794)	Nindya (794)	100	T
Rata-rata Capaian					100,07	MT

Catatan: ** Angka proyeksi sementara
Sumber: - Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kab. Bangka, 2026
- Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak Tahun 2024, Kementerian PPPA, 2024
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025

Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator-indikator sebagaimana tertera pada tabel diatas diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah 100,07 persen hal tersebut menunjukkan bahwa sasaran “meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda sudah mencapai target.

Selanjutnya perbandingan antara capaian indikator atas sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda pada tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan dengan target jangka menengah dalam RPD Kabupaten Bangka 2024-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.42
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD
(Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPD	REALISASI TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPD (%)
1.	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	89,07	89,23**	88,43	100,90
2.	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya (794)	Madya (653)	121,59

Sumber: - Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kab. Bangka, 2026
- Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak Tahun 2024, Kementerian PPPA, 2024
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025
- Laporan Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2024

a) Indeks Pembangunan Gender

Gender merupakan suatu konsep yang kompleks mencakup identitas, peran dan ekspresi yang melekat pada individu dalam masyarakat. Perbedaan gender sendiri bukan didasari oleh perbedaan jenis kelamin secara kodrat biologis. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan (TPB). Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDG’S) 2030 dengan menetapkan prinsip *no one left behind*. Hal ini menimbulkan konsekuensi negara harus dapat memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh

kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses, berpartisipasi, ikut dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasinya.

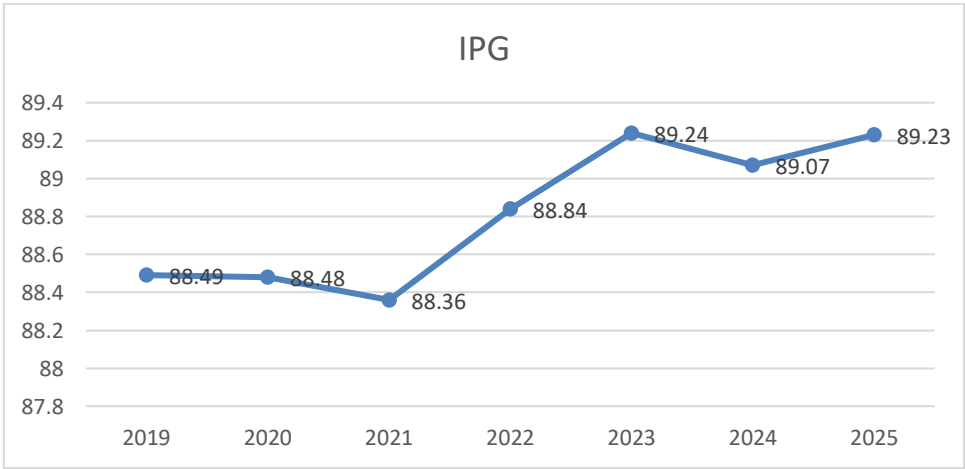
Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Selain sebagai pelaku, perempuan dan laki-laki sekaligus sebagai pemanfaat hasil akhir dari pembangunan. Untuk itu harus dipastikan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki banyak pilihan dalam kehidupannya, menyadari potensi yang ada pada dirinya, dan kebebasan menjalani kehidupan secara terhormat dan berharga. Untuk mencapai prinsip utama tersebut, kesetaraan gender menjadi indikator yang tidak dapat diabaikan karena perempuan dan laki-laki merupakan inti dari pembangunan manusia itu sendiri. Kesamaan kesempatan dan peluang, kesetaraan dalam penghargaan dan penghormatan serta keseimbangan dalam partisipasi dan representasi harus terefleksi pada seluruh aspek pembangunan. Perempuan dan laki-laki sama-sama penting untuk diperhitungkan sehingga sama-sama dapat berperan, terlibat dan berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya.

Kesetaraan gender salah satu faktor yang diperhatikan dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Kesetaraan gender meliputi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Untuk itu, Pengarusutamaan Gender PUG diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang fluktuatif. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkap ketimpangan laki-laki dan perempuan.

Indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender adalah indikator yang menunjukkan semakin tinggi angka realisasi berarti capaian atau keberhasilan sangat baik. Secara detail, rincian perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 2.19
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka Tahun 2019-2025

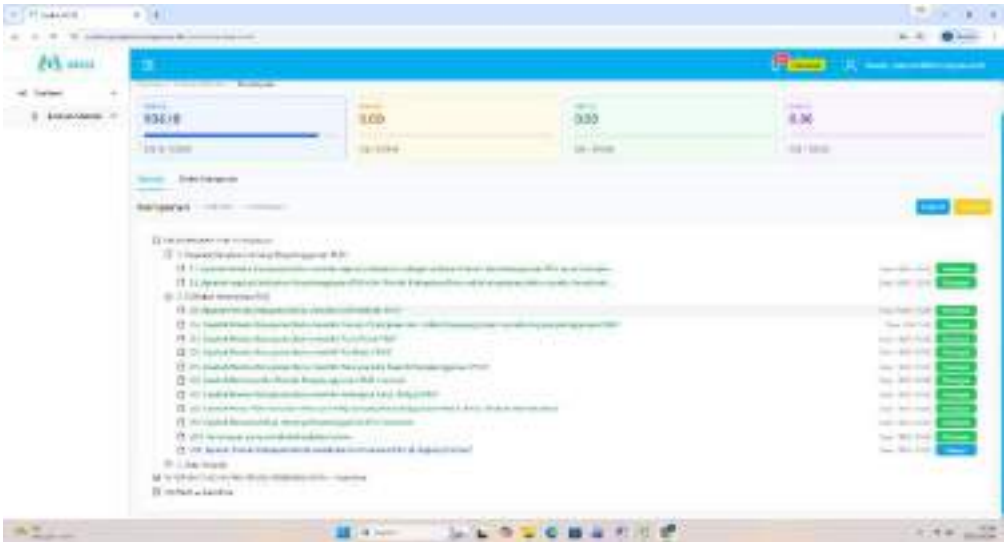


Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik Indonesia merilis indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka sebesar 89,07 mengalami penurunan sebesar 0,17 poin. Untuk tahun 2025, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka sementara sebesar 89,23 mengalami kenaikan sebesar 0,16

poin dibandingkan tahun 2024. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang) perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Pemerintah Kabupaten Bangka memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan berbasis gender. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bangka mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya pada tahun 2023. Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Penilaian untuk pemberian penghargaan ini akan dilakukan kembali pada tahun 2026 untuk penilaian capaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) tahun 2025. Hasil penilaian mandiri kabupaten Bangka untuk tahun 2025 sebesar 936,18 masuk dalam kategori Nindya.

Gambar 2.1
Skor Penilaian Mandiri PPE Kabupaten Bangka Tahun 2025



Sumber : Website evaluasi PUG Kemenpppa 2025



Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target capaian indikator kesetaraan gender semakin baik, sebagai berikut :

1. Pendekatan Kebijakan berbasis Pengasurutamaan Gender. Diterbitkannya Peraturan Daerah terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bangka.
2. Sinergi dan Kolaborasi Antar Stakeholder. Kolaborasi Pentahelix antara pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga ke tingkat desa, masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi dan media massa dalam upaya peningkatan kesetaraan gender, agar pembangunan berbasis gender berhasil dengan baik dan tepat sasaran.

3. Pendekatan pembangunan yang mengakomodir pengarusutamaan gender terutama kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di berbagai lapisan dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan
4. Memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses pembangunan
5. Keaktifan lembaga perlindungan perempuan dan anak, dalam menyajikan data dan melaksanakan tugas menangani dan pendampingan baik secara fisik, psikologi dan hukum dilakukan secara professional dan terpadu.
6. Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, masih rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan menjadi salah satu penghambat. Peningkatan pendidikan melalui program kesetaraan pendidikan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat akan secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan capaian indikator kesetaraan gender.

b) Status Kabupaten Layak Anak

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah system pembangunan yang mengintegrasikan komitmen serta sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak secara berkelanjutan. KLA diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022, dengan focus 5 (lima) klaster hak anak. Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pembangunan kabupaten yang layak anak merupakan salah satu tujuan dari pembangunan di Kabupaten Bangka.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan hal yang penting dilakukan oleh suatu bangsa, karena anak adalah aset pembangunan masa depan dan eksistensi bangsa. Pemenuhan dan perlindungan hak anak meliputi hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B UUD 1945). Untuk itu Pemerintah memiliki kewajiban dalam melindungi dan pemenuhan hak anak dengan pengintegrasian aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak pada setiap pembangunan yang dilakukan. Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 288 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa hak Anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Untuk itu Pemerintah memiliki kewajiban dalam melindungi dan pemenuhan hak anak dengan pengintegrasian aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak pada setiap pembangunan yang dilakukan. Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan terhadap hak anak adalah menyediakan fasilitas, aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (*sustainable development*). Pemenuhan hak anak pun harus dilakukan ada 13 (Tiga belas) hak anak berdasarkan UU Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tidak semua anak beruntung mendapatkan perlindungan haknya, sebagian anak mendapat diskriminasi, kekerasan dan kesalahan pola asuh, dan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua. Implikasi dari persoalan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyelenggarakan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak sejak tahun 2018. Penghargaan ini bertujuan agar pemerintah daerah setempat dapat mendorong keluarga-keluarga, Masyarakat, Media di wilayahnya untuk semakin paham pada upaya pemenuhan hak anak. Pemerintah daerah juga didorong melakukan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin agar hak-hak anak dapat dipenuhi, sebagaimana amanat konstitusi.

Pemerintah Kabupaten Bangka, sudah mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk melindungi dan memenuhi hak anak dalam dokumen pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikator capaian kinerja Kabupaten/Kota layak Anak. Dokumen ini juga menunjukkan seberapa besar dukungan sumber daya manusia, keuangan sarana, prasarana dan metode yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menciptakan Kabupaten/kota yang dapat memenuhi hak-hak anak. Sejak dicanangkannya pelaksanaan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Bangka sudah mengikuti penghargaan. Kabupaten Bangka, sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk mengimplemetasikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pemerintah Kabupaten dalam upaya mewujudkan KLA, dengan menggunakan pendekatan *Holistic, Integrative, Tematic*, dan *Spasial* dengan melibatkan Pemerintah, Masyarakat/Komunitas, Swasta, Akademisi, dan Media (Pentahelix), untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah KLA.

Status Kabupaten Layak Anak terbagi atas 5 kategori yaitu; Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA. Status Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bangka tahun 2025 mencapai status Nindya. Status ini sudah mencapai target tahun 2025 yang dibuat yaitu status Nindya. Demikian juga target akhir RPD adalah status Madya, sehingga capaian terhadap target RPD sudah mencapai 100 persen. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.





Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target capaian indikator kabupaten layak anak adalah:

1. Komitmen Politik dan Kebijakan : adanya Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA serta adanya komitmen yang tinggi dari kepala daerah.
2. Penguatan Kelembagaan : Adanya Gugus Tugas KLA yang aktif, adanya sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan Pengarusutamaan hak anak dalam perencanaan dan penganggaran.
3. Sinergi Lintas Sektor : Adanya Kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media perlindungan anak.
4. Partisipasi Anak : Adanya pelibatan Forum Anak dalam Perencanaan Pembangunan
5. Data terpilah dan infrastruktur : tersedianya data anak terpilah dan tersedianya insfrastruktur ramah anak.
6. Implementasi berjenjang : penerapan indicator KLA hingga tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Tabel 2.43.
Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
1. Peningkatan Kesetaraan Gender	
- Angka Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan masih rendah di banding laki-laki dan masih di bawah angka nasional	- Optimalisasi Program Perburuan Anak-anak putus sekolah ke sekolah kependidikan non formal pendidikan kesetaraan - Memperbanyak Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di setiap desa/ kelurahan - Peningkatan Akses dan pelayanan Pendidikan bagi perempuan salah satunya dengan mencanangkan sekolah perempuan.
- Pengeluaran per kapita perempuan masih rendah dibanding laki-laki dan masih di bawah angka nasional	- Melakukan pelatihan keterampilan khusus perempuan. - Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga baik melalui usaha ekonomi mikro, maupun dengan cara membuka peluang dan kesempatan kerja khusus perempuan. - Mengoptimalkan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)di setiap desa / kelurahan
- Masih rendahnya fasilitas umum, yang berbasis gender	- Menyediakan fasilitas umum dengan sarana yang responsive gender
- Masih rendahnya partisipasi Lembaga Masyarakat dalam pelaksanaan PUG	- Mengoptimalkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
2. Kualitas Anak	
- Persentase Nilai Aspek Kelembagaan belum optimal	- Menyediakan data profil anak mulai dari tingkat desa - Mengoptimalkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam pemenuhan hak anak
- Persentase pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan belum optimal	- Penyediaan SDM penyelenggara registrasi kelahiran yang telah mendapatkan pelatihan KHA; - Meningkatkan peranan forum anak dalam percepatan kepemilikan kutipan akte kelahiran; - Meningkatkan sinergitas Lembaga Masyarakat, dan Dunia Usaha; - Menetapkan peraturan/kebijakan tentang fasilitas (Informasi Layak Anak); - Penyediaan SDM penyelenggara ILA yang dilatih KHA; - Pengoptimalan partisipasi anak untuk dapat berpendapat dan menyampaikan pandangan- pandangan mereka terutama yang menyangkut keberadaan dan kepentingan anak atas pelaksanaan pembangunan daerah

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
	- Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
- Belum optimalnya pemenuhan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	- Optimalisasi pencegahan perkawinan anak. - penguatan program PUSPAGA; - Optimalisasi SDM pada pusat layanan yang dilatih KHA. - Memastikan terselenggarakannya pengasuhan alternatif terhadap anak-anak yang benar-benar tidak memiliki orang tua atau kerabat terdekat.
- Belum optimalnya pemenuhan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	- Optimalisasi Sekolah Ramah Anak yang terstandarisasi - Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah. - Optimalisasi Pusat Kreativitas Anak yang dapat digunakan sebagai wadah anak berkumpul dan melakukan kreatifitas.
- Pembentukan Kecamatan Layak Anak dan Desa / Kelurahan Layak Anak yang belum menyeluruh	Penetapan Perdes Desa Layak Anak Peningkatan pembentukan Forum Anak di setiap kecamatan dan Desa serta kelurahan. Sosialisasi dan edukasi terkait peran dan fungsi forum anak dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, didukung oleh pelaksanaan oleh 4 (empat) Program, yaitu:

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Program Perlindungan Perempuan;
- c. Program Perlindungan Khusus Anak;
- d. Program Pemenuhan Hak Anak.

Efektifitas program-program yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda diukur dengan membandingkan capaian realisasi keuangan atas Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran terhadap capaian kinerja sasaran. Pada tahun 2025, realisasi keuangan atas program-program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda mencapai 59,27 persen dan mampu merealisasikan capaian kinerja sasaran sebesar 100,07 persen sehingga tingkat efektivitas program tersebut dalam mencapai sasaran mencapai 168,83 persen atau sangat efektif. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.44.
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda)

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2025	59,27	100,07	168,83	Sangat Efektif

Sumber: LRA APBD Kab. Bangka Tahun 2025 (unaudited)

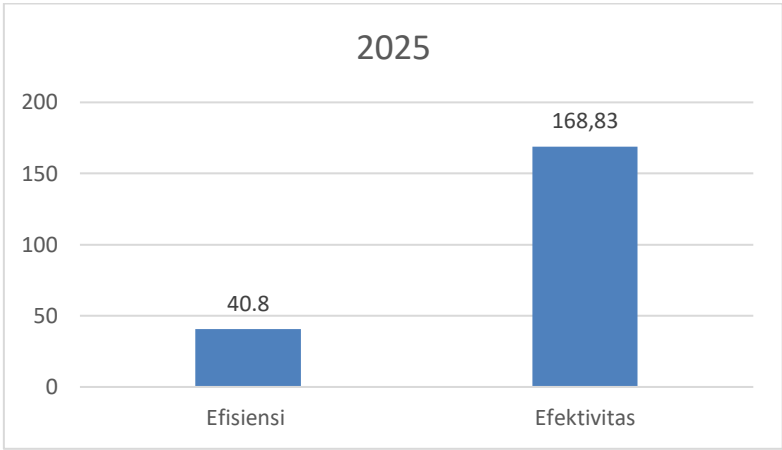
Sementara itu, ditinjau dari segi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, terlihat bahwa tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda mencapai 40,80 persen. Efisiensi ini diperoleh dengan mengurangi realisasi capaian kinerja (100,07 persen) terhadap realisasi anggaran program (59,27 persen) sebagaimana tertera pada Tabel berikut:

Tabel 2.45.
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda)

TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2025	523.577.646	310.313.807	59,27	100,07	40,80

Sumber: LRA APBD Kab. Bangka Tahun 2025 (unaudited)

Grafik 2.20.
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda)



8. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur

Teori pembangunan regional menempatkan infrastruktur sebagai faktor determinan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam perspektif ekonomi spasial, sebagaimana dijelaskan oleh Paul Krugman melalui teori *New Economic Geography*, aglomerasi ekonomi cenderung terjadi di wilayah dengan aksesibilitas dan infrastruktur yang lebih baik. Ketimpangan akses infrastruktur pada akhirnya memperkuat konsentrasi pertumbuhan di pusat-pusat tertentu dan meninggalkan wilayah periferi dalam kondisi tertinggal.

Di sisi lain, pendekatan *cumulative causation* dari Gunnar Myrdal menegaskan bahwa ketimpangan regional dapat bersifat memperkuat diri (*self-reinforcing*) apabila tidak diintervensi melalui kebijakan redistributif, termasuk pembangunan infrastruktur yang merata. Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur menjadi instrumen strategis untuk mengoreksi ketidakseimbangan struktural antarwilayah. Dalam praktik kebijakan publik, permasalahan utama bukan hanya pada besaran investasi infrastruktur, tetapi pada distribusinya. Oleh sebab itu, diperlukan alat ukur kinerja yang mampu menangkap dimensi distribusi sekaligus dampaknya terhadap ketimpangan ekonomi.

Infrastruktur berfungsi sebagai social overhead capital yang meningkatkan produktivitas faktor produksi. Investasi pada jaringan transportasi, energi, air bersih, telekomunikasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan memiliki efek multiplikatif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, apabila pembangunan terkonsentrasi pada wilayah tertentu, maka terjadi disparitas akses yang memperbesar kesenjangan PDRB per kapita antarwilayah. Dalam konteks ini, pemerataan infrastruktur bukan sekadar isu teknis, melainkan strategi pembangunan inklusif untuk memastikan *spatial equity*.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka 2024-2026 mencantumkan infrastruktur menjadi salah satu tujuan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah *concern* terhadap pembangunan infrastruktur baik yang bersifat sosial maupun ekonomi. Kemudian dari tujuan tersebut di terjemahkan ke dalam sasaran pembangunan yakni fokus pada akses (pemerataan) dan kesenjangan pembangunan ekonomi wilayah. Sehingga tidak hanya merata akan tetapi pembangunan juga memiliki dampak terhadap kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Dalam konteks pembangunan daerah seperti di Kabupaten Bangka, pemerataan infrastruktur menjadi krusial karena struktur wilayah yang heterogen—baik dari sisi kepadatan penduduk, aksesibilitas, maupun basis ekonomi. Ketimpangan akses layanan dasar akan berdampak langsung pada produktivitas, biaya logistik, kualitas SDM, serta daya saing wilayah. Untuk memastikan bahwa agenda pemerataan tidak berhenti pada tataran normatif, diperlukan alat ukur kinerja yang objektif dan terukur. Dua instrumen yang relevan digunakan adalah Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPI) dan Indeks Williamson dalam rangka mengukur ketercapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan

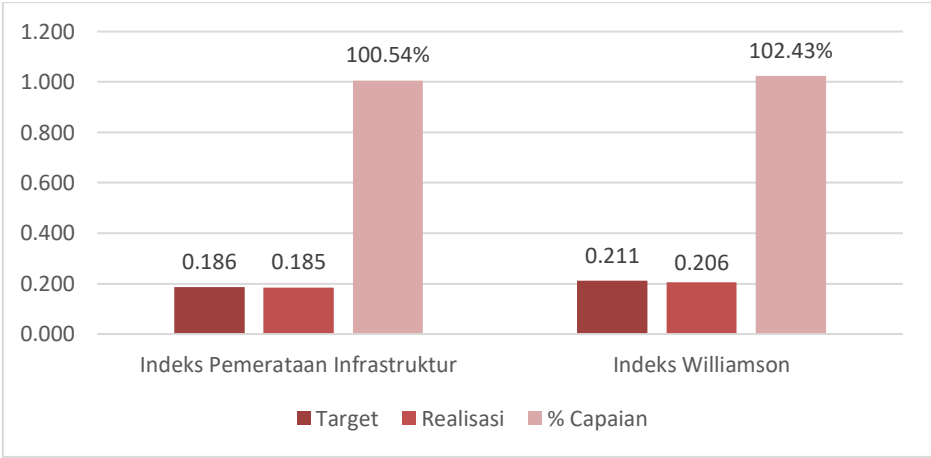
Pemerataan Infrastruktur. Untuk lebih jelasnya Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya pada tahun 2025 dijelaskan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 2.46.
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Nilai	0,186	0,185	100,54	MT
2	Indeks Williamson	Nilai	0,211	0,206	102,43	MT
Rata- Rata Capaian					101,48	MT

Sumber: - Hasil Pengolahan Data Infrastruktur, Bappeda Kab. Bangka, 2026
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025

Grafik 2.21
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025
“Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur”



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, capaian kinerja atas sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur” pada Tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu Indeks Pemerataan Infrastruktur dan Indeks Williamson.

Indikator pertama, Indeks Pemerataan Infrastruktur, ditargetkan sebesar 0,186 dengan realisasi sebesar 0,185. Meskipun secara absolut realisasi sedikit lebih rendah dibandingkan target numerik, persentase capaian tercatat sebesar 100,54 persen. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut menggunakan pendekatan perhitungan berbasis deviasi atau karakteristik indeks tertentu (semakin kecil semakin baik atau berbasis rasio target), sehingga secara substansial telah melampaui standar kinerja yang ditetapkan. Dengan capaian tersebut, indikator ini masuk dalam kategori MT (Melampaui Target).

Indikator kedua, Indeks Williamson, ditargetkan sebesar 0,211 dengan realisasi sebesar 0,206. Karena Indeks Williamson mengukur tingkat ketimpangan antarwilayah (semakin kecil nilainya menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah), maka realisasi yang lebih rendah dari target mencerminkan kinerja yang lebih baik dari yang direncanakan. Persentase capaian sebesar 102,43 persen menegaskan bahwa upaya penurunan disparitas ekonomi antarwilayah berhasil dicapai secara optimal. Indikator ini juga dikategorikan MT (Melampaui Target).

Secara agregat, rata-rata capaian kedua indikator mencapai 101,48 persen dengan kategori MT (Melampau Target). Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur tidak hanya berhasil meningkatkan kualitas fisik layanan dasar, tetapi juga berdampak pada perbaikan distribusi pembangunan antarwilayah.

Dari perspektif evaluasi kinerja pembangunan, capaian ini memiliki beberapa implikasi penting:

- Efektivitas kebijakan pemerataan — Penurunan nilai Indeks Williamson menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki korelasi positif terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi antarwilayah.
- Konsistensi antara proses dan outcome — Indeks Pemerataan Infrastruktur merepresentasikan distribusi penyediaan sarana-prasarana (process indicator), sedangkan Indeks Williamson merefleksikan dampaknya terhadap kesenjangan ekonomi (outcome indicator). Keberhasilan pada keduanya menunjukkan kesinambungan antara input kebijakan dan hasil pembangunan.
- Penguatan pendekatan kewilayahan — Capaian di atas target mengindikasikan bahwa strategi pembangunan berbasis spasial telah berjalan efektif dalam mendorong akses infrastruktur yang lebih merata.

Dengan demikian, secara keseluruhan sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur” pada Tahun 2025 dapat dinilai berhasil dicapai dengan kinerja yang melampaui ekspektasi. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi tren positif ini melalui penguatan kualitas belanja modal, peningkatan integrasi sektoral, serta pengendalian ketimpangan agar tetap berada pada jalur penurunan yang berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 2.47
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD
(Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2025 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Nilai	0,187	0,185	0,185	100,00
2	Indeks Williamson	Nilai	0,219	0,206	0,173	83,98

Sumber: - Hasil Pengolahan Data Infrastruktur, Bappeda Kab. Bangka, 2026
- Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kab. Bangka Tahun 2024-2026

Grafik 2.22
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
Terhadap Target Akhir RPD



Berdasarkan Tabel dan grafik diatas, evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur” dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu Indeks Pemerataan Infrastruktur dan Indeks Williamson, dengan membandingkan realisasi Tahun 2025 terhadap realisasi Tahun 2024 serta terhadap target jangka menengah (akhir RPD).

a) Indeks Pemerataan Infrastruktur

Realisasi Indeks Pemerataan Infrastruktur pada Tahun 2024 tercatat sebesar 0,187, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 0,185. Mengingat karakteristik indeks ini yang menunjukkan kondisi semakin baik ketika nilainya semakin mendekati atau lebih rendah sesuai desain target distribusi, maka penurunan angka tersebut mencerminkan peningkatan tingkat pemerataan infrastruktur antarwilayah. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (RPD) sebesar 0,185, realisasi Tahun 2025 telah mencapai 100,00 persen. Artinya, target akhir periode perencanaan telah tercapai bahkan melampaui apa yang direncanakan. Hal ini menunjukkan konsistensi kebijakan dalam menjaga distribusi pembangunan infrastruktur agar tetap proporsional antarwilayah.

Secara substantif, capaian ini mengindikasikan bahwa intervensi pembangunan infrastruktur tidak hanya bersifat ekspansif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan spasial.

b) Indeks Williamson

Indeks Williamson pada Tahun 2024 tercatat sebesar 0,219 dan mengalami penurunan signifikan pada Tahun 2025 menjadi 0,206. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah, karena semakin rendah nilai indeks ini maka semakin kecil disparitas pendapatan regional. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 0,173, capaian Tahun 2025 baru mencapai 83,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tren perbaikan sudah berada pada jalur yang tepat (*trend improvement*), tingkat ketimpangan yang ditargetkan pada akhir periode perencanaan belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Struktur ekonomi yang masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu,
- Perbedaan kapasitas fiskal antarwilayah,
- Ketimpangan basis sektor unggulan yang belum sepenuhnya terdiversifikasi.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan dua temuan penting:

- Dimensi distribusi infrastruktur (process indicator) telah mencapai target akhir periode, tercermin dari Indeks Pemerataan Infrastruktur yang mencapai 100 persen.
- Dimensi outcome ekonomi (outcome indicator) menunjukkan perbaikan signifikan, namun belum sepenuhnya mencapai target RPD, tercermin dari capaian Indeks Williamson sebesar 83,98 persen.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerataan infrastruktur telah berjalan efektif dalam aspek distribusi fisik, namun dampaknya terhadap konvergensi ekonomi antarwilayah masih memerlukan waktu dan penguatan kebijakan komplementer, seperti:

- Pengembangan kawasan berbasis potensi lokal,
- Penguatan konektivitas ekonomi antarwilayah,
- Intervensi pada sektor produktif bernilai tambah tinggi.

Dengan demikian, kinerja Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dan konsisten dalam meningkatkan kualitas serta pemerataan infrastruktur. Target distribusi infrastruktur telah tercapai sepenuhnya, sementara penurunan ketimpangan ekonomi menunjukkan progres yang signifikan meskipun belum mencapai sasaran akhir RPD. Ke depan, strategi pembangunan perlu difokuskan pada akselerasi dampak ekonomi dari infrastruktur yang telah dibangun agar penurunan Indeks Williamson dapat lebih cepat mendekati target jangka menengah.

Analisis terhadap penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja indeks pemerataan infrastruktur dan indeks williamson dalam keterkaitannya dengan sumber daya dapat dilihat dari besaran kontribusi APBD dalam mendukung pencapaian target kinerja yaitu melalui anggaran APBD

pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terutama terkait penganggaran program dan kegiatan;
2. Dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama terkait penyediaan lahan;
3. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan oleh perangkat daerah terkait bersama tim pengadaan barang dan jasa/Unit Layanan Pengadaan agar pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
4. Sinergitas prioritas, strategi, dan arah kebijakan yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan prioritas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan swasta dalam pendanaan mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur didukung oleh pelaksanaan program-program berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
4. Program Penataan Bangunan Gedung;
5. Program Penyelenggaraan Jalan;
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
7. Program Pengembangan Perumahan;
8. Program Kawasan Permukiman;
9. Program Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
12. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
13. Program Penataagunaan Tanah.

Berikut ini diuraikan beberapa permasalahan dan langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur antara lain:

Tabel 2.48.
Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Temuan masalah yang terjadi ialah mengindikasikan bahwa kebijakan pemerataan infrastruktur telah berjalan efektif dalam aspek distribusi fisik, namun dampaknya terhadap konvergensi ekonomi antarwilayah masih memerlukan waktu dan penguatan kebijakan terlihat dari Capaian Indeks Wiliamson terhadap target Akhir RPD masih diangka 80 an persen	- Memetakan Kegiatan pembangunan infrastruktur yang memiliki daya ungkit ekonomi yang baik dari sekian kegiatan yang sebelum <i>refocusing</i> telah ditetapkan - Memetakan Variabel Infrastruktur mana yang memiliki kelemahan dalam kualitas - Anggaran difokuskan untuk kegiatan yang mendongkrak nilai kualitas infrastruktur seperti pengadaan pasar rakyat, pusat perdagangan, pusat pertumbuhan ekonomi baru, akses menuju sentra ekonomi - Pengembangan kawasan berbasis potensi lokal, - Penguatan konektivitas ekonomi antarwilayah, - Intervensi pada sektor produktif bernilai tambah tinggi

Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.49.
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2025	96,98	101,48	104,64	Sangat Efektif

Sumber: LRA APBD Kab. Bangka Tahun 2025 (unaudited), BPPKAD Kab. Bangka, 2026

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan 2 (dua) indikator utama dapat dicapai sebesar 101,48 persen dengan realisasi keuangan sasaran sebesar 96,98 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran sebesar 104,64 persen dengan kriteria keberhasilan sangat efektif. Namun walaupun sangat efektif dalam pencapaian sasaran tahunan anggaran kedepannya haruh lebih difokuskan kepada bagaimana infrastruktur dapat menekan kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.50.
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)

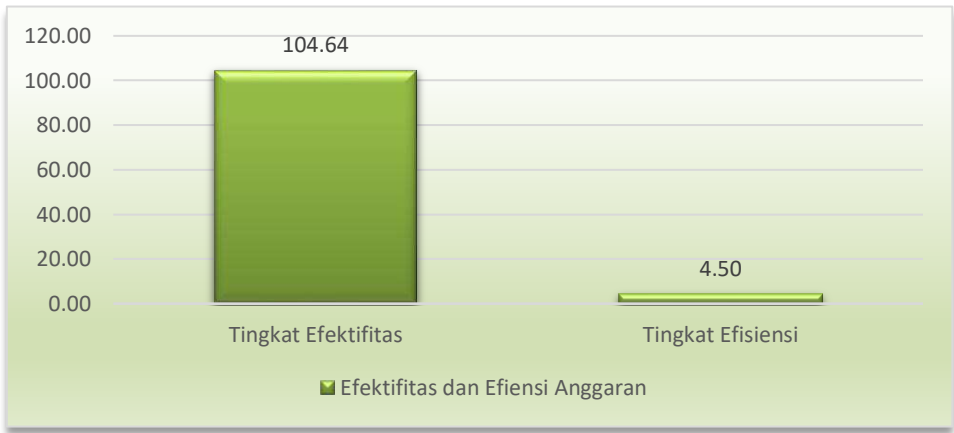
TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2025	32.333.916.904,00	31.357.857.412,00	96,98	101,48	4,50

Sumber: LRA APBD Kab. Bangka Tahun 2024 (unaudited), BPPKAD Kab. Bangka, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2025 sebesar Rp.32.333.916.904,- dengan realisasi belanja mencapai Rp. 31.357.857.412,- atau sebesar 96,98 persen, dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 4,50 persen.

Tingkat efektivitas pelaksanaan program dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur pada tahun 2025 sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.23.
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur)



9. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa

Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu indikator utama dalam menilai suatu negara yang berkembang. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bangka diukur dari pencapaian indikator Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita dan Konsumsi Per Kapita. Pertumbuhan ekonomi

merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah dan standar pertumbuhan kemakmuran sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi sekaligus pembandingan tingkat kemakmuran.

Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa pada tahun 2025 diukur dengan beberapa indikator seperti indikator Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita dan Konsumsi Per Kapita berdasarkan Harga Berlaku sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.51.
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa)

NO.	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	3,79	4,96	130,87	MT
2	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	13.308	13.411	100,77	MT
3	Konsumsi Per Kapita (Harga Berlaku)	Ribu Rupiah	21.314	21.896	102,73	MT
Rataan					111,46	MT

Sumber: - Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kab. Bangka, 2026
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas, secara umum kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Rata-rata capaian indikator mencapai 111,46 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh indikator berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Indikator Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 3,79 persen dan terealisasi sebesar 4,96 persen atau mencapai 130,87 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi daerah berada pada level yang melebihi yang telah direncanakan. Hal ini mencerminkan stabilitas aktivitas ekonomi serta ketepatan dalam perencanaan. Capaian yang melebihi target juga menunjukkan bahwa akselerasi pertumbuhan sudah melampaui proyeksi yang telah ditetapkan.

Indikator Pengeluaran Per Kapita mengalami peningkatan kinerja dari target sebesar Rp. 13.308 ribu, terealisasi sebesar Rp. 13.411 ribu atau mencapai 97,79 persen. Capaian ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat serta baiknya aktivitas ekonomi rumah tangga. Kenaikan ini dapat menjadi sinyal positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun tetap perlu dicermati pengaruh inflasi terhadap kenaikan nilai nominal tersebut.

Indikator Konsumsi Per Kapita (Harga Berlaku) juga mencatatkan capaian di atas target. Dari target Rp. 21.314 ribu, realisasi mencapai Rp. 21.896 ribu atau sebesar 102,73 persen. Peningkatan konsumsi ini menunjukkan bahwa permintaan domestik cukup kuat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun karena menggunakan harga berlaku, maka analisis lebih lanjut terhadap konsumsi riil diperlukan untuk memastikan bahwa peningkatan tersebut tidak semata-mata dipengaruhi oleh kenaikan harga.

Secara keseluruhan, capaian ketiga indikator tersebut menggambarkan bahwa produksi barang dan jasa di daerah mengalami peningkatan yang selaras dengan pertumbuhan daya beli dan konsumsi masyarakat. Kinerja yang seluruhnya berada pada kategori Memenuhi Target menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan tahun 2025. Ke depan, diperlukan upaya untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, menjaga stabilitas harga, serta memastikan peningkatan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Selanjutnya perbandingan antara capaian indikator atas sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa pada tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan dengan target jangka menengah dalam RPD Kabupaten Bangka 2024-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD
(Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPD	REALISASI TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPD (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	-0,44	4,96	4,33	114,55
2.	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	13.205	13.411	12.958	103,50
3.	Konsumsi Per Kapita (Harga Berlaku)	Ribu Rupiah	20.034	21.896	21.724	100,79

Sumber: - Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2026, BPS Kab. Bangka, 2026
- Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kab. Bangka Tahun 2024-2026
- Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kab. Bangka Tahun 2024

Analisis lebih lanjut terhadap pencapaian masing-masing indikator dijelaskan di bawah ini.

a) **Pertumbuhan Ekonomi**

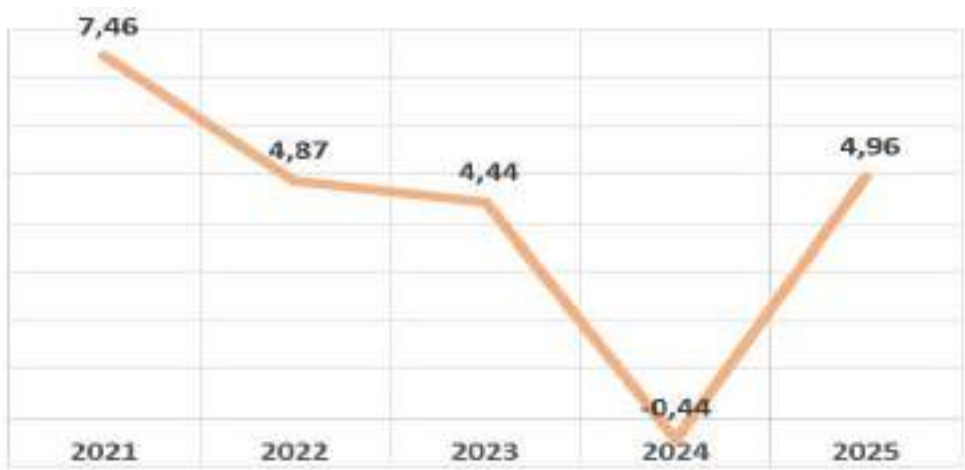
Pertumbuhan Ekonomi adalah persentase perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini menggambarkan tingkat ekspansi atau kontraksi aktivitas ekonomi suatu negara atau daerah tanpa dipengaruhi oleh inflasi.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam perekonomian, yang sering digunakan untuk menilai kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara makro.

Pertumbuhan ekonomi yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan rilis BPS Kabupaten Bangka Tahun 2026 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka sebesar 4,96 persen. Pertumbuhan ekonomi yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 2.24.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka (persen), 2020–2025



Sumber: Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2026, BPS Kab. Bangka, 2026

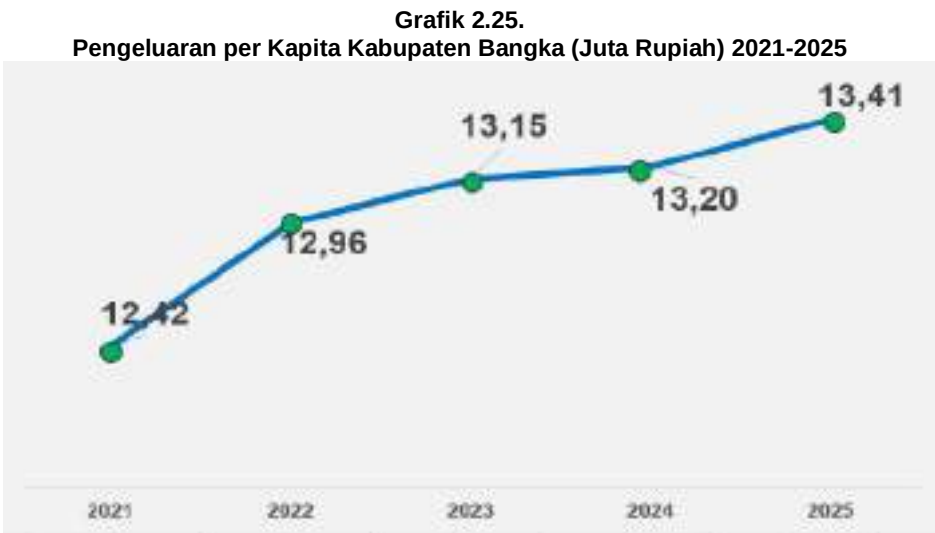
Berdasarkan Grafik diatas Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2020–2025, mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 7,46 persen, yang menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup tinggi. Namun pada tahun 2022, laju pertumbuhan mengalami perlambatan menjadi 4,87 persen. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 4,44 persen, yang mengindikasikan adanya tekanan terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Penurunan yang paling tajam terjadi pada tahun 2024, di mana pertumbuhan ekonomi berkontraksi hingga -0,44 persen. Kondisi ini menunjukkan terjadinya perlambatan ekonomi yang cukup dalam, yang dapat disebabkan oleh melemahnya sektor unggulan, penurunan produksi, atau faktor eksternal seperti kondisi pasar dan harga komoditas. Pada tahun 2025, perekonomian Kabupaten Bangka kembali menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 4,96 persen. Meskipun belum kembali pada level pertumbuhan tahun 2021, capaian ini menandakan adanya rebound ekonomi setelah kontraksi pada tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, grafik tersebut menggambarkan pola pertumbuhan yang menurun dari 2021 hingga 2024, kemudian mulai pulih pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas dan penguatan struktur ekonomi daerah masih perlu terus didorong agar pertumbuhan dapat kembali ke tren yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

b) Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan oleh setiap individu dalam suatu populasi untuk konsumsi barang dan jasa dalam periode waktu tertentu. Pengeluaran ini mencakup berbagai kebutuhan, seperti makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan rekreasi. Pengeluaran konsumsi perkapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan yang dibelanjakan/ pengeluaran untuk kebutuhannya, maka rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Bangka cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan Grafik diatas Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Tahun 2021–2025, terlihat bahwa pengeluaran per kapita masyarakat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita tercatat sebesar 12,42 juta rupiah. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 12,96 juta rupiah, yang menunjukkan adanya perbaikan daya beli dan peningkatan aktivitas ekonomi rumah tangga.

Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita kembali mengalami kenaikan menjadi 13,15 juta rupiah. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2024 menjadi 13,20 juta rupiah, meskipun dengan pertumbuhan yang relatif lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya stabilisasi pertumbuhan konsumsi masyarakat. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2025, di mana pengeluaran per kapita mencapai 13,41 juta rupiah. Kenaikan ini menunjukkan penguatan daya beli masyarakat serta membaiknya kondisi ekonomi daerah secara umum.

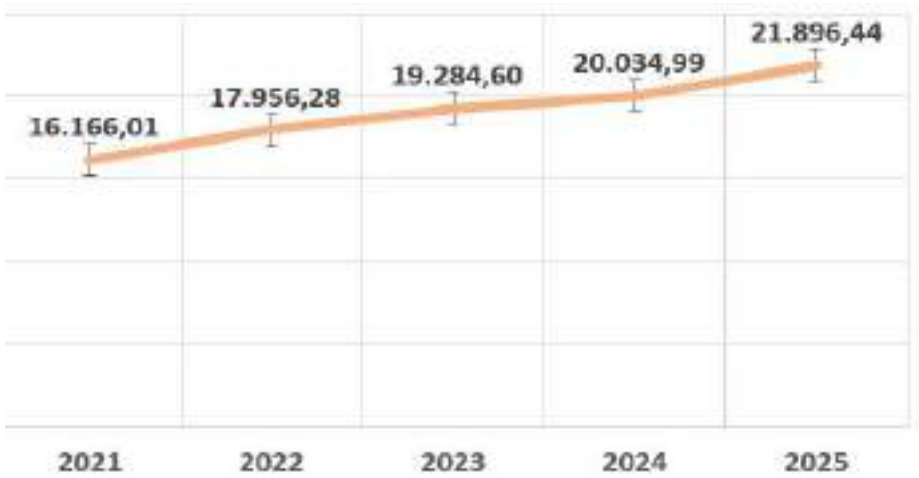
Secara keseluruhan, tren peningkatan pengeluaran per kapita selama periode 2021–2025 mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Namun demikian, perlu dianalisis lebih lanjut apakah kenaikan tersebut merupakan peningkatan riil atau turut dipengaruhi oleh faktor inflasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka.

c) **Konsumsi Per Kapita**

Konsumsi per kapita adalah rata-rata jumlah pengeluaran atau konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh setiap individu dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan pola konsumsi rumah tangga.

Grafik 2.26
Konsumsi Per Kapita (Harga Berlaku) Kabupaten Bangka 2021-2025
(Juta Rupiah)



Sumber: Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2026

Menurut tabel diatas Konsumsi Per Kapita (Harga Berlaku) Kabupaten Bangka adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun selama periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 nilai tercatat sebesar 16.166,01, kemudian meningkat menjadi 17.956,28 pada tahun 2022 atau tumbuh sekitar 11,07% dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 nilai kembali meningkat menjadi 19.284,60, dengan pertumbuhan sekitar 7,40%. Kenaikan masih berlanjut pada tahun 2024 menjadi 20.034,99, meskipun laju pertumbuhannya melambat menjadi sekitar 3,89%, yang mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan dibanding dua tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2025 terjadi akselerasi kembali dengan nilai mencapai 21.896,44, atau tumbuh sekitar 9,29% dibanding tahun 2024.

Secara keseluruhan, selama periode 2021–2025 terjadi peningkatan kumulatif sekitar 35,46%, yang menunjukkan performa pertumbuhan yang cukup kuat dalam jangka menengah. Pola ini menggambarkan bahwa meskipun sempat mengalami perlambatan pada 2024, tren umum tetap menunjukkan arah peningkatan yang positif dan stabil.

Selanjutnya dijelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi terkait pencapaian sasaran “Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa” dan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain:

Tabel 2.53
Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatkan Produksi Barang dan Jasa

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Penurunan produktivitas beberapa komoditas pada sektor pertanian, perkebunan terutama karet, lada dan tanaman hortikultura.	- Intensifikasi, ekstensifikasi dan penguatan teknologi budidaya untuk komoditas strategis daerah (lada, karet, dan tanaman hortikultura).
Penurunan harga beberapa komoditas pertanian khususnya sub sektor perkebunan yang mengikuti harga dunia (lada, karet).	- Memperbaiki tata niaga pertanian dalam rangka mengoptimalkan pasar domestik dan memperkuat daya saing produk pertanian.

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Pelaku usaha di sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan mengalami Keterbatasan permodalan.	- Memperkuat kemampuan permodalan di sektor pertanian dalam rangka meningkatkan hasil produksi hasil pertanian.
Keterbatasan akses terhadap modal dan kredit yang terjangkau, masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan manajerial yang memadai di kalangan pengusaha (UMKM), rendahnya akses pasar baik secara offline maupun online, infrastruktur yang kurang mendukung (akses internet yang lambat).	- Penyediaan modal dan kredit dengan skema tanpa bunga tanpa agunan, Pemberian akses lebih luas terhadap pelatihan dan pendidikan kewirausahaan, Fasilitasi akses ke pasar baik lokal maupun global, Pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses internet yang cepat dan murah serta memfasilitasi kerja sama antara UMKM dengan lembaga riset dan perguruan tinggi untuk meningkatkan inovasi produk dan proses produksi maupun pemasaran hasil produksi.
Sulitnya mengatasi ketidakstabilian harga pangan terutama untuk komoditas Beras, cabe, daging ayam, telur ayam, dll	- Melakukan operasi pasar setiap bulan di seluruh wilayah Kabupaten Bangka

Terdapat 21 (dua puluh satu) program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa, yaitu:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro;
4. Program Pengembangan UMKM;
5. Program Promosi Penanaman Modal;
6. Program Pelayanan Penanaman Modal;
7. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
8. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
9. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
10. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
11. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
12. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
13. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
14. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
15. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
16. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
17. Program Penyuluhan Pertanian;
18. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
19. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
20. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
21. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.

Efektifitas program-program yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa diukur dengan membandingkan capaian realisasi keuangan atas Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran terhadap capaian kinerja sasaran. Pada tahun 2025, realisasi keuangan atas Program-Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa mencapai 82,16 persen dan mampu merealisasikan capaian kinerja sasaran sebesar 114,46 persen sehingga tingkat efektivitas program tersebut dalam mencapai sasaran hanya mencapai 135,66 persen atau Sangat Efektif. Untuk lebih rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54.
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa)

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2025	82,16	111,46	135,66	Sangat Efektif

Sumber: LRA APBD Kab. Bangka Tahun 2026 (unaudited), BPPKAD Kab. Bangka, 2026

Sementara itu, ditinjau dari segi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, terlihat bahwa terjadi efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa mencapai 29,30 persen. Hasil ini diperoleh dengan mengurangi realisasi capaian kinerja sebesar 111,46 persen terhadap realisasi anggaran program yaitu 82,16 persen sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.55.
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa)

TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2025	10.992.383.980,00	9.031.716.050,00	82,16	111,46	29,30

Sumber: LRA APBD Kab. Bangka Tahun 2025 (unaudited), BPPKAD Kab. Bangka, 2026

10. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan sebuah tujuan akhir yang ditetapkan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) sebagai salah satu poin penting yang akan dicapai tahun 2030 yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi daerah yang dapat menggambarkan kemakmuran masyarakat yang tinggi.

Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian dan upaya mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan. Selain pertumbuhan ekonomi, salah satu aspek penting untuk melihat kinerja pembangunan adalah seberapa efektif penggunaan sumber daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang/jasa yang dihasilkan meningkat. Dengan demikian diperlukan tenaga kerja semakin banyak untuk memproduksi barang/jasa tersebut sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun. Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah.

Kabupaten Bangka menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat. Selanjutnya pada tabel berikut dijelaskan target dan capaian dari masing-masing indikator.

Tabel 2.56
Capaian Kinerja atas Sasaran Tahun 2025
(Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Angka Kemiskinan	%	4,23	4,71	89,81	TT
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,89	4,75	102,95	MT
Rata- Rata Capaian					96,38	TT

Sumber: - Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kab. Bangka, 2026
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025

Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator-indikator sebagaimana terlihat pada tabel di atas diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah 96,38 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat tidak tercapai target.

Selanjutnya perbandingan antara capaian indikator atas sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat pada tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan dengan target jangka menengah dalam RPD Kabupaten Bangka 2024-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.57
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD
(Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN S.D 2025 TERHADAP KONDISI AKHIR RPD (%)
1.	Angka Kemiskinan	%	4,24	4,71	4,21	89,38
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,91	4,75	5,33	112,21

Sumber: - Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kab. Bangka, 2025
- Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kab. Bangka Tahun 2024-2026
- Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kab. Bangka Tahun 2025

Analisis lebih lanjut terhadap pencapaian masing-masing indikator dijelaskan di bawah ini.

a) Angka Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Mereka yang pendapatan per kapita bulannya di bawah garis kemiskinan dianggap miskin. Ketika seseorang atau sekelompok individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak mempertahankan tingkat penghidupan tertentu, maka hal tersebut disebut berada dalam kemiskinan.

Masyarakat miskin merupakan tanggung jawab negara sebagaimana Ketentuan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Merujuk bunyi Pasal 34 ayat 1 tersebut, singkatnya UUD mengatur tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk menurunkan angka kemiskinan di daerahnya.

Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.58.
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2025

KABUPATEN/ KOTA	2021	2022	2023	2024	2025
Bangka	4,81	4,26	4,32	4,24	4,71
Belitung	7,15	6,45	6,46	6,11	6,44
Bangka Barat	2,75	2,46	2,71	2,59	2,92
Bangka Tengah	5,13	4,86	5,29	5,94	6,7
Bangka Selatan	3,69	3,22	3,11	3,74	4,17
Belitung Timur	7,2	6,49	6,73	6,36	6,69
Pangkal Pinang	4,76	4,55	4,27	4,04	4,5
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4,9	4,45	4,52	4,55	4,77

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2026

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Bangka pada tahun 2025 sebesar 4,71, berada pada nomor empat terendah setelah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Pangkalpinang, serta Kabupaten Bangka berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,77.

Untuk melihat perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan rata-rata nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.59.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2021 – 2025

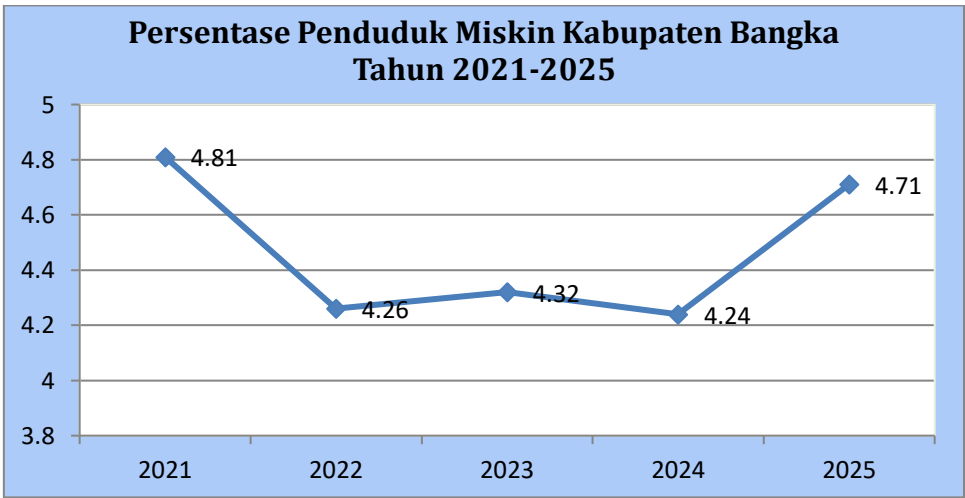
KABUPATEN/KOTA	2021	2022	2023	2024	2025
Bangka	4,81	4,26	4,32	4,24	4,71
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4,9	4,45	4,52	4,55	4,77
Nasional	9,71	9,57	9,36	8,57	8,25

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2026

Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka berdasarkan tabel di atas pada tahun 2021-2025 jika dibandingkan dengan angka rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di bawah angka rata-rata provinsi, serta berada di bawah angka rata-rata nasional.

Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Bangka beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.27
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2026

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa angka kemiskinan Kabupaten Bangka bersifat fluktuatif, dimana angka tertinggi di tahun 2021 sebesar 4,81 hal ini disebabkan terjadinya pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia tentu saja Kabupaten Bangka ikut terkena imbasnya sehingga terjadinya lonjakan angka kemiskinan di tahun tersebut, kembali naik di tahun 2025 hal ini disebabkan oleh Wilayah Kabupaten Bangka secara historis sangat bergantung pada sektor pertambangan terutama pertambangan timah, yang merupakan sumber penghasilan utama masyarakat. Ketergantungan pada satu sektor ini membuat ekonomi lokal sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan volume produksi. Ketika pendapatan dari sektor primer menurun atau tidak menyerap tenaga kerja secara luas, kelompok masyarakat berpendapatan rendah lebih rentan jatuh ke dalam kemiskinan.

a) **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan, perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.60.
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (Persen)
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2025

KABUPATEN/KOTA	2021	2022	2023	2024	2025
Bangka	5,97	5,39	5,03	4,91	4,75
Belitung	3,51	4,3	4,14	3,88	3,64
Bangka Barat	3,83	4,86	4,77	4,88	4,49
Bangka Tengah	4,95	3,99	3,88	4,23	4,21
Bangka Selatan	5,29	5,09	4,84	4,94	4,48
Belitung Timur	3,78	2,5	2,41	2,63	3,05
Pangkal Pinang	6,81	5,9	5,76	5,98	5,73
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5,03	4,77	4,56	4,63	4,45

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2026

Jika melihat data di atas dapat diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangka tahun 2025 sebesar 4,75 berada pada posisi kedua tertinggi setelah Kota Pangkal Pinang yaitu sebesar 5,73, sementara angka terendah dimiliki oleh Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Belitung. Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangka jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan capaian nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

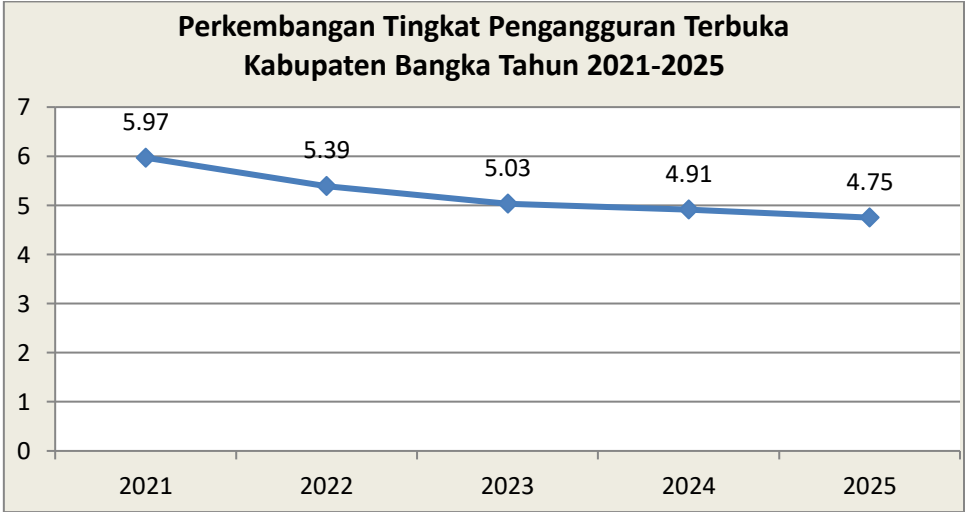
Tabel 2.61.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2021-2025

KABUPATEN/KOTA	2021	2022	2023	2024	2025
Bangka	5,97	5,39	5,03	4,91	4,75
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5,03	4,77	4,56	4,63	4,45
Nasional	6,49	5,86	5,32	4,91	4,74

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2026

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa tahun 2025 Kabupaten Bangka memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,75 berada di atas angka Provinsi yang hanya sebesar 4,45 dan nasional sebesar 4,74. Selanjutnya perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangka tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut ini:

Grafik 2.28.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
dan Nasional Tahun 2021-2025



Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangka Tahun 2021-2025 memiliki tren melandai dari tahun ke tahun meskipun penurunannya tidak begitu banyak. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka bisa menurun sebagai berikut:

1. Mendorong investasi di sektor yang menjanjikan peluang kerja baru
2. Pemerataan lowongan pekerjaan di berbagai daerah
3. Memperluas kesempatan kerja di sektor informal
4. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
5. Menyediakan program pelatihan keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
6. Mendorong pembelajaran seumur hidup dan peningkatan keterampilan berkelanjutan
7. Kerjasama antara lembaga pendidikan dan industri untuk menyesuaikan kurikulum
8. Reformasi mendalam dalam sistem pendidikan untuk memastikan bahwa kurikulum mencakup keterampilan yang diperlukan oleh pasar kerja

Selanjutnya diuraikan beberapa permasalahan dan langkah-langkah pemecahan masalah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 2.62.
Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Terkait Sasaran
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
1. Angka Kemiskinan	
Perekonomian Kabupaten Bangka masih sangat bergantung pada sektor pertambangan timah. Fluktuasi harga timah dunia dan penertiban tambang ilegal menyebabkan pendapatan masyarakat tidak stabil. Ketika aktivitas tambang menurun, banyak pekerja kehilangan mata pencaharian dan berisiko jatuh ke dalam kemiskinan.	Mendukung pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) melalui akses modal, pelatihan pemasaran dan digitalisasi usaha.
Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Perlunya penguatan peran dari TKPKD, diperlukan peran kepemimpinan yang kuat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka. Pemda dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bangka telah sepakat menjadikan pengurangan tingkat kemiskinan sebagai salah satu isu utama pembangunan daerah. Untuk itu, telah dirumuskan program dalam dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif.
Sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum optimal dalam hal penanggulangan kemiskinan daerah.	Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	
Jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya	- mendorong investasi di sektor-sektor yang menjanjikan peluang kerja baru. - meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
Banyak pencari kerja tidak memiliki keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan sektor usaha lokal. Hal ini menyebabkan banyak lulusan sekolah atau universitas sulit mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan kualifikasi mereka	Pemerintah melalui dinas ketenagakerjaan dapat menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja (vocational training) sesuai kebutuhan pasar kerja, sehingga pencari kerja lebih siap dan kompetitif

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari 6 (enam) program yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Bangka yakni:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
5. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
6. Program Hubungan Industrial

Efektifitas program-program yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat diukur dengan membandingkan capaian kinerja sasaran dengan realisasi keuangan atas program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran. Pada tahun 2025, realisasi keuangan atas program-program yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat mencapai 96,28 persen dan mampu merealisasikan capaian kinerja sasaran sebesar 96,38 persen sehingga tingkat efektivitas program tersebut dalam mencapai sasaran mencapai 100,10 persen atau sangat efektif. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.63.
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat)

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2025	96,38	96,28	100,10	Sangat Efektif

Sumber: LRA APBD Kab. Bangka Tahun 2025 (unaudited), BPPKAD Kab. Bangka, 2026

Selanjutnya ditinjau dari sisi efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran, dengan capaian kinerja sebesar 96,38 persen dan realisasi keuangan sebesar 96,28 persen, tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat pada tahun 2025 mencapai 0,10 persen sebagaimana tertera pada tabel berikut:

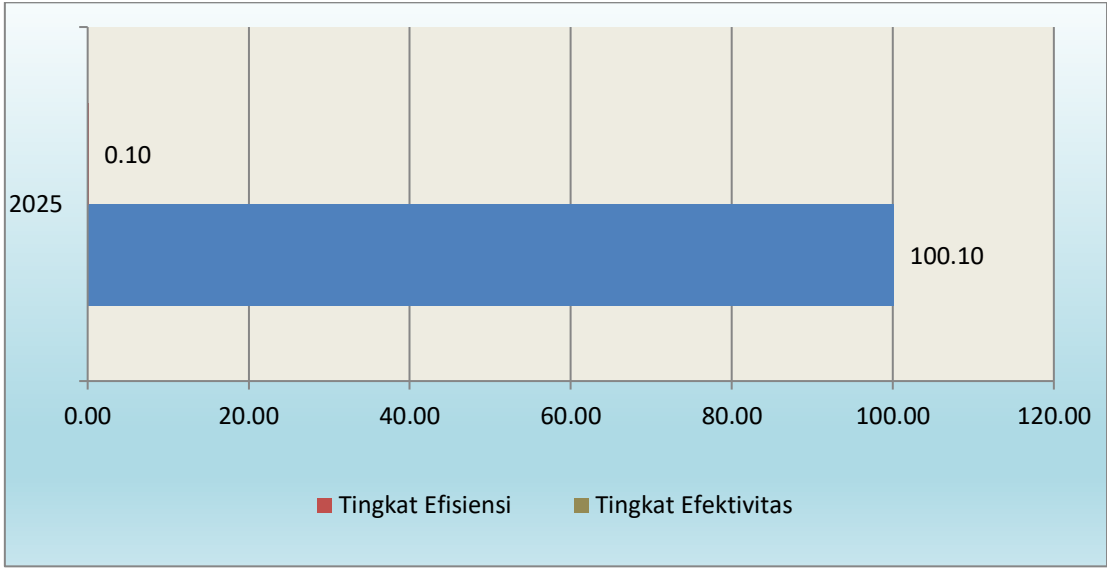
Tabel 2.64
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat)

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja	Efisiensi (%)
				Sasaran (%)	
2025	96,38	5.549.937.180,00	5.343.709.672,00	96,28	0,10

Sumber: LRA APBD Kab. Bangka Tahun 2025 (unaudited), BPPKAD Kab. Bangka, 2026

Tingkat efektifitas dan efisiensi anggaran terhadap pencapaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat tahun 2025 dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 2.29
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2025



11. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan

Gambar 2.2
Pantai Pulau Punggur Tuing Desa Mapur Kecamatan Riau Silip



Tranformasi ekonomi di Kabupaten Bangka dilakukan melalui pengembangan sektor pariwisata yang merupakan salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian daerah pasca tambang. Konsep pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka dilakukan melalui pengembangan destinasi wisata alam, *sport tourism*, kearifan dan budaya lokal, desa wisata serta ekowisata dengan memberdayakan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata daerah.

Untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penambahan fasilitas dan kualitas kepariwisataan seperti akomodasi, transportasi, infrastruktur, layanan pelaku pariwisata serta penyelenggaraan berbagai event dan kegiatan yang berskala nasional maupun internasional. Keberhasilan pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata daerah ini bukan hanya dilihat dari banyaknya kunjungan wisatawan, namun seberapa banyak wisatawan membelanjakan uangnya selama berwisata. Hal sesuai dengan pernyataan Hung, Shang, dan Wang (2012) yang berpendapat bahwa memahami dan mengukur pengeluaran wisatawan merupakan hal yang penting bagi setiap destinasi wisata karena hal tersebut adalah sumber pendapatan dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran wisatawan. Oleh karena itu, sasaran dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka yaitu “Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan” dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yaitu *Spending of Money*.

Spending of Money dihitung berdasarkan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bangka dan membelanjakan uangnya selama berwisata di Kabupaten Bangka. Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bangka dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu wisatawan lokal yang berasal dari wilayah Pulau Bangka, wisatawan nusantara yaitu wisatawan dari luar Pulau Bangka tetapi berdomisili di Indonesia, dan wisatawan mancanegara yang berasal dari luar Indonesia. Berdasarkan Neraca Satelit Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, perhitungan *Spending of Money* dibagi menjadi beberapa jenis pengeluaran wisatawan berdasar Dokumen Neraca Satelit Pariwisata Daerah yaitu (1) akomodasi; (2) makanan, minuman dan tembakau; (3) Angkutan Udara; (4) Transportasi selain udara; (5) BBM; (6) Sewa kendaraan; (7) Rekreasi, seni dan budaya; (8) Belanja cindra mata; (9) Kesehatan; dan (10) Lainnya.

Keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan” dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran *Spending of Money* pada tahun 2025 beserta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.65.
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Spending of Money	Milyar Rupiah	205,91	207,02	100,54	MT

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2026

Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator sebagaimana tertera pada tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah 100,54 persen yang berarti target yang ditetapkan melebihi target capaian. Hal ini terjadi dikarenakan *spending of money* atau uang yang dibelanjakan oleh wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bangka selama Tahun 2025 sebesar 207,02 miliar rupiah sementara target yang ditetapkan sebesar 205,91 miliar rupiah atau selisih sebesar 1,11 miliar dari target yang ditetapkan.

Capaian sasaran meningkatnya jumlah uang yang dibelanjakan wisatawan dengan indikator kinerja *spending of money* atau uang yang dibelanjakan oleh wisatawan pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.66
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan Tahun 2025
dengan Target Akhir RPD Tahun 2024-2026

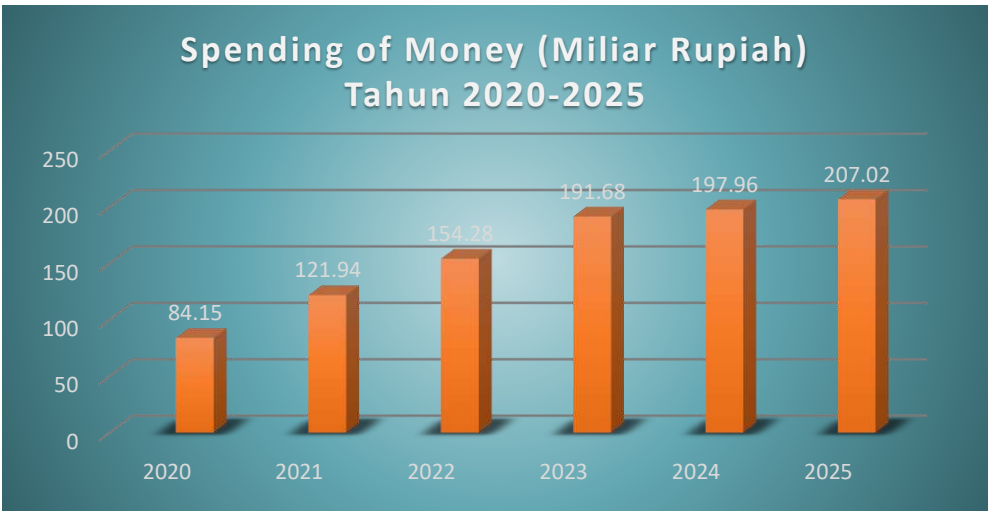
NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2025	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2025 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1.	Spending of Money	Miliar Rp	207,02	185,76	111,44

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, tingkat capaian sasaran meningkatnya jumlah uang yang dibelanjakan wisatawan dengan indikator kinerja *Spending of Money* pada tahun 2025 yang telah mencapai 207,02 miliar ini telah melebihi target jangka menengah atau akhir dari periode RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 yang ditetapkan sebesar 185,76 miliar atau telah mencapai 111,44 persen dari target akhir yang ditetapkan pada tahun 2026.

Perkembangan *spending of money* atau uang yang dibelanjakan oleh wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bangka dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.30
Perkembangan Spending of Money (Miliar Rupiah)
Tahun 2020-2025



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2026 (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan *spending of money* di Kabupaten Bangka dari tahun 2020 hingga tahun 2025 terus mengalami peningkatan pasca terpukul akibat pandemi covid 19.

Capaian *spending of money* pada tahun 2025 sebesar 207,02 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 197,96 mengalami peningkatan sebesar 9,06 miliar rupiah atau sebesar 4,58 persen. Nilai *spending of money* pada tahun 2025 ini diperoleh dari wisatawan mancanegara yang menghabiskan uang dibelanjakan sebesar Rp. 260.258.050 atau pengeluaran rata-rata per hari sebesar Rp. 4.003.970 sedangkan secara nasional untuk wisatawan mancanegara menghabiskan uang sebesar 1.267 dolar AS atau setara Rp. 20.272.000 (kurs 16.000), wisatawan nusantara menghabiskan uang sebesar Rp. 153.169.867.665 atau pengeluaran rata-rata per hari sebesar 2.156.502. Sedangkan wisatawan lokal menghabiskan uang yang dibelanjakan sebanyak Rp. 53.590.312.872 atau pengeluaran rata-rata per hari sebesar 163.972. Peningkatan ini menunjukkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka semakin baik dan minat wisatawan untuk berkunjung dan membelanjakan uangnya selama berwisata di Kabupaten Bangka terus meningkat.

Keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan” dengan target indikator kinerja sasaran strategis *spending of money* tidak terlepas dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangka sebagaimana terlihat pada Grafik berikut ini:

Grafik 2.31
Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Bangka Tahun 2020-2025



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka selama periode tahun 2020-2025 menunjukkan trend yang terus meningkat. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 91.558 orang wisatawan dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan pasca covid-19 menjadi 234.455 orang wisatawan. Tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dengan jumlah wisatawan sebanyak 251.292 orang. Tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan dengan jumlah wisatawan sebanyak 276.484 orang wisatawan dan pada tahun 2024 kunjungan wisatawan kembali meningkat dengan jumlah wisatawan sebanyak 296.317. Pada tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan juga mengikuti tren peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah wisatawan sebanyak 397.918 orang wisatawan atau meningkat sebanyak 101.601 orang wisatawan atau sebesar 34,29 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Jumlah kunjung wisatawan ke Kabupaten Bangka berdasarkan kategori wisatawan (wisatawan lokal, wisatawan nusantara, dan wisatawan mancanegara) serta masing-masing jumlah kunjungan berdasarkan kategori pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.67.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Kategori Wisatawan
Di Kabupaten Bangka Tahun 2020-2025

KATEGORI WISATAWAN	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN (ORANG)					
	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
Lokal	57.660	193.610	195.950	204.699	223.197	326.826
Nusantara	33.898	40.845	55.312	71.783	73.075	71.027
Mancanegara	5	0	30	9	45	65
TOTAL	91.563	234.455	251.292	276.491	296.317	397.918

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka didominasi oleh wisatawan lokal yaitu wisatawan yang berasal dari Pulau Bangka yang pada tahun 2020 berjumlah 57.660 orang wisatawan, tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 193.610 orang wisatawan, pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 195.950 orang wisatawan, tahun 2023 kembali meningkat menjadi 204.699 orang wisatawan, tahun 2024 menjadi 223.197 orang wisatawan dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 326.826 orang.

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara atau wisatawan yang berasal dari luar Pulau Bangka pada tahun 2020 berjumlah 33.898 orang wisatawan dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 40.845 orang wisatawan, tahun 2022 meningkat menjadi 55.312 orang wisatawan, pada tahun 2023 meningkat menjadi 71.776 orang wisatawan, tahun 2024 terus meningkat menjadi 73.075 orang wisatawan dan pada tahun 2025 terjadi penurunan kunjungan wisatawan nusantara menjadi 71.027 orang. Sedangkan wisatawan mancanegara pada tahun 2020 berjumlah 5 orang wisatawan, pada 2021 tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara yang salah satu penyebabnya yaitu pembatasan kunjungan dari luar negeri ke Indonesia serta tidak diselenggarakannya event-event internasional di Kabupaten Bangka seperti *Sungailiat Triathlon* dan *Sungailiat Trail Run*. Pada tahun 2022, kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 30 orang wisatawan, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 9 orang wisatawan mancanegara, pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 45 orang wisatawan dan pada tahun 2025 terus meningkat menjadi 65 orang wisatawan mancanegara.

Jumlah wisatwan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bangka pada tahun 2025 sebanyak 65 orang, sedangkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 15.386.646 orang atau Kabupaten Bangka hanya berkontribusi 0,00042 persen dari keseluruhan wisatawan mancanegara yang ke Indonesia. Ini berarti Kabupaten Bangka belum menjadi destinasi pilihan wisatawan mancanegara.

Jumlah wisatawan nusantara dan lokal yang berkunjung ke Kabupaten Bangka sebanyak 397.853 orang, sedangkan wisatawan nusantara dan lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 sebesar 4.511.219 orang atau Kabupaten Bangka menyumbang sebesar 8,82 persen dari keseluruhan kunjungan wisata ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika dibandingkan dengan kunjungan wisatawan nusantara dan lokal secara nasional yang sebesar 1.200.332.559 orang maka sumbangansih Kabupaten Bangka terhadap wisatawan nasional sebesar 0,033 persen.

Sementara perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka per bulan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.32.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Bulan Tahun 2020 – 2025



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2026 (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas, jumlah kunjungan wisatawan per bulan ke Kabupaten Bangka pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 akan mengalami peningkatan pada setiap bulan liburan sekolah pada bulan Januari dan Juli serta akhir tahun bulan Desember.

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka tidak terlepas dari banyaknya objek wisata baik objek wisata pantai, wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata agro maupun wisata pendidikan. Pengembangan objek wisata baru juga memberikan andil yang besar terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisata dan peningkatan uang yang dibelanjakan oleh wisatawan. Objek wisata baru di Kabupaten Bangka antara lain yaitu Kebun Binatang BN Zoo Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat, Glamping Pesona Bay Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat, Mandi Busa di Tasya *Hot Spring* Desa Pemali Kecamatan Pemali, Jembatan Kaca Pagoda Nusantara Bukit Rebo di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat, Pantai Teluk Karang di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat, *Camping Ground* Sore Biru Air Anyir di Pantai Karang Emas Desa Air Anyir Kecamatan Merawang, Telaga Emas Bersinar di Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat, Pantai Cemara di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat, Aek Lelap Bedelew di Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu, Kampung Reklamasi Air Jangkang Desa Riding Panjang Kecamatan Merawang dan Konservasi Biodiversity Sungai Upang Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar, di samping beberapa lokasi wisata yang telah lama ada dan tetap menarik untuk dikunjungi.

Gambar 2.3.
Wisata Sejarah Prasasti Kota Kapur di Desa Kota Kapur, Mendo Barat



Sumber : <https://www.selasar.com/kerajaan/kota-kapur> Tahun 2026

Selengkapnya beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Bangka tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.68.
Objek Wisata di Kabupaten Bangka

JENIS OBJEK WISATA	OBJEK WISATA
Wisata Pantai	• Pantai Matras di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Jambosag di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Tanjung Kelayang di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Turun Aban di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Parai Tenggara di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Teluk Pikat di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Indah Batu Bedaun di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Batu Berakit di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Tongaci & De Locomotief di Kelurahan Matras Kec. Sungailiat • Pantai Teluk Karang di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Pantai Bangka Bay Resort (BBR) di Kelurahan Jelitik Kec. Sungailiat • Pantai Rambak di Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat • Pantai Teluk Uber di Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat • Pantai Tanjung Pesona di Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat • Pantai Tikus Emas di Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat • Pantai Tikus Nirwana di Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat • Pantai Batu Barisan di Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat • Pantai Batu Tunggal di Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat • Pantai Tikus di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat • Pantai Cemara Beach Resort di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat • Pantai Mang Kalok di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat • Pantai Indah Rebo di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat • Pantai Takari di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat • Pantai Temberan di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang • Pantai Pukan di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang • Pantai Karang Emas di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang • Pantai Kuala di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang • Pantai Penyusuk di Kelurahan Romodong Indah Kecamatan Belinyu • Pantai Romodong di Kelurahan Romodong Indah Kecamatan Belinyu • Pantai Batu Bedinding di Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu • Pantai Levar di Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu • Pantai Simpang di Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu • Pantai Pejam di Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu • Pantai Pesaren di Desa Bintet Kecamatan Belinyu • Pantai Beting di Desa Bintet Kecamatan Belinyu • Pantai Bio Desa Deniang Kecamatan Riau Silip • Pantai Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip • Pantai Pulau Tiga Desa Deniang Kecamatan Riau Silip • Pantai Tuing Indah Desa Mapur Kecamatan Riau Silip • Pantai Pulau Punggur Desa Mapur Kecamatan Riau Silip • Pantai Sunor Lestari Kecamatan Riau Silip • Pantai Tanjung Raya Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat
Wisata Alam	• Hutan Kota di Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat • Kebun Binatang BN Zoo Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat • Tasya Hot Spring Eco Park di Desa Pemali Kecamatan Pemali • Pelabuhan Tanjung Gudang di Kelurahan Mantung Kec. Belinyu • Aik Lelep Bedelew di Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu • Wisata Aik Arus di Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu • Pulau Lampu di Kecamatan Belinyu • Pulau Karang di Kecamatan Belinyu • Tanjung Putat di Kecamatan Belinyu • Pulau Punai di Kecamatan Belinyu • Pulau Nanas di Kecamatan Belinyu • Pulau Kelapa di Kecamatan Belinyu • Pulau Putri di Kecamatan Belinyu • Pulau Dante di Kecamatan Belinyu • Geopark Tengkalat di Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu • Gunung Maras di Kecamatan Riau Silip • Kolam Renang Loka Tirta di Kecamatan Sungailiat • Wisata Alam Bebas/BIO di Desa Deniang Kecamatan Riau Silip • Pemancingan 5 Putri di Kecamatan Riau Silip • Sungai Perimping di Kecamatan Riau Silip

JENIS OBJEK WISATA	OBJEK WISATA
	- Pantai Pulau Dalam di Kecamatan Riau Silip - Pantai Pulau Punggur di Kecamatan Riau Silip - Batu Belawang di Kecamatan Riau Silip - Desa Wisata Air Simpurn di Kecamatan Pemali - Desa Wisata Konservasi Biodiversity Sungai Upang di Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar - Jembatan Kaca Pagoda Nusantara di Desa Rebo Kec. Sungailiat - Telaga Emas Bersinar di Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat - Bukit 7 Sempan di Desa Sempan Kecamatan Pemali - Bukit Pilar Matras di Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat - Aek Lelap Bedelew di Kecamatan Belinyu - Celosia Garden Ake di Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat - Kebun Raya Rimbe Mambang di Desa Dalil Kecamatan Bakam - Agrowisata Betrnad Park di Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam - Penakaran Madu di Kecamatan Bakam - Air Terjun Rembang Bulay di Desa Dalil Kecamatan Bakam - Air Terjun Dalil Merusot di Desa Dalil Kecamatan Bakam - Air Terjun 7 Tingkat di Desa Dalil Kecamatan Bakam - Air Terjun Bolang di Desa Dalil Kecamatan Bakam - Hutan Nyato di Desa Kimak Kecamatan Merawang - Eco Park di Kecamatan Pemali - Batu Macan di Kecamatan Pemali - Kolong Air Simpurn di Kecamatan Pemali - Kampung Reklamasi Air Jangkang di Kec. Merawang - Danau Ampar Red Hill di Desa Riding Panjang Kec. Merawang - Air Terjun Kaki Gunung Maras di Desa Berbura Kecamatan Riau Silip - Air Terjun Lakedang di Desa Berbura Kecamatan Riau Silip - Air Terjun Meruyan di Desa Berbura Kecamatan Riau Silip - Air Terjun Manjang Merah di Desa Berbura Kecamatan Riau Silip - Hutan Adat Tukak Gunung Maras di Kecamatan Riau Silip - Bukit Mupos di Desa Berbura Kecamatan Riau Silip - Kolam Lakedang di Desa Berbura Kecamatan Riau Silip - Balap Tungkap di Kecamatan Riau Silip - Wisata Kolam Renang Embung Aek Gedong di Kec. Riau Silip - Wisata Persawahan di Kecamatan Riau Silip - Agowisata di Desa Banyuasin Kecamatan Riau Silip - Bukit Peret di Desa Berbura Kecamatan Riau Silip - Mangrove dan Budidaya Kepiting Bakau di Desa Cit Kec. Riau Silip - Aek Biru di Desa Cit Kecamatan Riau Silip
Wisata Sejarah	- Makam N Leveysen di Belakang Ruko Puncak di Kec. Sungailiat - Tugu Otto Toorop (Titik Nol Sungailiat) di Kecamatan Sungailiat - Tugu Kemerdekaan di Terminal Sungailiat di Kecamatan Sungailiat - Makam Akek Siam di Bukit Betung di Kecamatan Sungailiat - Makam Depati Bahrin di Desa Kimak Kecamatan Merawang - Makam Nek Pok di Desa Kimak Kecamatan Merawang - Situs Benteng Kota Waringin di Kecamatan Puding Besar - Tugu Nibung 4 di Kecamatan Puding Besar - Makam Pahlawan IV di Kecamatan Merawang - Situs Benteng Kuto Panji di Kecamatan Belinyu - Tugu dan Pahlawan XII di Kecamatan Mendo Barat - Situs Kota Kapur di Kecamatan Mendo Barat - Makam Cermin Jati Desa di Desa Tiang Tara Kecamatan Bakam - Makam Keramat Batu di Kecamatan Bakam - Makam Nek Wet di Kecamatan Bakam - Makam Umar Mansyur di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat - Makam Cermin Jati di Desa Tiang Tara Kecamatan Bakam - Makam Jati Swara di Desa Tiang Tara Kecamatan Bakam - Makam Akek Layau di Desa Bakam Kecamatan Bakam
Wisata Budaya	- Masjid Jami' Kampung Tengah di Kecamatan Belinyu - Beduk Terbesar Masjid Agung di Kecamatan Sungailiat - Vihara Dewi Kwan Im di Kecamatan Sungailiat - Puri Tri Agung di Kecamatan Sungailiat - Padepokan Babel di Kecamatan Sungailiat - Acara Agama 1 Muharam Terdapat di Kecamatan Sungailiat - Acara Sepintu Sedulang di Seluruh Kecamatan - Klenteng Cetya Dharma Abadi di Kecamatan Sungailiat - Phak Kak Liang Terdapat di Kecamatan Belinyu - Mandi Belimau Terdapat di Kecamatan Merawang

JENIS OBJEK WISATA	OBJEK WISATA
	• Rebo Kasan Terdapat di Kecamatan Merawang • Klenteng Amal Bakti di Desa Baturusa Kecamatan Merawang • Klenteng Jaya Bakti di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat • Klenteng Cetya Dharma Abadi di Kemcatan Pemali • Klenteng Fu'Tet Che di Kecamatan Belinyu • Maulid Nabi Muhanmmad SAW di Kec. Mendo Barat • Klenteng Kuto Panji di Kecamatan Belinyu • Desa Wisata Gedong/Suku Hakka di Kecamatan Belinyu • Klenteng Fajar di Kecamatan Sungailiat • Klenteng Kwan Im di Kecamatan Sungailiat • Klenteng Gedong Lumut di Kecamatan Belinyu • Gua Bunda Maria di Kecamatan Belinyu • Desa Wisata Kampung Kapitan di Kecamatan Belinyu • Kuburan Keramat Tua di Kecamatan Belinyu • Batu Dewi Kwan Im di Kecamatan Riau Silip • Telapak Kaki Akek Antak di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip • Sejarah Batu Sabek, Pare Akek, Batu Gendeng di Kec. Riau Silip
Wisata Agro	• Agro Wisata Hendro Terdapat di Kec. Sungailiat • Perkebunan Jambu Mente Terdapat di Kec. Mendo Barat • Kebun Karet tersebar di 8 Kecamatan • Kebun Kelapa Sawit tersebar di 8 Kecamatan • Kebun Lada Putih tersebar di 8 Kecamatan
Wisata Pendidikan	• Kampus Politeknik Maufaktur Bangka Belitung di Sungailiat • Universitas Bangka Belitung di Desa Balunujuk Kecamatan Merawang • Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2026

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka juga didukung oleh berbagai macam event yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sepanjang tahun 2025 seperti *sport tourisme*, festival budaya, *expo* dan pagelaran kesenian yang menghadirkan peserta dari berbagai daerah baik dari dalam maupun luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahkan peserta dari mancanegara.

Gambar 2.4.
Promosi Kegiatan Sungailiat Trail Run Tahun 2025



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2025

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada awal tahun 2025 membuat kalender event pariwisata yang akan diselenggarakan di tahun 2025 dan mempromosikan kalender event pariwisata ini agar wisatawan dapat mengagendakan kunjungan wisatanya sesuai dengan minat wisatawan dalam mengikuti event wisata di Kabupaten Bangka.

Gambar 2.5.
Kalender Event Pariwisata Tahun 2025



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025

Adapun event-event parawisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang diselenggarakan sepanjang tahun 2025 yaitu :

Tabel 2.69.
Event-Event Wisata di Kabupaten Bangka Tahun 2025

NO	EVENT WISATA	LOKASI	JUMLAH PESERTA	JUMLAH PPENGUNJUNG
1.	Sungailiat Trail Run	Exotic Matras	400 Orang	1.500 Orang
2.	Wonderful Indonesia Tourisme Fair (WITF)	PIK II Tangerang	300 Orang	11.550 Orang
3.	PAKSIAN (Pekan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan dan Kesenian	Exotic Matras	443 Orang	500 Orang
4.	Doa Sekampung Bintet	Desa Bintet Kecamatan Belinyu	250 Orang	600 Orang
5.	Njujuh Jerami	Dusun Aik Abik dan Dusun Pejem Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu dan	300 Orang	1.350 Orang
6.	Muharam Kenango	Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat	150 Orang	700 Orang
7.	Festival Betungkah	Desa Pangkalniur Kecamatan Riau Silip	300 Orang	500 Orang
8.	Maulid Nabi Muhammad SAW	Desa Kemuja Kecamanatan Mendo Barat	200 Orang	1.000 Orang
9.	Rebo Kasan	Desa Air Anyir Kecamatan Merawang	100 Orang	400 Orang
10.	Festival Sungai Upang	Desa Tanah Bawah Kec. Puding Besar	450 Orang	600 Orang

NO	EVENT WISATA	LOKASI	JUMLAH PESERTA	JUMLAH PPENGUNJUNG
11.	Paksian (Pegelaran Pelestarian Seni)	Exotioc Matras	400 Orang	600 Orang
12.	Pegelaran Pelestarian Seni	Taman Sari Sungailiat	150 Orang	850 Orang
13.	Sepintu Sedulang Festival	Graha Maras Komplek Kantor Bupati Bangka	300 Orang	400 Orang
	Total		3.743 Orang	20.550 Orang

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2026

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka saat ini juga mengembangkan desa wisata yang merupakan alternatif tempat wisata yang menjadi tren bagi para wisatawan. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata diwilayah masing-masing desa. Kabupaten Bangka sudah memiliki 10 (sepuluh) desa wisata yaitu Desa Wisata Gebong Memarong Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu, Desa Wisata Kampung Kapitan Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu, Desa Wisata Kampung Gedong Desa Lumut Kecamatan Belinyu, Desa Wisata Penyusuk Permai Kelurahan Romodong Indah Kecamatan Belinyu, Desa Wisata Harimau Garang Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar, Desa Wisata Sungai Upang Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar, Desa Wisata Air Terjun Tujuh Tingkat, Air Terjung Bolang dan Bukit Idat Desa Dalil Kecamatan Bakam, Desa Wisata Udang Layang Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam, Desa Wisata Air Anyir Desa Air Anyir Kecamatan Merawang, dan Desa Wisata Matras Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat.

Gambar 2.6.
Desa Wisata Kampung Gedong Desa Lumut Kecamatan Belinyu



Sumber: <https://exotic.bangka.go.id/web/2022/10/desa-wisata-kampung-gedong/> (Tahun 2026)

Sasaran “Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan” dengan indikator kinerja sasaran *spending of money* yang capaiannya melebihi target dikarenakan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bangka, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara membelanjakan uangnya untuk membayar akomodasi, seperti untuk biaya tempat tinggal selama berwisata baik di hotel,

penginapan ataupun *homestay* yang ada di Kabupaten Bangka. Daftar hotel, penginapan atau *homestay* di Kabupaten Bangka pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.70.
Daftar Hotel/Penginapan/Homestay Di Kabupaten Bangka Tahun 2025

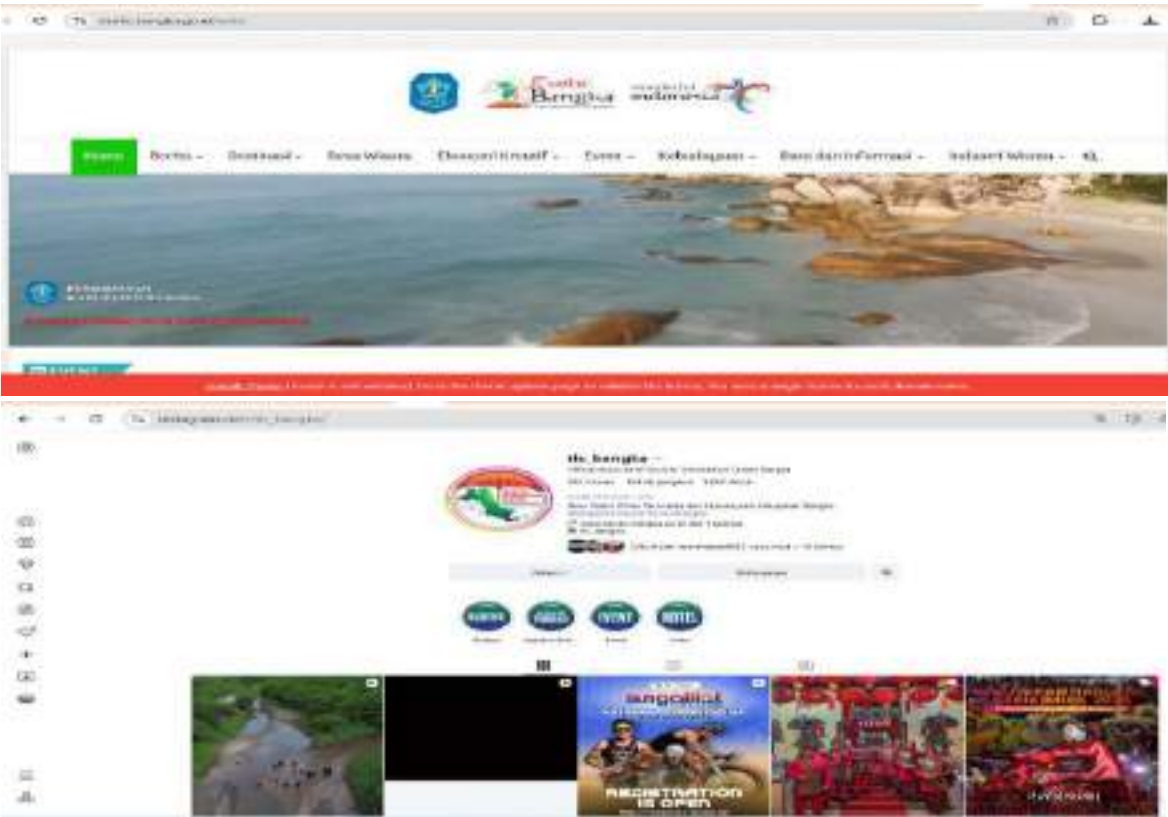
NO	NAMA HOTEL/PENGINAPAN	ALAMAT
1	Parai Beach Resort & Spa	Jl. Parai Tenggiri Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat
2	Hotel Tanjung Pesona	Jl. Pantai Rebo Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat
3	Novilla Boutique Resort	Jl. Laut Lingkungan Kampung Pasir Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat
4	Pesona Bay	Jl. Pantai Rebo Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat
5	Bos Hotel	Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat
6	Pelangi Hotel New Teluk Uber	Jl. Pantai Teluk Uber Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat
7	Hotel Sejati	Jl. Jenderal Sudirman No. 107 Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat
8	ST 12 Hotel	Jl. Cut Nyak Dhien Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat
9	Hotel Tri Mustika	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2B Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat
10	Pondok Wisata Moelya	Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat
11	Penginapan Sederhana	Jl. Muhidin No.150 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat
12	Hotel Tuing Indah	Jl. Desa Mapur Kecamatan Riau Silip
13	Golden Dragon	Jl. Depati Barin No.11A Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu
14	Penginapan Indri	Jl. R.A. Kartini No. 25 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu
15	Sam Pesaren	Jl. Pantai Pesaren No. 1 Dusun Pesaren Desa Bintet Kecamatan Belinyu
16	Hotel Jati Mas	Jl. Depati Amir No.03 Desa Batu Rusa Kec.Merawang
17	Penginapan 2004	Jl. Depati Barin Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu
18	Penginapan 2009	Jl. R.A. Kartini No.1 Kelurahan Kuto Panji Kec. Belinyu
19	Penginapan Lok	Jl. Kenangan Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu
20	Hotel Aksi Natural Resort	Jl. Mentok Gang Aksi No.432 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat
21	Wisma Kelekak Bunda	Jl. Sungailiat - Pangkalpinang No.100 Kelurahan Kecamatan Sungailiat
22	Hotel Sunjaya	Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat
23	Pantai Indah Batu Bedaun	Jl. Pantai Batu Bedaun Lingkungan Kuala Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat
24	Mink Mink Inn	Jl. Panji Baru No.29 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu
25	Hans Hotel	Komplek Sutos Jl. Muhidin Lingkungan Air Anyut Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat
26	City Resort Belinyu	Jl. Pasar Baru No. 8 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu
27	Rumah Charsy Homestay	Jl. Jenderal Sudirman Gg. Kelud Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat
28	Hotel Manunggal	Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat
29	M. Akhir	Jl. Laksda P. Suparjo RT 28 RW 11 Lingkungan 3 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu
30	Empat Putra Homestay	Jl. Jenderal Sudirman Gg. Kelud Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat
31	De Kamil Cottage Villa Kebun	Jl. Merbabu No.77 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2026 (data diolah)

Berdasarkan data BPS Tahun 2025, tingkat hunian hotel dan penginapan di Kabupaten sebesar 17,61 persen, sedangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 31,28 persen dan di tingkat nasional tingkat hunian hotel dan penginapan sebesar 56,12 persen. Sedangkan rata-rata lama menginap wisatawan di Kabupaten Bangka pada tahun 2025 sebesar 1,21 malam sedangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,57 malam dan ditingkat nasional rata-rata wisatawan menginap selama 1,61 hari. Data ini menunjukkan masih jauhnya tingkat hunian hotel dan rata-rata lama menginap di Kabupaten Bangka dari rata-rata Provinsi Bangka Belitung maupun rata-rata nasional yang bisa menyebabkan rendahnya investasi hotel atau penginapan di Kabupaten Bangka karena *return of investment* di sektor hotel dan penginapan yang rendah.

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan” dengan indikator kinerja sasaran *spending of money* yang meningkat pada tahun 2025 juga tidak terlepas dari promosi pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Promosi yang dilakukan dengan mengikuti kegiatan Wonderful Indonesia Tourisme Fair (WITF) di PIK II Tangerang Banten. Promosi pariwisata juga dilakukan melalui media sosial “instagram tic_bangka” yang memiliki *follower* sebanyak 10.800 orang dan sampai saat ini sudah memposting 722 postingan tentang budaya Bangka, kegiatan-kegiatan pariwisata, event pariwisata dan informasi hotel di Kabupaten Bangka (Per Februari 2026). Promosi pariwisata juga dilakukan melalui website exotic.bangka.go.id yang menginformasikan destinasi wisata, kalender *event* pariwisata, reservasi hotel, desa wisata, berita terkait pariwisata Bangka dan peta wisata.

Gambar 2.7.
Promosi Pariwisata Melalui Website exotic.bangka.go.id dan Instagram [tic_bangka](https://www.instagram.com/tic_bangka)



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2026

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan” dengan indikator “*spending of Money*” pada tahun 2025 sudah melebihi target RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 yang sebesar 207,02 miliar dari target yang ditetapkan sebesar 185,76 miliar tidak terlepas dari berbagai permasalahan dalam pengembangan pariwisata daerah. Berikut adalah permasalahan dan langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka

“Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan” dengan indikator “*spending of money*” agar pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Bangka dapat lebih baik pada tahun berikutnya antara lain :

Tabel 2.71.
Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatkan Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Investasi di sektor pariwisata masih rendah jika dibandingkan dengan potensi wisata daerah yang dapat digali, direvitalisasi dan diaktualisasi termasuk potensi budaya daerah	Melakukan promosi potensi wisata daerah secara intensif kepada investor pariwisata skala nasional dan internasional
Kompetensi Sumber Daya Manusia yang bekerja di sektor pariwisata masih perlu ditingkatkan	Menyelenggarakan pelatihan magang bersertifikasi nasional dan atau internasional bagi pekerja sektor pariwisata
Event-event yang diselenggarakan masih sebatas menarik minat wisatawan lokal	Menyelenggarakan event bersekala nasional dan internasional serta masuk kedalam kalender event pariwisata nasional, penyelenggaraan event yang diadakan setiap bulan dengan tema-tema yang dapat menarik wisatawan dengan jadwal yang sudah ditetapkan diawal tahun kalender dan <i>diendorsement</i> oleh tokoh atau artis nasional
Transportasi umum menuju objek wisata sangat terbatas	Memfasilitasi wisatawan dari bandara menuju destinasi wisata unggulan daerah dengan menyediakan bus pariwisata atau menyediakan transportasi wisata pada akhir pekan dari dan ke destinasi wisata unggulan
Pengembangan produk UMKM sebagai cinderamata khas daerah masih sangat terbatas	Mendorong pengembangan produk kreatif UMKM berbasis keunikan lokal, meningkatkan keterampilan dan kualitas produksi serta meningkatkan jaringan pemasaran
Sektor pendukung industri pariwisata seperti hotel, penginapan, homestay, restoran, pusat oleh-oleh dan rental kendaraan wisata belum dirangkul sepenuhnya dalam satu sirkel yang sama	Mendorong pemerintah daerah untuk merangkul seluruh stakeholder pariwisata agar saling bersinergi membentuk satu sirkel industri pariwisata bersama
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga objek wisata daerah terutama kebersihan objek wisata	Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola objek wisata
Potensi desa wisata kurang dikelola secara professional dan terorganisir dengan baik	Meningkatkan kualitas dan promosi desa wisata yang ikonik dengan pengelolaan yang lebih professional dan menjadi bagian paket wisata yang ditawarkan oleh berbagai agent travel pariwisata

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan” dengan indikator “*spending of Money*” tidak terlepas dari adanya 5 (lima) program utama yaitu:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Program Pengembangan Kebudayaan; dan
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.72.
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan)

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIA KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2025	93,14	100,54	107,94	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan indikator utama dapat dicapai sebesar 100,54 persen dengan realisasi keuangan sasaran sebesar 93,14 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran sebesar 107,94 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat digambarkan pada tabel berikut:

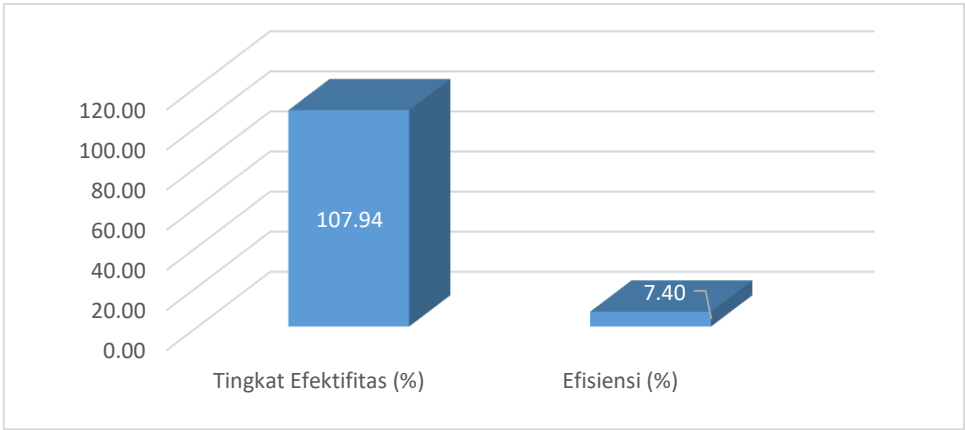
Tabel 2.73
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan)

TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIA KINERJA SASARAN	EFSIENSI (%)
2025	2.149.426.020,00	2.002.024.292,00	93,14	100,54	7,40

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.149.426.020,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp. 2.002.024.292,00 atau sebesar 93,14 persen. Sedangkan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,54 persen sehingga terdapat efisiensi sebesar 7,40 persen dalam pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan”.

Grafik 2.33.
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan)



12. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendapatan

Pemerataan pendapatan menunjukkan sejauh mana hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketika tingkat ketimpangan berada pada level rendah, manfaat pembangunan cenderung tersebar lebih merata dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara inklusif. Oleh karena itu, pembangunan tidak semata berorientasi pada peningkatan output

ekonomi, tetapi juga pada perbaikan kualitas hidup melalui distribusi pendapatan yang lebih seimbang, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan dan bahkan dapat menimbulkan kesenjangan apabila hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Untuk menilai tingkat pemerataan atau ketimpangan pendapatan, digunakan berbagai ukuran kuantitatif seperti rentang pendapatan, varians, dan standar deviasi. Rentang menggambarkan selisih antara pendapatan tertinggi dan terendah, varians menunjukkan tingkat penyimpangan pendapatan dari nilai rata-rata, sedangkan standar deviasi memberikan gambaran sebaran pendapatan secara lebih rinci. Ketiga indikator tersebut menjadi alat penting untuk memahami pola distribusi pendapatan dan potensi ketimpangan yang dapat berdampak pada stabilitas sosial dan pembangunan daerah

Dalam praktik empiris, ukuran yang paling luas digunakan adalah Koefisien Gini atau Gini Ratio yang dikembangkan berdasarkan Kurva Lorenz. Koefisien Gini mengukur tingkat ketimpangan secara agregat dengan membandingkan distribusi kumulatif pendapatan atau pengeluaran masyarakat terhadap distribusi yang sepenuhnya merata. Nilai Indeks Gini berada pada rentang 0 hingga 1, di mana angka 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan angka 1 mencerminkan ketimpangan yang sangat tinggi.

Secara umum, klasifikasi tingkat ketimpangan berdasarkan Gini Ratio dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ketimpangan rendah apabila nilainya kurang dari 0,4; ketimpangan sedang atau moderat apabila berada pada rentang 0,4 hingga 0,5; dan ketimpangan tinggi apabila melebihi 0,5. Semakin besar nilai Gini Ratio, semakin besar pula kesenjangan pengeluaran atau pendapatan antar kelompok masyarakat.

Secara teoritis, data pendapatan memberikan gambaran paling akurat mengenai distribusi kesejahteraan, namun keterbatasan ketersediaannya menjadikan data pengeluaran rumah tangga sebagai pendekatan yang lebih umum digunakan karena lebih mudah diukur dan relatif stabil dalam merepresentasikan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan pendekatan tersebut, capaian kinerja Indeks Gini Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat dianalisis untuk menilai tingkat ketimpangan daerah sekaligus menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Rincian capaian tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.74.
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Pemerataan Pendapatan)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Indeks Gini	Indeks	0,21	0,21	100,00	T

Sumber: - Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kab. Bangka, 2026
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.73 Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025 (Meningkatnya Pemerataan Pendapatan), indikator sasaran yang digunakan yaitu Indeks Gini menunjukkan kinerja yang optimal. Pada tahun 2025, target Indeks Gini sebesar 0,21 berhasil direalisasikan secara tepat sesuai target, yakni 0,21, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00 persen dan masuk dalam kriteria T (Tercapai).

Capaian ini mencerminkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di daerah berada pada level yang terkendali dan stabil, serta menunjukkan efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam mendorong pemerataan pendapatan masyarakat. Rata-rata capaian kinerja yang mencapai 100,00 persen menegaskan bahwa sasaran meningkatnya pemerataan pendapatan pada tahun 2025 telah berhasil diwujudkan sesuai dengan perencanaan.

Tabel 2.75.
Perkembangan Nilai Indeks Gini Kabupaten Bangka Tahun 2021-2025

Tahun	Indeks Gini	Keterangan
2021	0,25	Relatif Rendah
2022	0,21	Relatif Rendah
2023	0,24	Relatif Rendah
2024	0,21	Relatif Rendah
2025	0,21	Relatif Rendah

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2025

Berdasarkan Tabel 3.74 Perkembangan Nilai Indeks Gini Tahun 2021–2025, nilai Indeks Gini di Kabupaten Bangka selama periode tersebut secara konsisten berada pada kategori relatif rendah, meskipun sempat mengalami fluktuasi. Indeks Gini tercatat sebesar 0,25 pada tahun 2021, menurun menjadi 0,21 pada tahun 2022, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,24, sebelum kembali menurun secara berkelanjutan pada tahun 2024 sebesar 0,21 dan mencapai 0,21 pada tahun 2025. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan perbaikan dan stabilitas dalam pemerataan pendapatan masyarakat hingga akhir periode.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka telah memberikan hasil yang relatif stabil dalam jangka menengah, meskipun pada tahun 2025 belum sepenuhnya konsisten dengan tren penurunan ketimpangan pada tahun-tahun sebelumnya. Dinamika nilai Indeks Gini tetap menjadi sinyal perlunya penguatan kebijakan dan program pembangunan yang lebih terarah, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah dan wilayah tertinggal. Meskipun demikian, realisasi kinerja Indeks Gini Tahun 2025 telah mencapai 100 persen dari target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sehingga penajaman kebijakan tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan capaian pemerataan pendapatan agar semakin selaras dengan arah dan sasaran pembangunan daerah pada periode selanjutnya. Perkembangan Realisasi Nilai Indeks Gini Kabupaten Bangka Tahun 2025 Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.76
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPD	REALISASI TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPD (%)
1.	Indeks Gini	Nilai	0,21	0,21	0,21	101,43

Sumber: - Kabupaten Bangka Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kab. Bangka, 2026
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pemerataan pendapatan di Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 ditopang oleh kebijakan pembangunan ekonomi yang terintegrasi dan sinergi lintas sektor. Penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah melalui penataan pertambangan rakyat yang lebih tertib, pengembangan pertanian dan perikanan, serta penguatan UMKM mendorong diversifikasi ekonomi di luar sektor ekstraktif. Upaya ini memperluas sumber pendapatan masyarakat, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, dan memperbaiki distribusi hasil pembangunan antarwilayah serta kelompok sosial.

Di sisi lain, peningkatan kualitas program pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perlindungan sosial yang tepat sasaran memperkuat pemerataan pendapatan. Dukungan UMKM melalui akses permodalan, pelatihan, legalitas, dan promosi produk lokal meningkatkan kesempatan berusaha,

sementara pengendalian inflasi dan stabilitas harga menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Berikut disajikan tabel faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Tahun 2025 di Kabupaten Bangka :

Tabel 2.77.
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Tahun 2025

No.	Faktor Pendorong	Uraian singkat
1	Penguatan kebijakan ekonomi berbasis potensi daerah	Optimalisasi sektor unggulan seperti pertambangan rakyat yang tertib, pertanian, perikanan, dan UMKM mendorong diversifikasi ekonomi serta distribusi pendapatan yang lebih merata antarwilayah.
2	Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan	Dukungan permodalan, pelatihan kewirausahaan, legalitas usaha, dan promosi produk lokal memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil.
3	Efektivitas program perlindungan sosial	Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran berbasis data terpadu menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan menekan ketimpangan ekonomi.
4	Peningkatan kualitas SDM dan akses lapangan kerja	Pelatihan berbasis kompetensi, peningkatan investasi daerah, dan kemitraan dengan dunia usaha membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat usia produktif.
5	Integrasi perencanaan dan penganggaran	Sinkronisasi RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dengan penganggaran memastikan program pengurangan kesenjangan pendapatan menjadi prioritas dan terlaksana konsisten.
6	Pengendalian inflasi dan stabilitas harga	Peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata.
7	Partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor	Keterlibatan pemerintah desa, pelaku usaha, dan komunitas lokal memperkuat pemerataan hasil pembangunan hingga tingkat akar rumput.

Dalam upaya meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bangka menghadapi sejumlah hambatan dan permasalahan yang bersifat struktural maupun teknis. Salah satu tantangan utama adalah masih tingginya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap sektor ekonomi yang fluktuatif, sehingga distribusi pendapatan belum merata antarwilayah dan kelompok sosial. Selain itu, kapasitas dan daya saing UMKM masih terbatas, baik dari aspek permodalan, manajemen usaha, akses pasar, maupun pemanfaatan teknologi digital. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya kualitas dan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, yang berdampak pada terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan dengan pendapatan layak. Di sisi lain, masih terdapat keterbatasan akurasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi ketepatan sasaran intervensi program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan sejumlah upaya strategis. Pertama, memperkuat diversifikasi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan non-ekstraktif serta mendorong hilirisasi produk lokal guna meningkatkan nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja. Kedua, meningkatkan kapasitas UMKM melalui pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, pendampingan legalitas usaha, serta dukungan pemasaran berbasis digital. Ketiga, memperluas program pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Keempat, mengoptimalkan integrasi data sosial ekonomi melalui pemutakhiran basis data terpadu guna memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan tepat sasaran. Selain itu, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam perencanaan dan penganggaran juga dilakukan untuk memastikan program pengurangan ketimpangan pendapatan berjalan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Berikut disajikan tabel permasalahan dan upaya pemecahan masalah Terkait Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendapatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, antara lain :

Tabel 2.78.
Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendapatan

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Ketergantungan pada sektor ekonomi yang fluktuatif dan belum terdiversifikasi	Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta mendorong hilirisasi produk lokal
Kapasitas dan daya saing UMKM masih terbatas (permodalan, manajemen, akses pasar, digitalisasi)	Fasilitasi akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan legalitas usaha, serta dukungan pemasaran dan digitalisasi UMKM
Kualitas dan kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai kebutuhan pasar	Pelatihan vokasi berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha/industri, serta program perluasan kesempatan kerja
Ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi belum optimal akibat keterbatasan data	Pemutakhiran dan integrasi data sosial ekonomi, penguatan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pemerataan Pendapatan didukung oleh pelaksanaan sejumlah program strategis yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta menciptakan stabilitas sosial di daerah. Secara keseluruhan, terdapat enam program utama yang menjadi instrumen kebijakan dalam mendukung terwujudnya distribusi pendapatan yang lebih merata, yaitu :

- Program Penataan Desa;
- Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Penilaian efektivitas pencapaian sasaran meningkatnya pemerataan pendapatan dilakukan melalui perhitungan rata-rata capaian kinerja seluruh indikator pendukung, guna memberikan gambaran tingkat keberhasilan program terhadap target yang ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut disajikan pada tabel berikut sebagai dasar analisis kinerja.

Tabel 2.79.
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Pemerataan Pendapatan)

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2025	91,31	100	109,52	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 (unaudited)

Pada Tahun 2025, realisasi keuangan untuk mendukung sasaran meningkatnya pemerataan pendapatan di Kabupaten Bangka tercatat sebesar 91,31 persen, sementara capaian kinerja mencapai 100 persen berdasarkan indikator utama yang digunakan. Perbandingan kedua capaian tersebut menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 109,52 persen, yang menunjukkan bahwa hasil kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan proporsi anggaran yang direalisasikan. Berdasarkan kriteria penilaian, tingkat efektivitas 109,52 persen termasuk kategori sangat efektif. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 berjalan optimal, berorientasi pada hasil, serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara signifikan meskipun realisasi keuangan belum mencapai 100 persen, sekaligus menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya dianalisis melalui perbandingan antara pagu belanja yang direncanakan dan realisasi belanja dari seluruh program pendukung sasaran, guna menilai tingkat

optimalisasi penggunaan anggaran dalam menghasilkan output dan outcome yang ditetapkan. Rincian target dan realisasi belanja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.80.
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Pemerataan Pendapatan)

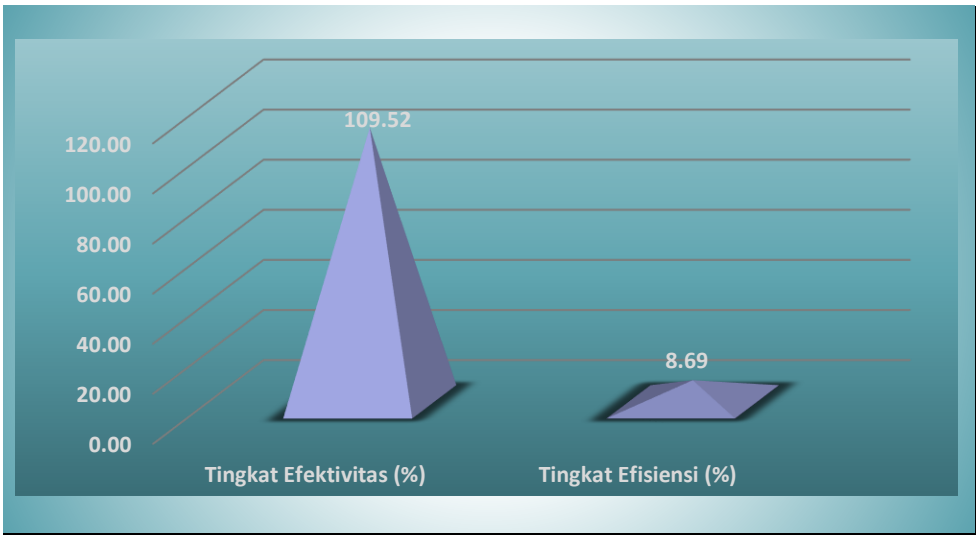
TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2025	9.735.477.604,00	8.889.641.015,00	91,31	100,00	8,69

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 (unaudited)

Berdasarkan tabel tersebut, alokasi anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya pemerataan pendapatan di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 9.735.477.604,00, dengan realisasi belanja Rp 8.889.641.015,00 atau 91,31 persen dari pagu. Tingginya tingkat penyerapan ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan. Dari sisi kinerja, capaian sasaran mencapai 100 persen, yang mengindikasikan implementasi program berjalan cukup optimal meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Dengan realisasi anggaran 91,31 persen dan capaian kinerja 100 persen, tingkat efisiensi tercatat sebesar 8,69 persen, mencerminkan kemampuan pengelolaan anggaran yang baik karena capaian kinerja relatif tinggi dapat diraih dengan penggunaan anggaran di bawah pagu yang direncanakan.

Grafik di bawah ini menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran meningkatnya pemerataan pendapatan pada Tahun 2025:

Grafik 2.34
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Pemerataan Pendapatan)



13. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Kualitas lingkungan hidup menjadi penting bagi bagi manusia dan alam karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat, keseimbangan ekosistem dan ketersediaan sumber daya alam. Sehingga dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup, maka kelangsungan hidup manusia dalam lingkungan yang baik dan sehat, serta keseimbangan ekosistem terjamin. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan melalui revitalisasi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan, ketahanan bencana, serta optimalisasi pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat yakni dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat

yang terkait dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program pengelolaan SDA dan lingkungan.

Kinerja atas sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu Indeks Kinerja Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Ketahanan Bencana. Kinerja kedua indikator sasaran ini menjadi gambaran kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bangka. Adapun capaian kinerja dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.81.
Capaian Kinerja Atas Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)

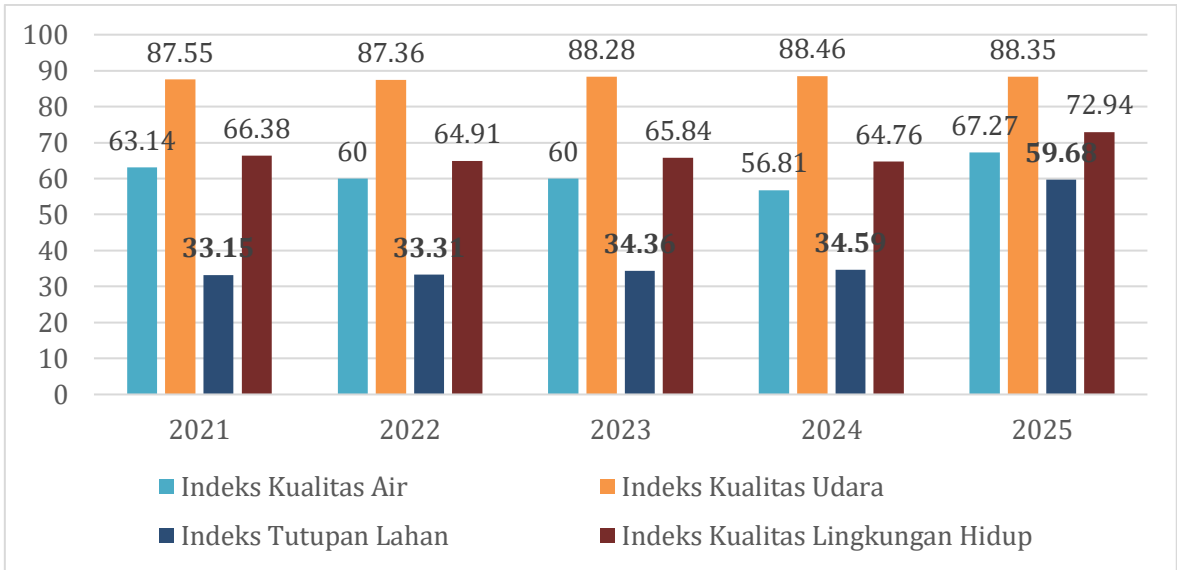
NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65,95	72,94	110,60	MT
2.	Indeks Ketahanan Bencana	Nilai	0,51	0,52	101,96	MT
Rata - Rata Capaian					106,28	MT

Sumber: - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka, 2026
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bangka, 2026
- Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, kedua indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup memiliki capaian kinerja yang melebihi target kinerjanya. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 mencapai 72,94 sehingga capaiannya melebihi target sebesar 10,60%. Indeks Ketahanan Bencana pun pada tahun 2025 mencapai 0,52 juga melebihi target kinerjanya sebesar 1,96%. Capaian indikator sasaran pembangunan Kabupaten Bangka yang melebihi target pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup ini tentunya menjadi prestasi bagi Kabupaten Bangka dan menjadi acuan dan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bangka pada tahun anggaran berikutnya.

Capaian IKLH sebesar 72,94 pada tahun 2025 ini ditentukan oleh berbagai parameter pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter pengukuran tersebut adalah indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Di bawah ini disajikan progress capaian masing – masing parameter penentu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dari tahun 2021 – 2025.

Grafik 2.35.
Perkembangan Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bangka Tahun 2021 – 2025



Berdasarkan grafik di atas, disimpulkan bahwa indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan menjadi parameter yang mempengaruhi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara signifikan. Indeks Kualitas Air (IKA) meningkat dari 56,81 pada tahun 2024 menjadi 67,27 pada tahun 2025. Kemudian, indeks tutupan lahan meningkat dari 34,59 pada tahun 2024 menjadi 59,63 pada tahun 2025. Perubahan nilai IKA ini disebabkan oleh perubahan penghitungan IKA sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029. Perhitungan IKA dilakukan pada 30 titik sampel yang tersebar di lima sungai Kabupaten Bangka. Parameter yang diukur adalah pH, DO, BOD, COD, TSS, TP, Nitrat, dan *Fecal Coli*. Indeks Tutupan Lahan diukur sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. Perhitungan ITL dilakukan dengan menghitung kualitas tutupan lahan sebagai IKTL dan memasukkan faktor koreksi gambut pada fungsi lindung dan fungsi budidaya. Nilai ITL Kabupaten Bangka memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2025, namun nilai 59,63 ini masih dikategorikan buruk. Buruknya kualitas tutupan lahan di Kabupaten Bangka disebabkan kegiatan deforestasi untuk pertambangan, pembukaan lahan untuk Perkebunan sawit, serta pembangunan permukiman.

Indikator lain yang menjadi indikator kinerja pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” adalah Indeks Ketahanan Bencana Daerah. Indeks ketahanan bencana daerah merupakan Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di daerah. Indeks Ketahanan Bencana Daerah memiliki 7 prioritas dan 71 indikator. Prioritas dalam penghitungan Indeks Ketahanan Bencana Daerah, yaitu Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Pengangan Darurat Bencana, dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Indeks Ketahanan Bencana Daerah Kabupaten Bangka pada tahun 2025 sebesar 0,52 meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,50. Capaian indeks ketahanan bencana daerah tahun 2025 tidak mencapai target capaian tahun 2025 yaitu 0,53 namun capaian tahun 2025 sudah melebihi target capaian RPD (tahun 2026) yang sebesar 0,35. Peningkatan capaian ini menandai keseriusan Kabupaten Bangka memastikan ketahanan daerah terhadap kejadian bencana dengan cara memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka pada fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi kebencanaan.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas air dan udara dan tutupan lahan yang terus dilakukan Kabupaten Bangka;
2. Pengambilan sampel mulai tersebar di berbagai area khususnya dalam perhitungan indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan;
3. Kegiatan deforestasi untuk penambangan timah dan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit masih marak terjadi
4. Penanganan persampahan masih terfokus pada dua kecamatan dengan karakteristik perkotaan saja
5. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan persampahan masih rendah
6. Kesiapan tim penanggulangan bencana Kabupaten Bangka.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.82.
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
Terhadap Realisasi Tahun Lalu dan Terhadap Target Akhir RPD
(Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RPD	REALISASI TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPD (%)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	64,76	72,94	65,50	111,36
2.	Indeks Ketahanan Bencana Daerah	Nilai	0,50	0,52	0,35	148,57

Sumber: - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka, 2025
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bangka, 2025
- Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kab. Bangka Tahun 2024-2026

Dari data di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, bahkan capaian IKLH tahun 2025 sudah melampaui target akhir RPD. Capaian IKLH tahun 2025 sebesar 72,94 meningkat dari capaian tahun 2024 yang sebesar 64,76. Capaian IKLH tahun 2025 yang sudah melampaui target RPD sebesar 65,50 dengan persentase capaian 111,36%. Demikian juga dengan Indeks Ketahanan Bencana yang capaian tahun 2025 sebesar 0,52. Nilai indikator ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,50, bahwa cukup signifikan melampaui target akhir RPD yang sebesar 0,35. Capaian kinerja indikator Indeks Ketahanan Bencana dibanding dengan target akhir RPD mencapai 148,57%. Dari kedua indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Kabupaten Bangka sangat baik dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka terkait pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu:

Tabel 2.83.
Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Terkait Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Luas tutupan lahan yang masih rendah	- Melakukan pemantauan terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Bangka - Meningkatkan luas areal tutupan lahan terutama di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lokasi eks tambang - Memberikan perizinan lingkungan kepada para pelaku usaha sesuai dengan standar lingkungan dan RTRW - Melakukan reboisasi - Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terutama izin lingkungan dan izin PPLH terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka
Pengelolaan sampah yang masih kurang memadai akibat cakupan layanan yang terbatas dan kesadaran/kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan persampahan	- Memaksimalkan layanan pada kecamatan yang memiliki TPA - Melakukan pengumpulan sampah rumah tangga dengan bekerjasama dengan Desa/Kelurahan dan TPS3R - Membangun dan memfungsikan TPS3R di wilayah kecamatan yang belum terjangkau TPA - Sosialisasi yang lebih intensif ke masyarakat terkait pengelolaan persampahan

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup tidak terlepas dari pelaksanaan 14 (empat belas) program pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yakni:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
- 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 10. Program Pengelolaan Persampahan;
- 11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 12. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- 13. Program Penanggulangan Bencana; dan
- 14. Program Penanganan Bencana.

Untuk mengukur efektifitas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.84.
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)

TAHUN	REALISASI KEUANGAN (%)	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	TINGKAT EFEKTIVITAS (%)	KRITERIA
2025	95,66	106,28	111,10	Sangat Efektif

Sumber: LRA APBD Kab. Bangka Tahun 2025 (unaudited), BPPKAD Kab. Bangka, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan indikator utama dapat dicapai sebesar 106,28 persen dengan realisasi keuangan sasaran hanya sebesar 95,66 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran sebesar 111,10 persen dengan kriteria keberhasilan tinggi atau dengan kata lain sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung dengan mengurangi persentase capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.85.
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2025
(Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)

TAHUN	PAGU BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI BELANJA SASARAN (Rp)	% REALISASI BELANJA	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	EFISIENSI (%)
2025	9.107.443.272,00	8.712.263.577,00	95.66	106,28	10,62%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka TA 2025 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 sebesar Rp.9.107.443.272,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp.8.712.263.577,00 atau sebesar 95,66 persen, sementara capaian kinerja sasaran sebesar 106,28 persen, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 10,62 persen.

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Dari total anggaran belanja yang dialokasikan pada tahun 2025 sebesar Rp.1.228.612.070.525,65 dan total realisasi belanja daerah sebesar Rp.1.160.141.606.442,29 maka diperoleh perhitungan efisiensi belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp.68.470.464.083,36 atau 5,57 persen dari total anggaran belanja daerah yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan, sementara masih terdapat penghematan anggaran.

Jika efisiensi anggaran dilihat per sasaran strategis, efisiensi anggaran terbesar yaitu efisiensi anggaran program pada sasaran Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak yaitu sebesar 40,80 persen, sedangkan efisiensi anggaran terkecil yaitu efisiensi anggaran program pada sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang hanya sebesar mencapai minus 0,10 persen.

Sementara tingkat efektivitas pencapaian sasaran diukur dengan cara membandingkan realisasi kinerja sasaran dengan realisasi keuangan yang diperlukan dalam pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh rata-rata tingkat efektivitas pencapaian seluruh sasaran sebesar 114,10 persen.

Jika tingkat efektivitas dilihat per sasaran strategis, tingkat efektivitas tertinggi yaitu pada sasaran Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak sebesar 168,83 persen, sementara tingkat efektivitas terendah yaitu pada sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang hanya sebesar mencapai minus 100,10 persen.

Untuk lebih rinci efisiensi anggaran dan tingkat efektivitas pencapaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.86.
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pencapaian Sasaran Strategis
Kabupaten Bangka Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	ANGGARAN (Rp)			TINGKAT EFISIENSI		TINGKAT EFEKTIVITAS (%)
			TARGET(Rp)	REALISASI (Rp)	%	(Rp)	%	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	110,67	759.576.158.850,79	726.875.225.771,58	95,69	32.700.933.079,21	6,79	107,10
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100,71	150.983.414.606,53	136.280.794.314,00	90,26	14.702.620.292,53	9,74	110,79
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	100,24	45.855.287.977,00	42.124.827.035,00	91,86	3.730.460.942,00	9,6	110,52
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	100,72	96.132.378.676,00	91.734.409.200,00	95,43	4.397.969.476,00	6,34	106,64
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	108,14	101.801.588.463,33	93.756.147.097,46	92,10	8.045.441.365,87	3,89	104,22

6	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	108,70	3.871.079.346,00	3.722.677.199,00	96,17	148.402.147,00	6,03	106,27
7	Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak	102,37	523.577.646,00	310.313.807,00	59,27	213.263.839,00	40,80	168,83
8	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	90,41	32.333.916.904,00	31.357.857.412,25	96,98	976.059.491,75	4,50	104,64
9	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	63,81	10.992.383.980,00	9.031.716.050,00	82,16	1.960.667.930,00	29,30	135,66
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	100,61	5.549.937.180,00	5.343.709.672,00	96,28	206.227.508,00	0,10	100,10
11	Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan Wisatawan	103,28	2.149.426.020,00	2.002.024.292,00	93,14	147.401.728,00	7,40	107,94
12	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	102,84	9.735.477.604,00	8.889.641.015,00	91,31	845.836.589,00	8,69	109,52
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	129,82	9.107.443.272,00	8.712.263.577,00	95,66	395.179.695,00	10,62	111,10
TOTAL			1.228.612.070.525,65	1.160.141.606.442,29	94,43	68.470.464.083,36	5,57	114,10

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 (unaudited), (data diolah)

e. Analisis Program dan kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2025 diuraikan berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan yang disajikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka sebagai dasar pelaksanaan program-program utama yang mendukung pencapaian kinerja sasaran.

Adapun rincian target dan realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 (unaudited) disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.86.
Target dan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	
			Rp	%
PENDAPATAN DAERAH	1.184.641.848.917,00	1.192.887.517.295,24	8.245.668.378,24	100,70
PENDAPATAN ASLI DAERAH	209.720.085.298,00	243.020.864.888,24	33.300.779.590,24	115,88
PENDAPATAN TRANSFER	968.467.036.497,00	943.302.374.864,00	(25.164.661.633,00)	97,40
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.454.727.122,00	6.564.277.543,00	109.550.421,00	101,70
BELANJA DAERAH	1.228.612.070.525,65	1.160.141.606.442,29	(68.470.464.083,36)	94,43
BELANJA OPERASI	997.378.596.025,12	952.165.812.308,87	(45.212.783.716,25)	95,47
BELANJA MODAL	88.339.985.611,00	78.001.222.843,42	(10.338.762.767,58)	88,30

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	
			Rp	%
BELANJA TIDAK TERDUGA	6.800.422.989,53	2.480.306.850,00	(4.320.116.139,53)	36,47
BELANJA TRANSFER	136.093.065.900,00	127.494.264.440,00	(8.598.801.460,00)	93,68
SURPLUS/ DEFISIT	(43.970.221.608,65)	32.745.910.852,95	76.716.132.461,60	(74,47)
PEMBIAYAAN DAERAH	43.970.221.608,65	44.943.233.861,65	973.012.253,00	102,21
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.970.221.608,65	44.943.233.861,65	973.012.253,00	102,21
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	43.970.221.608,65	44.943.233.861,65	973.012.253,00	102,21
SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	77.689.144.714,60	77.689.144.714,60	0,00

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun 2024 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa target Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2025 sebesar Rp.1.184.641.848.917,00 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.209.720.085.298,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp.968.467.036.497,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.6.454.727.122,00. Disisi pengeluaran, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp.1.228.612.070.525,65 yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.997.378.596.025,12, Belanja Modal sebesar Rp.88.339.985.611,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.6.800.422.989,53 dan Belanja Transfer sebesar Rp.136.093.065.900,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar (Rp.43.970.221.608,65).

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2025 sebesar Rp.1.192.887.517.295,24 dengan persentase sebesar 100,70 persen yang terdiri atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.243.020.864.888,24, Pendapatan Transfer sebesar Rp.943.302.374.864,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.6.564.277.543,00. Sedangkan Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp.1.160.141.606.442,29 atau mencapai 94,43 persen, terdiri dari realisasi Belanja Operasi Rp.952.165.812.308,87, Belanja Modal sebesar Rp.78.001.222.843,42, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.2.480.306.850,00, dan Belanja Transfer sebesar Rp.127.494.264.440,00. Terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.77.689.144.714,60.

Dalam pencapaian sasaran kinerja utama Pemerintah Daerah, tentunya diperlukan komitmen yang sangat kuat dan kerja sama antar elemen yang secara parsial berorientasi pada pembangunan daerah. Dalam mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah tersebut, Perangkat Daerah memiliki peranan penting dalam tataran pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun. Selain perencanaan yang matang, upaya dalam merealisasikan program-program prioritas tentu menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan daerah. Namun, hal ini perlu dukungan finansial yang memadai yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dukungan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pencapaian sasaran kinerja daerah.

Alokasi anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2025 yang dianggarkan untuk mendukung program prioritas yang memiliki dampak nyata terhadap pencapaian sasaran diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.87.
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025
Menurut Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	759.576.158.850,79	726.875.225.771,58	95,69
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	150.983.414.606,53	136.280.794.314,00	90,26
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	45.855.287.977,00	42.124.827.035,00	91,86
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	96.132.378.676,00	91.734.409.200,00	95,43
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	101.801.588.463,33	93.756.147.097,46	92,10
6	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	3.871.079.346,00	3.722.677.199,00	96,17
7	Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak	523.577.646,00	310.313.807,00	59,27
8	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	32.333.916.904,00	31.357.857.412,25	96,98
9	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	10.992.383.980,00	9.031.716.050,00	82,16
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	5.549.937.180,00	5.343.709.672,00	96,28
11	Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan Wisatawan	2.149.426.020,00	2.002.024.292,00	93,14
12	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	9.735.477.604,00	8.889.641.015,00	91,31
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	9.107.443.272,00	8.712.263.577,00	95,66
TOTAL BELANJA		1.228.612.070.525,65	1.160.141.606.442,29	94,43

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Bangka Tahun 2025 (unaudited), (data diolah)

BAB III

TUGAS PEMBANTUAN

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pemerintah Pusat dapat memberikan Tugas Pembantuan (*Medebewind*) kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah. Pemerintah provinsi juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten dalam hal tugas pembantuan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah sebagai urusan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana APBN dengan program kegiatan APBD. Dasar hukum dalam penyelenggaraan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- b. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995); dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794).

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Penyelenggaraan asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan daerah, yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan dan penugasan dari pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Bangka

Pada Tahun 2025, belum adanya pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kabupaten Bangka untuk melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, tidak adanya capaian kinerja pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah pada tahun yang berkenaan kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat setempat. Namun demikian, dengan mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pemerintah Kabupaten Bangka tidak dapat melaporkan kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hal itu dilakukan mengingat selama Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Bangka tidak termasuk daerah yang mendapat penugasan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022, bahwa tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

3.1.1. Target Kinerja

Target kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bangka pada Tahun Anggaran 2025 tidak ditetapkan. Hal ini disebabkan tidak adanya pelimpahan kewenangan atau penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bangka untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari mekanisme tugas pembantuan.

Dengan tidak adanya penugasan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bangka tidak menyusun indikator kinerja, target capaian program, maupun alokasi anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembantuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Tahun Anggaran 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun tersebut dilaksanakan melalui mekanisme kewenangan urusan pemerintahan daerah serta sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun skema transfer lainnya, tanpa melalui skema tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

3.1.2. Realisasi

Sejalan dengan tidak adanya target kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2025, maka tidak terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Bangka tidak menerima penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan program atau kegiatan tertentu melalui mekanisme tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bangka tidak memiliki capaian kinerja, realisasi fisik kegiatan, maupun realisasi anggaran yang dapat dilaporkan dalam kerangka pelaksanaan tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2025. Seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didanai melalui APBD serta sumber pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam skema tugas pembantuan.

Tabel 3.1.
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025

No.	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Kabupaten Bangka

Pada Tahun 2025, belum adanya pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kabupaten Bangka untuk melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Oleh karena itu, tidak adanya capaian kinerja pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

3.2.1. Target Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bangka tidak menerima penugasan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan terkait pelaksanaan program dan kegiatan melalui mekanisme tugas pembantuan provinsi.

Ketiadaan penugasan tersebut menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bangka tidak menyusun indikator kinerja, target capaian program, maupun alokasi anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembantuan provinsi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun tersebut sepenuhnya merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bangka.

3.2.2. Realisasi

Sejalan dengan tidak adanya target kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2025, maka tidak terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan yang berasal dari mekanisme tugas pembantuan provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangka tidak menerima pelimpahan kewenangan atau penugasan dari Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang disertai dengan pendanaan, sarana dan prasarana, serta kewajiban pelaporan sebagaimana mekanisme tugas pembantuan.

Dengan demikian, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bangka pada Tahun Anggaran 2025 dapat dinyatakan nihil, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun realisasi anggaran.

Tabel 3.2.
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025

No.	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Permasalahan dan Kendala

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bangka tidak menerima penugasan pelaksanaan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya target kinerja maupun realisasi kegiatan yang dapat dilaporkan dalam kerangka pelaksanaan tugas pembantuan. Meskipun demikian, ketiadaan penugasan tersebut juga menunjukkan bahwa tidak seluruh program strategis pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilaksanakan melalui mekanisme tugas pembantuan di Kabupaten Bangka.

Selain itu, tidak adanya pelaksanaan tugas pembantuan dapat membatasi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh tambahan dukungan program dan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi melalui skema penugasan tersebut. Hal ini berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program pembangunan tertentu yang sebenarnya dapat didorong melalui kolaborasi lintas tingkat pemerintahan.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mengidentifikasi peluang pelaksanaan program dan kegiatan melalui mekanisme tugas pembantuan pada tahun-tahun mendatang.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangka juga akan meningkatkan kesiapan perangkat daerah dalam perencanaan program, penyediaan data dukung, serta kapasitas pengelolaan kegiatan agar apabila terdapat penugasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan langkah tersebut diharapkan pada periode selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangka dapat berpartisipasi lebih optimal dalam pelaksanaan tugas pembantuan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

BAB IV

PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Pelayanan Dasar pendidikan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Adapun jenis pelayanan dasar nya yaitu jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan.

Adapun penerima pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota adalah peserta didik yang sedang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu antara lain:

1. Pendidikan Anak Usia Dini
- Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun.
2. Pendidikan Dasar
- Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
3. Pendidikan Kesetaraan
- Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2. Target Pencapaian

Dalam perencanaan pemenuhan SPM Pendidikan dituangkan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah terkait SPM disusun sesuai dengan standar dalam mutu pelayanan dasar dan dengan memperhatikan hasil evaluasi pemenuhan SPM oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan.

Indikator target capaian dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 % (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi	Setiap tahun	-
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber	100 % (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun	Setiap tahun	-

3.	Pendidikan Kesetaraan	dalam pendidikan dasar			daya manusia	yang akan dipenuhi		
		Rata-rata kemampuan iterasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
		Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun				
		Rata-rata kemampuan iterasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 % (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi	Setiap tahun	-

4.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Urusan Pendidikan pada Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini					100.00%
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	75.04	75.04	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	10764	10764	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	55.38	55.38	0	100.00%
	2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	86.4	86.4	0	100.00%
2.	Pendidikan Dasar					100.00%
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD	Persentase	99.34	99.34	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan					
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	92.24	92.24	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	57693	57693	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	SD (2025)					100.00%
	1. Kemampuan literasi	Nilai	80.79	80.79	0	100.00%
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	73.96	73.96	0	100.00%
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	78.79	78.79	0	100.00%
	4. Indeks iklim kebherinekaan	Nilai	75.98	75.98	0	100.00%
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.27	61.27	0	100.00%
	SMP (2025)					100.00%
	1. Kemampuan literasi	Nilai	84.59	84.59	0	100.00%
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	78.65	78.65	0	100.00%
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	72.84	72.84	0	100.00%
	4. Indeks iklim kebherinekaan	Nilai	72.42	72.42	0	100.00%
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59.56	59.56	0	100.00%
3.	Pendidikan Kesenjangan					100.00%
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETERAAN *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	17.82	17.82	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	1106	1106	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	17.82	17.82	0	100.00%

Tabel 4.3.
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks PencapaianSPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	80 %	20 %	100%	Tuntas Paripurna
2.	Pendidikan Dasar	80 %	20 %	100%	Tuntas Paripurna
3.	Pendidikan Kesenjangan	80 %	20 %	100%	Tuntas Paripurna
Urusan Pendidikan				100%	Tuntas Paripurna

4.1.4. Alokasi Anggaran

Dalam penerapan SPM urusan pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka telah mengalokasikan anggaran pemenuhan SPM pada Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BANGKA	1,188,782,587,415
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	37,430,559,186,047
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	91,744,331,873
	APBD	91,744,331,873
	A. APBD MURNI	10,398,206,097
	B. APBD DAU	28,531,277,776
	C. APBD DAK FISIK	557,898,000
	D. APBD DAK NON FISIK	52,256,950,000

4.1.5. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dukungan personil yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Personil	Ket
1	Kondisi Personil berdasarkan Kualifikasi Pendidikan		
	a. S3	1	
	b. S2	3	
	c. S1/D-IV	32	-
	d. D3	4	
	e. SMA	8	
	f. SMP	-	
	g. SD	-	
Jumlah		48	-
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol IV	6	
	b. Gol III	37	-
	c. Gol II	2	
	d. Gol I	-	
	e. IX	3	
Jumlah		48	-
3	Jabatan		
	a. Jabatan Struktural	14	
	b. Jabatan Fungsional Tertentu	8	-
	c. Jabatan Fungsional Umum	26	
Jumlah		48	-

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bangka secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan sehingga pada Tahun 2025 tidak terdapat permasalahan dalam penerapan SPM yang diterapkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka.

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Urusan Kesehatan merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 12 (dua belas) pelayanan kesehatan sebagai berikut:

- 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4. Pelayanan kesehatan balita;
- 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2. Target Pencapaian

Adapun target pencapaian SPM Urusan Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka untuk Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasaar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4832	2005	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	4832	2025	1,521,698,000
					Tablet tambah darah	911160		
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	4832		
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	4832		
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	4832		
					Alat deteksi resiko ibu hami: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	4832		
					Alat deteksi resiko ibu hamil: Skrining triple eliminasi dengan test cepat hepatitis B dan Sifilis dan HIV	4832		
					Kartu ibu/rekam Medis ibu	4832		
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4832		
					Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	4832		
					Gel USG untuk puskesmas yang	338		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasaar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					memiliki alat USG			
					Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis Obstetri dan ginekologi	81		
					Tenaga Kesehatan: Bidan	279		
					Tenaga Kesehatan: Perawat	613		
					Kefarmasian	89		
					Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	44		
					Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan	4832		
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4832	2025	Formulir Partograf	4832	2025	40,469,000
					Kartu ibu (rekam medis ibu)	4832		
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4832		
					Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	4832		
					Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	81		
					Tenaga kesehatan: Bidan	279		
					Tenaga kesehatan: Perawat	613		
					Tenaga kesehatan: tenaga kefarmasian	89		
					Tenaga kesehatan: tenaga gizi	44		
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4602	2025	Vaksin Hepatitis B dosis tunggal	4602	2025	87,166,000
					Vitamin K1 Injeksi	4602		
					Salep/tetes mata Antibiotik	4602		
					Formulir bayi baru lahir	4602		
					Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda	4602		
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak	4602		
					Media promosi komunikasi informasi dan edukasi	4602		
					Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis Anak	82		
					Tenaga kesehatan: Bidan	279		
					Tenaga kesehatan: Perawat	613		
					Tenaga kesehatan: tenaga kefarmasian	89		
					Tenaga kesehatan: tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	12		
Tenaga kesehatan: tenaga gizi	44							
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25489	2025	Kader Kesehatan	1325	2025	40,635,000
					Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)atau instrumen standar lain yang berlaku	25489		
					Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	25489		
					Buku Kesehatan Ibu	25489		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasaar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan Anak (KIA)			
					Vitamin A Biru	2823		
					Vitamin A Merah	19115		
					Vaksin imunisasi dasar: BCG	5138		
					Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	5138		
					Vaksin imunisasi dasar: IPV	5138		
					Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	5138		
					Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	5138		
					Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	5253		
					Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	5253		
					Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	41154		
					Peralatan Anafilaktik	12		
					Formula terapi gizi buruk	12		
					Tenaga medis: Dokter	76		
					Tenaga kesehatan: Bidan	279		
					Tenaga kesehatan: Perawat	613		
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	44		
					Guru PAUD	466		
					Kader Kesehatan	1325		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	57178	2025	Buku rapor kesehatanku	57178	2025	311,370,000
					Buku pemantauan kesehatan	57178		
					Kuesioner skrining kesehatan	57178		
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	57178		
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	57178		
					Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	816504		
					Alat pemeriksaan Hb	24		
					Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	5176		
					Media promosi kesehatan	57178		
					Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	5692		
					Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	95		
					Tenaga kesehatan: Bidan	279		
					Tenaga kesehatan: Perawat	613		
					Tenaga kesehatan:	44		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasaar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tenaga Gizi			
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	89		
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	26		
					Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	257		
					Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	129		
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	219239	2025	Media promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	24	2025	20,188,000
					Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	24		
					Alat: Tensimeter	24		
					Alat: Glukometer	24		
					Alat: Alat pemeriksa Hb	219239		
					Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	219239		
					Alat: KIT IVA Tes	15524		
					Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	219239		
					Kit Ophthalmologi komunitas	219239		
					Kuesioner PUMA	36350		
					Alat Pelayanan KB: a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	152		
					b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	1025		
					c. Vasektomi set	16		
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	219239		
					Vaksin Tetanus Difteri (Td)	219239		
					Tenaga medis: Dokter	76		
					Tenaga kesehatan: Bidan	279		
					Tenaga kesehatan: Perawat	613		
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	44		
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	26		
					Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	457		
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	33910	2025	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	24	2025	262,250,000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasaar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	24		
					Alat pemeriksaan kolesterol	24		
					Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	33910		
					Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	33910		
					Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	33910		
					Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	12		
					Tenaga medis: Dokter	76		
					Tenaga kesehatan: Bidan	279		
					Tenaga kesehatan: Perawat	613		
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	44		
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	26		
					Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	515		
					8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		
Obat Hipertensi	21074							
Tensimeter	50							
Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	1							
Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	21074							
Tenaga medis: Dokter	76							
Tenaga kesehatan: Bidan	279							
Tenaga kesehatan: Perawat	613							
Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	44							
Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	12							
Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	89							
Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	26							
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang	7547	2025			Obat Diabetes Melitus	7574
					Fotometer atau Glukometer	24		
					BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)	7574		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasaar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		mendapatkan pelayanan kesehatan			Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	2		
					Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	12		
					Tenaga medis: Dokter	76		
					Tenaga kesehatan: Bidan	279		
					Tenaga kesehatan: Perawat	613		
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	89		
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	26		
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	44		
					Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	63		
10	Pelayan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	679	2025	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	12	2025	84,920,000
					Penyediaan Psikofarmaka	679		
					Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	12		
					Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	12		
					Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	12		
					Tenaga medis: Dokter	81		
					Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	92		
					Tenaga profesional lainnya	1		
					Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	15		
11	Pelayan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6912	2025	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	125	2025	144,730,000
					Reagen Zn TB	127		
					Masker bedah dan Masker N95	152		
					Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis	6912		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasaar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering			
					Katrid tes cepat molekuler	7500		
					Formulir pencatatan dan pelaporan	1270		
					Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	1		
					Tuberkulin	99		
					Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	87		
					Tenaga kesehatan: Perawat	620		
					Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	93		
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	29		
					Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	72		
					Tenaga kesehatan: Radiografer	22		
					Kader Kesehatan	457		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan dayatahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6985	2025	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	12	2025	162,330,000
					Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	6985		
					Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	6985		
					Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	15		
					Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	85		
					Tenaga kesehatan: Bidan	279		
					Tenaga kesehatan: Perawat	613		
					Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	63		
					Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	26		
					Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	12		

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Urusan Kesehatan pada Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.7.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			96.56%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					87.58%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	69.42%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	4832	4193	639	86.78%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	18.16%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					90.82%
	1.Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	4832	4193	639	86.78%
	2. Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	911160	694260	216900	76.20%
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket	4832	4193	639	86.78%
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket	4832	4193	639	86.78%
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	4832	4193	639	86.78%
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	4832	4193	639	86.78%
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	4832	4193	639	86.78%
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	4832	4193	639	86.78%
	9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4832	4193	639	86.78%
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	4832	4193	639	86.78%
	11. Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	338	338	0	100.00%
	12. Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	81	81	0	100.00%
	13. Tenaga kesehatan: Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	279	279	0	100.00%
	14. Tenaga kesehatan: Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	613	613	0	100.00%
	15. Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang	89	89	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	16. Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang	44	44	0	100.00%
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	4832	4193	639	86.78%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					91.41%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	72.27%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	4832	4365	467	90.34%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19.14%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					95.70%
	1. Formulir partograf	Formulir	4832	4365	467	90.34%
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	4832	4365	467	90.34%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4832	4365	467	90.34%
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	4832	4365	467	90.34%
	5. Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	81	81	0	100.00%
	6. Tenaga kesehatan: Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	279	279	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan: Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	613	613	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang	89	89	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang	44	44	0	100.00%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					94.54%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	75.15%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP: PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Orang	4602	4323	279	93.94%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19.39%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					96.97%
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	4602	4323	279	93.94%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	2. Vitamin K1 Injeksi	Ampul	4602	4323	279	93.94%
	3. Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	4602	4323	279	93.94%
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	4602	4323	279	93.94%
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)	Formulir	4602	4323	279	93.94%
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4602	4323	279	93.94%
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Paket	4602	4323	279	93.94%
	8. Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	82	82	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	279	279	0	100.00%
	10. Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang	613	613	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	89	89	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	12	12	0	100.00%
	13. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	44	44	0	100.00%
	14. Kader Kesehatan	Orang	1325	1325	0	100.00%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita					94.50%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	76.32%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Orang	25489	24315	1174	95.39%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	18.19%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					90.93%
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	25489	24315	1174	95.39%
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	25489	24315	1174	95.39%
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	25489	24315	1174	95.39%
	4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	2823	2823	0	100.00%
	5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	19115	19115	0	100.00%
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	5138	4322	816	84.12%
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	5138	4027	1111	78.38%
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	5138	3672	1466	71.47%
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	5138	4017	1121	78.18%
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	5138	4329	809	84.25%
	11. Vaksin imunisasi lanjutan: DPT - HB - Hib	Vaksin	5253	3615	1638	68.82%
	12. Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin	5253	3744	1509	71.27%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	41154	35733	5421	86.83%
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	12	12	0	100.00%
	15. Formula terapi gizi buruk	Paket	12	12	0	100.00%
	16. Tenaga medis: Dokter	Orang	76	76	0	100.00%
	17. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	279	279	0	100.00%
	18. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	613	613	0	100.00%
	19. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	44	44	0	100.00%
	20. Guru PAUD	Orang	466	466	0	100.00%
	21. Kader kesehatan	Orang	1325	1325	0	100.00%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					99.81%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Orang	57178	57178	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19.81%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					99.03%
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	57178	57178	0	100.00%
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	57178	57178	0	100.00%
	3. Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	57178	57178	0	100.00%
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	57178	57178	0	100.00%
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	57178	57178	0	100.00%
	6. Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan	Tablet	816504	816504	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)					
	7. Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	24	24	0	100.00%
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	5176	5176	0	100.00%
	9. Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	57178	52198	4980	91.29%
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	5692	5198	494	91.32%
	11. Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	Orang	95	95	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	279	279	0	100.00%
	13. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	613	613	0	100.00%
	14. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	44	44	0	100.00%
	15. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	89	89	0	100.00%
	16. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26	26	0	100.00%
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	257	257	0	100.00%
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	129	129	0	100.00%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					96.06%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	76.35%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Orang	219239	209240	9999	95.44%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19.71%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.56%
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	24	24	0	100.00%
	2. Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	24	24	0	100.00%
	3. Alat: Tensimeter	Unit	24	24	0	100.00%
	4. Alat: Glukometer	Unit	24	24	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	5. Alat: Alat pemeriksa Hb	Unit	219239	209240	9999	95.44%
	6. Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	219239	209240	9999	95.44%
	7. Alat: KIT IVA Tes	Unit	15524	15524	0	100.00%
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	219239	209240	9999	95.44%
	9. Kit Opthalmologi komunitas	Unit	219239	209240	9999	95.44%
	10. Kuesioner PUMA	Dokumen	36350	36350	0	100.00%
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	1193	1193	0	100.00%
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	152	152	0	100.00%
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	1025	1025	0	100.00%
	c. Vasektomi set	Unit	16	16	0	100.00%
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	219239	209240	9999	95.44%
	13. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	219239	209240	9999	95.44%
	14. Tenaga medis: Dokter	Orang	76	76	0	100.00%
	15. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	279	279	0	100.00%
	16. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	613	613	0	100.00%
	17. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	44	44	0	100.00%
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26	26	0	100.00%
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	457	457	0	100.00%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					94.84%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	75.12%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Orang	33910	31841	2069	93.90%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19.72%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.59%
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	24	24	0	100.00%
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	24	24	0	100.00%
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	24	24	0	100.00%
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	33910	31841	2069	93.90%
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	33910	31841	2069	93.90%
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	33910	31841	2069	93.90%
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	12	12	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	8. Tenaga medis: Dokter	Orang	76	76	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	279	279	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	613	613	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	44	44	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26	26	0	100.00%
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	515	515	0	100.00%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Orang	21074	21074	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	12	12	0	100.00%
	2. Obat Hipertensi	Paket	21074	21074	0	100.00%
	3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	50	50	0	100.00%
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	1	1	0	100.00%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	21074	21074	0	100.00%
	6. Tenaga medis: Dokter	Orang	76	76	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	279	279	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	613	613	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	44	44	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	12	12	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	89	89	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26	26	0	100.00%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN	Orang	7219	7547	328	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	PENDERITA DIABETES MELITUS					
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1. Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	7547	7547	0	100.00%
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	24	24	0	100.00%
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	7547	7547	0	100.00%
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	2	2	0	100.00%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	12	12	0	100.00%
	6. Tenaga medis: Dokter	Orang	76	76	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	279	279	0	100.00%
	8. Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang	613	613	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	89	89	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26	26	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	44	44	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	63	63	0	100.00%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Orang	679	679	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau	Buku	12	12	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)					
	2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	679	679	0	100.00%
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	12	12	0	100.00%
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	12	12	0	100.00%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	12	12	0	100.00%
	6. Tenaga medis: Dokter	Orang	81	81	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	92	92	0	100.00%
	8. Tenaga profesional lainnya	Orang	1	1	0	100.00%
	9. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	15	15	0	100.00%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Orang	6171	6912	741	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	125	125	0	100.00%
	2. Reagen Zn TB	Kit	127	127	0	100.00%
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	152	152	0	100.00%
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	6912	6912	0	100.00%
	5. Katrid tes cepat molekuler	Tes	7500	7500	0	100.00%
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	1270	1270	0	100.00%
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	0	100.00%
	8. Tuberkulin	Vial	99	99	0	100.00%
	9. Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	87	87	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	620	620	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	Orang	93	93	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	29	29	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	13. Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	72	72	0	100.00%
	14. Tenaga kesehatan: Radiografer	Orang	22	22	0	100.00%
	15. Kader Kesehatan	Orang	457	457	0	100.00%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP: PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	Orang	6708	6985	277	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	12	12	0	100.00%
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	6985	6985	0	100.00%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	6985	6985	0	100.00%
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	15	15	0	100.00%
	5. Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	85	85	0	100.00%
	6. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	279	279	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	613	613	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	63	63	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	26	26	0	100.00%
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	12	12	0	100.00%

Tabel 4.8.
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69,42	18,16	87,58	Tuntas Madya
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	72.27	19.14	91.41	Tuntas Utama
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	75.15	19.39	94.54	Tuntas Utama
4	Pelayanan Kesehatan Balita	76.32	18.19	94.50	Tuntas Utama
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	80,00	19.81	99.81	Tuntas Utama
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	76.35	19.71	96.06	Tuntas Utama
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	75.12	19.72	94.84	Tuntas Utama
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	80,00	20,00	100,00	Tuntas Paripurna
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	80,00	20,00	100,00	Tuntas Paripurna
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	80,00	20,00	100,00	Tuntas Paripurna
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	80,00	20,00	100,00	Tuntas Paripurna
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	80,00	20,00	100,00	Tuntas Paripurna
URUSAN KESEHATAN				96,56	TUNTAS UTAMA

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebesar 96,56 dengan KATEGORI TUNTAS UTAMA, hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Urusan Kesehatan dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar telah berada di atas nilai 80. Ada 5 (lima) Urusan Kesehatan yang telah mencapai Kategori Tuntas Paripurna, yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang masing-masing sudah mencapai 100% atau TUNTAS PARIPURNA. Capaian penerapan SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2025 sebesar 95.28 %.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Dalam penerapan SPM urusan kesehatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka telah mengalokasikan anggaran pemenuhan SPM pada Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BANGKA	1,188,782,587,415
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	267,538,468,857
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	2,510,376,000
	APBD	2,510,376,000
	A. APBD MURNI	16,560,000
	B. APBD DAU	936,718,000
	D. APBD DAK NON FISIK	1,557,098,000

4.2.5. Dukungan Personil

Penerapan SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Bangka didukung oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Adapun tenaga kesehatan yang terlibat dalam penerapandan pencapaian SPM sebagai

berikut:

Tabel 4.10.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan	
	a. SD	1
	b. SMP	1
	c. SMA	34
	d. Sarjana Muda (D-III)	364
	e. S-1 dan D-IV	150
	f. S-2	51
Jumlah		601
2	Pangkat/Golongan	
	a. Gol I	7
	b. Gol II	106
	c. Gol III	445
	d. Gol IV	43
Jumlah		601
3	Jabatan	
	a. Jabatan Struktural	42
	b. Jabatan Fungsional Tertentu	794
	c. Jabatan Fungsional Umum	79

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11.
Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Data Primer dari Fasilitas Kesehatan tidak semua tepat waktu sesuai deadline yang sudah di tentukan	Laporan di entry di aplikasi e-Puskesmas agar dapat direkapitulasi dan di validasi, dan untuk di RS laporan di entry di aplikasi masing-masing program
		1. Terbatasnya Tenaga administrasi di SPM di Penyakit Tidak Menular hanya 2 orang 2. Tenaga pemegang program Puskesmas tidak semua menguasai IT	1. Ada aplikasi khusus untuk pengumpulan data primer pelayanan SPM di Puskesmas dan Dinkes yang bisa diisi <i>realtime</i> 2. Ada <i>mapping</i> lokasi domisili dan lokasi bekerja bagi usia produktif, sehingga mudah dalam <i>mapping</i> perencanaan kegiatan capaian SPM 3. Ada <i>database</i> dari setiap puskesmas tentang jumlah penderita hipertensi yang dilayani di wilayahnya. Data didapat dari layanan induk, jejaringan dan jaringan, serta penderita yang mendapatkan pelayanan di FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut), sehingga tidak menggunakan data <i>riskesdas</i> 2018
		Anggaran untuk SPM di Dinkes dari APBD masih terbatas	1. Usulan Anggaran DAK Non fisik dinkes atau puskesmas Rencana kegiatan dibuat secara terintegrasi agar pelaksanaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien 2. Kebutuhan anggaran dapat dipenuhi secara bersama dengan lintas sektor karena memiliki kegiatan dengan tujuan yang sama
		1. SDM pelaksana SPM, masih merangkap untuk beberapa program atau kegiatan. 2. Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan untuk pemenuhan SPM	1. Pelaksanaan Kegiatan secara terintegrasi antar program 2. Sosialisasi/ <i>refreshing</i> SPM kepada Kepala Puskesmas dan Pemegang Program dan Pelaksana 3. Usulan Pelatihan bagi Sumber Daya manusia Kesehatan dalam memenuhi kegiatan layanan SPM

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Urusan Pekerjaan Umum merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR RI berdasarkan Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum diatur dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air minum; dan
- c. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.3.2. Target Pencapaian

Adapun target pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	320180	2025	Ukuran kuantitas air minum, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari sama dengan 4 galon melalui SPAM	40478	2025	2,460,241,993
					Ukuran kualitas air minum, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak	40478		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					berasa, tidak berbusa, tidak berbau			
					Bukan jaringan perpipaan	0		
					Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	39567		
					Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	39567		
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	320180	2025	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan air limbah domestik	80045	2025	447,382,140
					Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	2725		
					Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah	33019		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota			
					Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	44301		

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.13.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			94.02 %	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					92.39%	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih		
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	320180	295752	24428		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	73.90%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	320180	295752	24428	92.37%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	18.49%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					92.46%	
	JARINGAN PERPIPAAN					84.91%	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	40478	34371	6,107	84.91%	
Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	40478	34371	6,107	84.91%	
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					100.00%	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	39567	39567	0	100.00%	
Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	39567	39567	0	100.00%	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					95.66%	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih		
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	320180	306004	14176		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	76.46%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	320180	306004	14176	95.57%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19.20%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					96.00%	
	KUANTITAS SPALD					95.57%	
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	80045	76501	3,544.00	95.57%	
	KUALITAS SPALD					96.42%	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)							
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	2725	2725	0	100.00%	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua							

	1. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kab/Kota	Rumah Tangga	33019	29475	3,544	89.27%	
	2. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	44301	44301	0	100.00%	

Tabel 4.14.
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	73,90	18,49	92,39	Tuntas Utama
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	76,46	19,20	95,66	Tuntas Utama
URUSAN PEKERJAAN UMUM				94,02	TUNTAS UTAMA

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebesar 94,02%. dengan kategori TUNTAS UTAMA hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum.

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk memenuhi penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.15.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran					
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah (DAU SG)	Jumlah	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	0	0	2,460,241,993	0	2,460,241,993	2,189,480,701
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	0	0	447,382,140	0	447,382,140	430,321,618
Jumlah		138,065,630	0	2,907,624,133	0	2,907,624,133	2,619,802,319

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum maka didukung oleh personil-personil yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun personil yang terlibat yakni:

Tabel 4.16.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil
1	2	3
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	
	- S2	1
	- S1	5
	- D3	2
	- SMA	-
	Jumlah	8
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	
	- S1	-
	- D3	-
	- SMA	-
	Jumlah	-

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum, baik permasalahan internal maupun eksternal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17.
Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Permasalahan	
1	2	3
1.	Permasalahan pada Air Limbah	1. Terdapat peningkatan penilaian kualitas akses sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum, tidak ada lagi akses dasar sehingga klasifikasi akses sanitasi berupa Akses Layak dan Akses Aman 2. Belum ada pendataan kembali keberfungsian unit-unit SPAL-T yang terbangun.
2.	Permasalahan pada Air Minum	1. Terdapat peningkatan jumlah Sambungan Rumah (SR) yang tidak terpelihara, rusak, dan mengalami pemutusan. 2. Belum ada pendataan kembali keberfungsian unit-unit SPAM yang terbangun. 3. Anggaran yang tersedia tidak dapat mengakomodir usulan dari pengelola SPAM.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.

4.4.2. Target Pencapaian

Target pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.18.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	1 (satu) Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat Yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan dan Bantuan Akses Rumah Sewa layak huni	100 %	1 (satu) Tahun

4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Urusan Pendidikan pada Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.19.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00%	
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00%	
	Bencana Meliputi: a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi; c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang; e) Banjir bandang; dan/atau f) Bencana lainnya.						
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat						
	Terjadi (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat Download SK yang telah di upload Tidak Masuk Kedalam Perhitungan <u>1901-20260105103330SK PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BENCANA 20.pdf</u>						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	2	2	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	30.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					150.00%	
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	2	2	0	100.00%	
	2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	2	2	0	100.00%	
	3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	2	1	1	50.00%	
	4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	2	1	1	50.00%	
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00%	
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi: a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)						
	Ada Relokasi Program Pemerintah						
	Terjadi (Lampirkan SK Relokasi) di Verifikasi oleh Sekber Pusat Download SK yang telah di upload Tidak Masuk Kedalam Perhitungan						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	63	63	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1. Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Unit Rumah	189	189	0	100.00%	
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah	63	63	0	100.00%	
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Orang	63	63	0	100.00%	
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi (Penggantian Uang dan Pembangunan Kembali)	Unit Rumah	63	63	0	100.00%	
	2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	1	1	0	100.00%	

Tabel 4.20.
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	80,00	30,00	100	Tuntas Paripurna
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT				100	TUNTAS PARIPURNA

4.4.4. Anggaran

Alokasi Anggaran untuk memenuhi penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.21.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BANGKA	1.188.782.587.415
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	2.288.000.000
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	2.400.758.825
	APBD	2.400.758.825
	A. APBD MURNI	2.288.000.000
	B. APBD DAU	112.758.825

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka didukung personil sebanyak 6 orang yang terdiri dari 5 orang PNS dan 1 orang tenaga kontrak dengan komposisi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22.
Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2025

No.	Bidang Tugas	Eselon			Jumlah
		II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	-	1
3.	Bidang Perumahan	-	1	-	1
4.	Non Eselon	-	-	-	1
5.	Honorier/kontrak	-	-	-	1
6.	Fungsional	-	-	-	1
Total		1	2	-	6

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat pada Tahun 2025 tidak terdapatnya permasalahan internal maupun eksternal.

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Urusan Trantibum Linmas merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian

Adapun target pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan oleh Kabupaten Bangka untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar dan BPBD dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100 %	1 (satu) Tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	1 (satu) Tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1 (satu) Tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	1 (satu) Tahun
5.	Pelayanan Evakuasi korban kebakaran (DAMKAR)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	1 (satu) Tahun

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas pada Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.24.
Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						96.19%	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					96.19%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	68	68	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				(20%)	16.19%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani /Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					80.95%	
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	30	30	0	100.00%	
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	Data Dukung: 1901-20250424091251SOP Satpol PP.pdf Status: Approved Catatan: Maximal 10 Mb Catatan: Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	21	21	0	100.00%	
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	1	0	100.00%	
	Data Dukung: 1901-20250505112829Standar Pelayanan Penegakan Perda.pdf Status: Approved Catatan: Maximal 10 Mb Catatan: Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	35	15	20	42.86%	
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	35	15	20	42.86%	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						99.15%	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					98.89%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	317078	317078	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				(20%)	18.89%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					94.45%	
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	0	100.00%	
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00%	
	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	0	88.90%	
	1). Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					80.04%	
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	500	425	75	85.00%	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	91	75	16	82.42%	
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	8	2	80.00%	
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	11	8	3	72.73%	
	2). Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					90.67%	
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	6	6	0	100.00%	
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	6	6	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	12	12	0	100.00%	
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	8	7	53.33%	
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	3). Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					96.00%	
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	100	80	20	80.00%	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	2	2	0	100.00%	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					98.55%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	317078	317078	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				(20%)	18.55%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					92.73%	
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	0	100.00%	
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	dokumen	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	dokumen	1	1	0	100.00%	
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	0	70.83%	
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	2	2	0	100.00%	
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	1	2	33.33%	
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	1	1	50.00%	
	3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	0	96.67%	
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					93.33%	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	0	100.00%	
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	9	6	60.00%	
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	0	100.00%	
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	15	0	100.00%	
	4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	88.89%	
	1). Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					88.89%	
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	10	5	66.67%	
	2). Gladi Lapangan *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					88.89%	
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	10	5	66.67%	
	5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00%	
	1). Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	0	100.00%	
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	12	12	0	100.00%	
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1	0	100.00%	
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12	0	100.00%	
	2). Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	15	15	0	100.00%	
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	15	15	0	100.00%	
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00%	
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	15	15	0	100.00%	
	3). Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	4). Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00%	
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	15	15	0	100.00%	
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	15	15	0	100.00%	
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					100.00%	
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)							
Download SK Yang Telah Di Upload 1901-20250801093417SK PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BENCANA 20.pdf							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	317078	317078	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				(20%)	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM)					100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						
	1. Respon Cepat Darurat Bencana		0	0	0	100.00%	
	a. Tersedianya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	1	1	0	100.00%	
	2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0	0	0	100.00%	
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	15	15	0	100.00%	
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	15	15	0	100.00%	
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	15	0	100.00%	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						100.00%	
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	309	309	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				(20%)	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	10	10	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	1	1	0	100.00%	
	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	11	11	0	100.00%	
	4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	50	50	0	100.00%	
	5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	355	355	0	100.00%	
	6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	355	355	0	100.00%	

Tabel 4.25.
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Jenis PelayananDasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	80	16,19	96,19	Tuntas Utama
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	80	18,89	98,89	Tuntas Utama
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	80	18,55	98,55	Tuntas Utama
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	80	20	100	Tuntas Paripurna
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80	20	100	Tuntas Paripurna
URUSAN TRANTIBUMLINMAS				96,19	TUNTAS UTAMA

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk memenuhi penerapan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.26.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BANGKA	1,188,782,587,415
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	11,250,524,401
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	11,282,371,837
	APBD	11,282,371,837
	A. APBD MURNI	11,282,371,837

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 terbagi menjadi 2 (dua) Perangkat Daerah pengampu urusan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka dan BPPD Kabupaten Bangka dengan komposisi masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 4.27.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun 2025

No.	Bidang Tugas	Eselon			Jumlah
		II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	1		Plh. Kasat An. Indrata Yusaka, SS
2.	Sekretariat	-		3	Plt. Sekretaris An. Ainun Mardiah, S.IP
3.	Bidang	-	4	8	Plt. Kabid Damkar an. Zalfika Ammya, S.I.Kom Plt. Kabid PPUd An. Syuaib, S.IP
4.	Non Eselon	-	-	-	Pns= 15 Orang
5.	Honorer/kontrak	-	-	-	Polpp Data Base = 249 Orang Damkar Data Base = 29 Orang PolPP Nondatabase = 27 Orang Damkar Nondatabase = 17 Orang Jumlah = 322 Orang
6.	Fungsional	-	-	-	JFT POL PP Ahli Muda : 3 Orang JFT POL PP Ahli Pertama = 3 Orang JFT POL PP Pemula = 1 Orang JFT POL PP Pelaksana = 4 Orang Analisis Kebakaran Ahli Muda = 1 Orang Analisis Kebakaran Ahli Pertama = 1 Orang Pemadam Kebakaran Pemula = 15 Orang Jumlah= 28 Orang
Total					

Tabel 4.28.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM BPBD Kabupaten Bangka Tahun 2025

No.	Bidang Tugas	Eselon			Jumlah
		II	III	IV	
1.	Kepala Badan	-	1	-	1
2.	Sekretariat	-	-	1	1
3.	Kasi	-	-	3	3
4.	Non Eselon	-	-	-	15
Total					20

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pemenuhan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2025 yaitu:

1. Capaian SPM Trantibum dan kebencanaan yang masih di bawah 50% disebabkan oleh keterbatasan SDM, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya SOP dan sistem monitoring evaluasi. Selain itu, kapasitas teknis dalam penyusunan Renkon dan integrasi layanan pascakejadian masih rendah. Perlu penguatan SDM melalui pelatihan dan penambahan personil, penyusunan SOP terpadu lintas sektor, serta peningkatan koordinasi dan sistem pembiayaan darurat. Di sisi lain, optimalisasi monev berbasis data dan peningkatan kapasitas penyusunan Renkon harus dilakukan secara berkelanjutan.
2. Alokasi anggaran yang belum bisa mencakup pelaksanaan seluruh kegiatan terkait pemenuhan SPM sub urusan bencana.
3. Anggaran Tahun 2025 hanya cukup untuk membiayai kegiatan/sub-kegiatan yang langsung terkait dengan pemenuhan SPM kebencanaan adalah Rp. 99.228.000 atau hanya 3 persen dari seluruh anggaran yang berjumlah Rp 3.224.148.901.

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Sosial yang selanjutnya disebut SPM Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Sosial yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara minimal. Pelayanan Dasar Sosial adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Adapun jenis pelayanan dasarnya yaitu jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh Dinas Sosial.

Adapun penerima pelayanan dasar pada SPM Sosial daerah kabupaten/kota adalah Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Urusan Sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:

1. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
2. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
3. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
4. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;
5. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.

4.6.2.Target Pencapaian

Dalam perencanaan pemenuhan SPM Sosial dituangkan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah terkait SPM disusun sesuai dengan standar dalam mutu pelayanan dasar dan dengan memperhatikan hasil evaluasi pemenuhan SPM oleh Kementrian dan Pemerintah Daerahpada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan.

Indikator target capaian dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Bangka yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.29.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasaar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar, Tanggap Darurat dan Paska Bencana bagi korban bencana	200	2025	Layanan data dan pengaduan	200	2025	
			200	2025	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	200	2025	
			200	2025	Penyediaan permakanan	200	2025	
			40	2025	Penyediaan sandang	40	2025	
			10	2025	Penyediaan alat bantu	10	2025	
			3	2025	Penyediaan perbekalan kesehatan	3	2025	
			200	2025	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	200	2025	
			200	2025	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	200	2025	
			1	2025	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	1	2025	
			4	2025	Akses ke layanan pendidikan dan	3	2025	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasaar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2	2025	kesehatan dasar			
			2	2025	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	2	2025	
			2	2025	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2025	
			1	2025	Layanan rujukan	1	2025	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar, Tanggap Darurat dan Paska Bencana bagi korban bencana	100	2025	Layanan data dan pengaduan	100	2025	
			100	2025	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	100	2025	
			100	2025	Penyediaan permakanan	100	2025	
			206	2025	Penyediaan sandang	206	2025	
			1	2025	Penyediaan perbekalan kesehatan diluar panti	1	2025	
			3	2025	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	3	2025	
			3	2025	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	3	2025	
			1	2025	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	1	2025	
			4	2025	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	3	2025	
			4	2025	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	2	2025	
			1	2025	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	2025	
			4	2025	Layanan rujukan	2	2025	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar, Tanggap Darurat dan Paska Bencana bagi korban bencana	450	2025	Layanan data dan pengaduan	450	2025	
			450	2025	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	450	2025	
			450	2025	Penyediaan permakanan	450	2025	
			90	2025	Penyediaan sandang	90	2025	
			17	2025	Penyediaan alat bantu	17	2025	
			4	2025	Penyediaan Peralatan Kesehatan	4	2025	
			1	2025	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1	2025	
			1	2025	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	1	2025	
			1	2025	Fasilitasi pembuatan	1	2025	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasaar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1	2025	Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	1	2025	
			4	2025	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4	2025	
			4	2025	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	4	2025	
			4	2025	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	4	2025	
			4	2025	Layanan rujukan	4	2025	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar, Tanggap Darurat dan Paska Bencana bagi korban bencana	14	2025	Layanan data dan pengaduan	14	2025	
			10	2025	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	10	2025	
			10	2025	Penyediaan permakanaan	10	2025	
			6	2025	Penyediaan sandang	6	2025	
			6	2025	Penyediaan perbekalan kesehatan	6	2025	
			16	2025	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	16	2025	
			14	2025	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	14	2025	
			9	2025	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	9	2025	
			4	2025	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2	2025	
			16	2025	pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	16	2025	
			14	2025	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	14	2025	
			12	2025	Layanan rujukan	12	2025	
5.	Perlindungan & jaminan sosial pada saat & setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar, Tanggap Darurat	511	2025	Penyediaan permakanaan	511	2025	
			44	2025	Penyediaan sandang	44	2025	
			8	2025	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	8	2025	
			2	2025	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	2025	
			2	2025	Pelayanan dukungan Psikososial	0	2025	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasaar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dan Paska Bencana bagi korban bencana						

4.6.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Urusan Sosial pada Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.30.
Realisasi SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			97.74%	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					99.62%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI:	Orang	200	200	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19.62%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.08%	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	200	200	0	100.00%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	200	200	0	100.00%	
	3. Penyediaan permakanaan	Orang	200	200	0	100.00%	
	4. Penyediaan sandang	Orang	40	40	0	100.00%	
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	10	10	0	100.00%	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	3	3	0	100.00%	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	200	200	0	100.00%	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	200	200	0	100.00%	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00%	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	4	3	1	75.00%	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	2	2	0	100.00%	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100.00%	
	13. Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00%	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					97.92%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%	
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI:	Orang	100	100	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	17.92%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					89.58%	
	1. Layanan data dan pengaduan	orang	100	100	0	100.00%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	100	100	0	100.00%	
	3. Penyediaan permakanaan	Orang	100	100	0	100.00%	
	4. Penyediaan sandang	Orang	206	206	0	100.00%	
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	1	1	0	100.00%	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	3	3	0	100.00%	
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	3	3	0	100.00%	
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00%	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	4	3	1	75.00%	
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	4	2	2	50.00%	
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00%	
	12. Layanan rujukan	Orang	4	2	2	50.00%	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI:	Orang	450	450	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	450	450	0	100.00%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	450	450	0	100.00%	
	3. Penyediaan permakanaan	Orang	450	450	0	100.00%	
	4. Penyediaan sandang	Orang	90	90	0	100.00%	
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	17	17	0	100.00%	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	4	4	0	100.00%	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	1	1	0	100.00%	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	1	1	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00%	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0	100.00%	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	4	4	0	100.00%	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4	4	0	100.00%	
	13. Layanan rujukan	Orang	4	4	0	100.00%	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					99.17%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI:	Orang	14	14	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19.17%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					95.83%	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	14	14	0	100.00%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	10	0	100.00%	
	3. Penyediaan permakanaan	Orang	10	10	0	100.00%	
	4. Penyediaan sandang	Orang	6	6	0	100.00%	
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	6	6	0	100.00%	
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	16	16	0	100.00%	
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	14	14	0	100.00%	
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	9	9	0	100.00%	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	4	2	2	50.00%	
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	16	16	0	100.00%	
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	14	14	0	100.00%	
	12. Layanan rujukan	Orang	12	12	0	100.00%	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					92.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan):	Orang	511	511	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	12.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					60.00%	
	1. Penyediaan permakanaan	Orang	511	511	0	100.00%	
	2. Penyediaan sandang	Orang	44	44	0	100.00%	
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	8	8	0	100.00%	
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	2	0	2	0.00%	
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	2	0	2	0.00%	

Tabel 4.31.
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Urusan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Jenis PelayananDasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks PencapaianMutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar di luar panti	80	19,62	99,62	Tuntas Utama
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	80	17,92	97,92	Tuntas Utama
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	80	20	100	Tuntas Paripurna
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	80	19,17	99,17	Tuntas Utama
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana kabupaten	80	12,00	92,00	Tuntas Utama
URUSAN SOSIAL				97,94	TUNTAS UTAMA

4.6.4. Alokasi Anggaran

Dalam penerapan SPM Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bangka telah mengalokasikan anggaran pemenuhan SPM pada Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.32.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BANGKA	1,188,782,587,415
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	10,046,177,993
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,015,500,000
	APBD	1,015,500,000
	A. APBD MURNI	1,015,500,000

4.6.5. Dukungan Personil

Penerapan SPM Urusan Sosial di Kabupaten Bangka didukung oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Adapun tenaga yang ada di Dinas Sosial yang terlibat dalam penerapandan pencapaian SPM sebagai berikut:

Tabel 4.33.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025

No.	Bidang Tugas	Eselon			Staf	PPPK Paruh Waktu	Jumlah
		II	III	IV			
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	-	-	-	1
3.	Bidang	-	2	-	-	-	2
4.	Fungsional/Strukturan eselon IV	-	-	7	-	-	7
5.	Non Eselon	-	-	-	13	-	13
6.	PPPK Paruh Waktu	-	-	-	-	18	18
	Total	1	3	7	13	18	42

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial sebanyak 42 orang meliputi tenaga PNS sebanyak 24 orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 18 orang di Dinas Sosial.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.34.
Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Dalam melakukan pengumpulan data membutuhkan waktu yang lama, data bisa menjadi kurang akurat karena sasaran SPM terutama gelandangan serta pengemis yang mobilitasnya sangat tinggi antar wilayah, bahkan antar kabupaten, banyak yang belum memiliki identitas diri, terutama lansia terlantar, anak terlantar, gepeng	Bekerja sama dengan pihak desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka relawan (TKSK) dan tenaga sosial yang ada di desa untuk mendapatkan data identitas sasaran
		Pengumpulan data yang membutuhkan waktu lama, sehingga mempengaruhi dalam penghitungan kebutuhan sasaran	Melakukan pencermatan terhadap data dasar
		Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar yang didata tahun berjalan untuk diusulkan mendapatkan bantuan kebutuhan dasar pada tahun N+1, sehingga terkadang sasaran sudah tidak tepat dengan berbagai Alasan	Melakukan advokasi untuk pelaksanaan tahun berikutnya pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilaksanakan pada tahun berjalan
2.	Eksternal	Pemenuhan kebutuhan dasar dihitung berdasarkan jumlah sasaran, tetapi terkendala dengan anggaran yang tersedia	Bekerjasama dengan lintas sektor dan pihak swasta untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar sasaran, terutama untuk pemenuhan alat bantu kepada disabilitas

4.7. Program dan Kegiatan

1. Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							44,561,708,423	39,909,446,524	89.56%
	1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412						7,539,779,566	6,099,649,576	80.90%
Angka Partisipasi Sekolah										
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0051	0	0	0.00%
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0011	0	0	0.00%
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0015	5,974,718,000	4,838,039,272	80.98%
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0025	39,865,000	27,595,000	69.22%
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0030	825,000,000	745,834,800	90.40%
		6	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0040	0	0	0.00%
		7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0041	0	0	0.00%
Kekhususan PAUD										
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0045	0	0	0.00%
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0046	400,196,566	227,055,104	56.74%
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0016	90,000,000	82,460,700	91.62%
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0017	210,000,000	178,664,700	85.08%
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0023	0	0	0.00%
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0024	0	0	0.00%
		7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0026	0	0	0.00%
		8	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0029	0	0	0.00%
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0039	0	0	0.00%
	JUMLAH INDIKATOR				7,539,779,566	6,099,649,576	80.90%			

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) K20240327110629						23,369,471,802	21,260,161,299	90.97%
Angka Partisipasi Sekolah										
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0001	0	0	0.00%
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0054	600,840,000	600,840,000	100.00%
		3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0038	43,960,922	35,695,000	81.20%
		4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0046	0	0	0.00%
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0047	573,840,000	571,440,900	99.58%
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0051	1,807,886,475	1,791,427,255	99.09%
Literasi										
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	420,127,340	205,504,825	48.91%
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	8,729,980,600	7,982,151,222	91.43%
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	76,552,640	32,840,520	42.90%
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	0	0	0.00%
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00%
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	0	0	0.00%
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	0	0	0.00%
		8	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	0	0	0.00%
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00%
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	201,966,540	197,677,420	97.88%
Numerasi										

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	8,729,980,600	7,982,151,222	91.43%
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	76,552,640	32,840,520	42.90%
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	0	0	0.00%
		4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	0	0	0.00%
		5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	0	0	0.00%
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	201,966,540	197,677,420	97.88%
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	0	0	0.00%
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	420,127,340	205,504,825	48.91%
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00%
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00%
Keamanan										
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00%
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00%
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	495,230,055	474,803,390	95.88%
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00%
Kebhinekaan										
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00%
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	495,230,055	474,803,390	95.88%
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00%
Inklusifitas										
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00%
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00%
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	495,230,055	474,803,390	95.88%
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00%
	JUMLAH INDIKATOR				23,369,471,802	21,260,161,299	90.97%			
	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647						13,532,191,205	12,489,463,150	92.29%
Angka Partisipasi Sekolah										
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0001	0	0	0.00%
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0014	997,547,925	990,137,840	99.26%
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0032	360,735,000	360,735,000	100.00%
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0051	25,000,000	14,960,000	59.84%
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0059	1,208,880,000	1,204,615,000	99.65%
		6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0062	0	0	0.00%
Literasi										
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	207,777,340	202,197,668	97.31%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	4,472,637,800	4,089,131,744	91.43%
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	90,225,100	33,099,850	36.69%
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	0	0	0.00%
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00%
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	0	0	0.00%
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	0	0	0.00%
		8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	215,428,900	193,174,175	89.67%
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00%
		10	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	0	0	0.00%
Numerasi										
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	4,472,637,800	4,089,131,744	91.43%
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	90,225,100	33,099,850	36.69%
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	0	0	0.00%
		4	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	0	0	0.00%
		5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	0	0	0.00%
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	215,428,900	193,174,175	89.67%
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	0	0	0.00%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	207,777,340	202,197,668	97.31%
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00%
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00%
Keamanan										
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00%
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00%
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	322,630,000	294,602,812	91.31%
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Keluarga	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	0.00%
Kebhinekaan										
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00%
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00%
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	322,630,000	294,602,812	91.31%
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	0.00%
Inklusifitas										
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00%
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00%
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	322,630,000	294,602,812	91.31%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	0.00%
	JUMLAH INDIKATOR				13,532,191,205	12,489,463,150	92.29%			
	4	Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20250805052437						120,265,850	60,172,499	50.03%
Angka Partisipasi Sekolah										
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.0001	60,265,850	30,930,503	51.32%
		1	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	1.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.0002	60,000,000	29,241,996	48.74%
	JUMLAH INDIKATOR				120,265,850	60,172,499	50.03%			
	5	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah K20250807081842						0	0	0.00%
Literasi										
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	1.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	0.00%
Numerasi										
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	1.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	0.00%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%			
	JUMLAH PROGRAM				44,561,708,423	39,909,446,524	89.56%			

2. Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2,692,716,000	2,550,132,533	94.70%
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			2,692,716,000	2,550,132,533	94.70%
	1.02.02.2.02.0001	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,521,698,000	1,468,326,009	96.49%
	1.02.02.2.02.0002	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	40,469,000	39,907,268	98.61%
	1.02.02.2.02.0003	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	87,166,000	80,698,000	92.58%
	1.02.02.2.02.0004	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	40,635,000	40,020,000	98.49%
	1.02.02.2.02.0005	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	311,370,000	304,758,000	97.88%
	1.02.02.2.02.0006	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	20,188,000	19,999,000	99.06%
	1.02.02.2.02.0007	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	262,250,000	251,545,380	95.92%
	1.02.02.2.02.0008	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	8,480,000	8,302,500	97.91%
	1.02.02.2.02.0009	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	8,480,000	8,327,500	98.20%
	1.02.02.2.02.0010	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	84,920,000	84,549,160	99.56%
	1.02.02.2.02.0011	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	144,730,000	90,630,805	62.62%
	1.02.02.2.02.0012	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	162,330,000	153,068,911	94.29%
	JUMLAH INDIKATOR				2,692,716,000	2,550,132,533	94.70%
	JUMLAH PROGRAM				2,692,716,000	2,550,132,533	94.70%

3. Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				2,460,241,993	2,189,480,701	88.99%
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			2,460,241,993	2,189,480,701	88.99%
	1.03.03.2.01.0001	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0002	2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0003	3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0004	4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0005	5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0006	6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0007	7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0008	8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0009	9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0010	10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0011	11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0012	12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0013	13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0014	14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0015	15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0016	16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0017	17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0018	18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0019	19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0020	20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0021	21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0022	22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0023	23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0024	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0025	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0026	26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0027	27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0028	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0029	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	515,835,993	285,957,000	55.44%

No (1)	PROGRAM (2)	KEGIATAN (3)	SUB KEGIATAN (4)	SATUAN (5)	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN (8)
					(6)	(7)	(8)
	1.03.03.2.01.0030	30	Facilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0031	31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	1,944,406,000	1,903,523,701	97.90%
	1.03.03.2.01.0032	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0033	33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				2,460,241,993	2,189,480,701	88.99%
	JUMLAH PROGRAM				2,460,241,993	2,189,480,701	88.99%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				447,382,140	430,321,618	96.19%
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			447,382,140	430,321,618	96.19%
	1.03.05.2.01.0001	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0002	2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0003	3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0004	4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0005	5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0006	6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0007	7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0008	8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0009	9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0010	10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0011	11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0012	12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0013	13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0014	14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0015	15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0016	16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0017	17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0018	18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0019	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0020	20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0021	21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%

No (1)	PROGRAM (2)	KEGIATAN (3)	SUB KEGIATAN (4)	SATUAN (5)	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN (8)
					(6)	(7)	(8)
	1.03.05.2.01.0022	22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0023	23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0024	24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0025	25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0026	26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0027	27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0028	28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0029	29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0030	30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0031	31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0032	32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0033	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	86,951,090	75,166,644	86.45%
	1.03.05.2.01.0034	34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0035	35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0036	36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0037	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0038	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0039	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	360,431,050	355,154,974	98.54%
	1.03.05.2.01.0040	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0041	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				447,382,140	430,321,618	96.19%
	JUMLAH PROGRAM				447,382,140	430,321,618	96.19%

4. Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				112,758,825	111,125,008	98,55%
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			12,758,825	11,125,008	87.21%
	1.04.02.2.01.0001	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0002	2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0003	3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0004	4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0005	5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0006	6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0007	7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0008	8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0009	9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	12,758,825	11,125,008	87,21%
	1.04.02.2.01.0010	10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				12,758,825	11,125,008	87.21%
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			100,000,000	100,000,000	100.00%
	1.04.02.2.03.0001	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0002	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0003	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0004	4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	100,000,000	100,000,000	100%
	1.04.02.2.03.0005	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0006	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0007	7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0008	8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0009	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0010	10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0011	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0012	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				12,758,825	11,125,008	87.21%
	JUMLAH PROGRAM				112,758,825	111,125,008	98,55%

5. Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				6,488,008,985	6,425,182,650	99.03%
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			1,337,588,601	1,318,570,250	98.58%
	1.05.02.2.01.0003	1	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	14,200,000	14,168,000	99.77%
	1.05.02.2.01.0004	2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	1,247,140,601	1,231,234,250	98.72%
	1.05.02.2.01.0005	3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	17,368,000	16,818,000	96.83%
	1.05.02.2.01.0006	4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	34,880,000	33,510,000	96.07%
	1.05.02.2.01.0007	5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0008	6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0009	7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0010	8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0011	9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0012	10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0013	11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0014	12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0015	13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0015	14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	24,000,000	22,840,000	95.17%
	1.05.02.2.01.0016	15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0016	16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0017	17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan	0	0	0%

No (1)	PROGRAM (2)	KEGIATAN (3)	SUB KEGIATAN (4)	SATUAN (5)	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN (6) (7)		SERAPAN (8)
	1.05.02.2.01.0018	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,337,588,601	1,318,570,250	98.58%
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			5,142,944,384	5,106,312,400	99.29%
	1.05.02.2.02.0001	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0002	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	11,590,000	11,048,000	95.32%
	1.05.02.2.02.0003	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	5,131,354,384	5,095,264,400	99.30%
	1.05.02.2.02.0004	4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0005	5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0006	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0007	7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0008	8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0009	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0010	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0011	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0012	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				5,142,944,384	5,106,312,400	99.29%
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			7,476,000	300,000	4.01%
	1.05.02.2.03.0002	1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0003	2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0004	3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0005	4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0006	5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	7,476,000	300,000	4.01%
	JUMLAH INDIKATOR				7,476,000	300,000	4.01%
	JUMLAH PROGRAM				6,488,008,985	6,425,182,650	99.03%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				113,516,500	0	0.00%
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			23,811,500	0	0.00%
	1.05.03.2.01.0003	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.01.0004	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	23,811,500	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				23,811,500	0	0.00%

No (1)	PROGRAM (2)	KEGIATAN (3)	SUB KEGIATAN (4)	SATUAN (5)	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN (8)
					(6)	(7)	(8)
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443			37,966,000	0	0.00%
	1.05.03.2.02.0001	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0002	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0003	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	37,966,000	0	0%
	1.05.03.2.02.0004	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0005	5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0006	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0007	7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0008	8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0009	9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0010	10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0011	11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0012	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0013	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0014	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0015	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0016	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0017	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				37,966,000	0	0.00%
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			37,450,500	0	0.00%
	1.05.03.2.03.0001	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0002	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0003	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	37,450,500	0	11.11%
	1.05.03.2.03.0007	4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0008	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0009	6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0010	7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0011	8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				37,450,500	0	0.00%
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			14,288,500	0	0.00%
	1.05.03.2.04.0001	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0002	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0003	3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0004	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%

No (1)	PROGRAM (2)	KEGIATAN (3)	SUB KEGIATAN (4)	SATUAN (5)	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN (6) (7)		SERAPAN (8)
	1.05.03.2.04.0005	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0006	6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0007	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0008	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0009	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0010	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	14,288,500	0	0%
	1.05.03.2.04.0011	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0012	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0013	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					14,288,500	0	0.00%
JUMLAH PROGRAM					113,516,500	0	0.00%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				1,517,489,516	1,434,238,186	94.51%
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			1,514,449,516	1,431,198,186	94.50%
	1.05.04.2.01.0001	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	11,742,500	9,920,000	84.48%
	1.05.04.2.01.0002	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,493,197,016	1,413,068,186	94.63%
	1.05.04.2.01.0003	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	9,510,000	8,210,000	86.33%
	1.05.04.2.01.0004	4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0005	5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0007	6	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0008	7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0011	8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0012	9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0013	10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0014	11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0015	12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0016	13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0017	14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%

No (1)	PROGRAM (2)	KEGIATAN (3)	SUB KEGIATAN (4)	SATUAN (5)	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN (6) (7)		SERAPAN (8)
	1.05.04.2.01.0018	15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0019	16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,514,449,516	1,431,198,186	94.50%
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			1,620,000	1,620,000	100.00%
	1.05.04.2.02.0001	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	1,620,000	1,620,000	100.00%
	1.05.04.2.02.0002	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,620,000	1,620,000	100.00%
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451			1,420,000	1,420,000	100.00%
	1.05.04.2.03.0001	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	1,420,000	1,420,000	100.00%
	JUMLAH INDIKATOR				1,420,000	1,420,000	100.00%
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			0	0	0.00%
	1.05.04.2.04.0001	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	0	0	0%
	1.05.04.2.04.0002	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	0	0	0%
	1.05.04.2.04.0003	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			0	0	0.00%
	1.05.04.2.05.0001	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0002	2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0004	3	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0005	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM				1,517,489,516	1,434,238,186	94.51%

6. Program dan Kegiatan Urusan Sosial

No (1)	PROGRAM (2)	KEGIATAN (3)	SUB KEGIATAN (4)	SATUAN (5)	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN (8)
					(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				981,544,000	977,673,235	99,61%
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			862,357,000	859,526,000	99,67%
		1	Penyediaan permakanaan	Orang	529,945,600	528,701,850	99,76%
		2	Penyediaan sandang	Orang	253,461,400	253,329,693	99,94%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	52,504,000	51,420,002	97,93%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2,478,000	2,455,000	99,07%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	18,214,000	17,905,000	98,30%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	0	0	0%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	1,758,000	1,750,000	99,54%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2,556,000	2,540,000	99,37%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	1,998,000	1,990,000	99,590%
	JUMLAH INDIKATOR				862.915.000	860.091.545	99,67%
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			119,187,000	118,146,690	99,12%
		1	Penyediaan makanan	Orang	79,216,000	78,892,940	99,59%
		2	Penyediaan sandang	Orang	39,971,000	39,253,750	98,20%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				119,187,000	118,146,690	99,12%
	JUMLAH PROGRAM				981,544,000	977,673,235	99,61%

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), yang penyusunannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta peraturan yang memuat pelaksanaan semua program dan kegiatan, keberhasilan, dan permasalahan yang dihadapi beserta solusinya, yang meliputi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Laporan ini memuat informasi tentang kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangka dengan DPRD Kabupaten Bangka yang harus dilaksanakan sebagai pengemban amanah masyarakat Kabupaten Bangka selama kurun waktu Tahun Anggaran 2025. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, analisa dan evaluasi digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang.

Dengan ungkapan syukur kehadiran Allah SWT dan seluruh masyarakat yang selama ini telah memberi banyak masukan bagi perbaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Bangka. Masukan dan saran evaluasi tetap kami harapkan agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Dan kebersamaan eksekutif dan legislatif yang terjalin selama ini semakin erat lagi.



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR :100.3.3.2/ 1212/1/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025**

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (bulan) setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam menyusun Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dibentuk tim penyusun dan tim previu untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan terkait penugasan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bangka Nomor: 100.3.3.2/0091/1/2025 tentang Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka tanggal 20 Januari 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 24 Desember 2025



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/ 1212/1/2025
TANGGAL : 24 DESEMBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN TIM REVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DAN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025

1.	Penanggungjawab	:	Bupati Bangka
2.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka
3.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka
4.	Tim Penyusun LPPD	:	1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka 5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka 6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka 8. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka 11. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka 12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka 14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka 15. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka 16. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka 17. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka 18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka 19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

		20. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka 21. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka 22. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka 23. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka 24. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka 25. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka 26. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka 27. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka 28. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka 29. Kepala Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka 30. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka 31. Seluruh Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka 32. Seluruh Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka
5.	Tim Penyusun LKPJ Bupati	: 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka 5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka 6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka 9. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka 12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka 13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka 14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka 15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka

		16. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka 17. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka 18. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka 19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka 20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka 21. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka 22. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka 23. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka 24. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka 25. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka 26. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka 27. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka 28. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka 29. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka 30. Kepala Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka 31. Camat Sungailiat Kabupaten Bangka 32. Camat Merawang Kabupaten Bangka 33. Camat Pemali Kabupaten Bangka 34. Camat Riau Silip Kabupaten Bangka 35. Camat Belinyu Kabupaten Bangka 36. Camat Puding Besar Kabupaten Bangka 37. Camat Bakam Kabupaten Bangka 38. Camat Mendo Barat Kabupaten Bangka 39. Seluruh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka 40. Seluruh Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka
6.	Tim Penyusun RLPPD	1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka 4. Seluruh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka

		5. Seluruh Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka
7.	Timi Reviu LPPD	1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Bangka 3. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Bangka

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI BANGKA,



FERY INSANI

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DAN TIM REVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DAN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025

- I. Tim Penyusun, mempunyai tugas:
 - a. menyusun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka;
 - c. menyelenggarakan pertemuan rutin secara koordinatif dan terprogram;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka; dan
 - e. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau tugas secara berkala tentang pencapaian kinerja Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
- II. Tim Reviu, mempunyai tugas:
 - a. menerima dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka yang disampaikan oleh Tim Penyusun untuk digunakan sebagai bahan reviu;
 - b. melaksanakan reviu atas dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka yang telah diterima;
 - c. melaksanakan koordinasi kepada Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka dalam upaya untuk memperoleh klarifikasi atas dokumen yang telah disampaikan Tim Penyusun sebagai satu rangkaian kegiatan reviu;
 - d. melaksanakan koordinasi bersama dengan Tim Penyusun dalam rangka pelaksanaan reviu dan penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka;

- e. menyampaikan catatan hasil revidi kepada Tim Penyusun agar ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah bersangkutan, dan
- f. menerima hasil tindak lanjut Perangkat Daerah atas catatan hasil revidi dan meneruskannya kepada sekretaris Tim Penyusun untuk digunakan sebagai dasar untuk finalisasi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI BANGKA,



FERY INSANI



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Yani Jalur Dua Sungailiat 33215 Telp. (0717) 92536 Faks. (0717) 92534
e-mail: infomasi@bangka.go.id website: www.bangka.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 188.45/ 003 /I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DAN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu dibentuknya Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan: Keputusan Bupati Bangka Nomor 100.3.3.2/1212/1/2025 tentang Tim Penyusun dan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025.

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 yang terdiri dari Tim Penyusun dan Sekretariat Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Penyusun:
 - 1) mempersiapkan dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025;
 - 2) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan analisis data;
 - 3) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati Bangka; dan
 - 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati Bangka.
 - b. Sekretariat:
 - 1) mempersiapkan kelengkapan administrasi kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025;
 - 2) melaksanakan proses pengumpulan data dan pengarsipan data Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dari Perangkat Daerah terkait; dan
 - 3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Tim Penyusun untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026 dengan mata anggaran 4.0102.2.01.0003.5.1.02.02.001.00080.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 05 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

THONY MARZA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 188.45/003 /I/2026
 TANGGAL : 05 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH,
 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DAN
 RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025

1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka
2.	Penanggungjawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka
3.	Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka
5.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Dwi Jati Marta, S.STP., M. Han
6.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Sugianto, SE
		Analisis Kebijakan Ahli Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Nursilawati, SP., M.Ec.Dev
		Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka/Tiara Septiari, S.IP
		Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Hivia Sari Devi, SH
		Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Aditya Nugraha, S.Tr.IP
		Fasilitator Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Aditio Braharjanto, S.Tr.IP
7.	Sekretariat	Penelaah Teknis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Heni Handayani, SKM
		Pamong Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Fitri Octaria, S.AP
		Pranata Komputer Terampil Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Nurmatini, A.Md
		Penata Layanan Operasional Bagian Tata

	Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Ferdiansyah, SE
	Penata Layanan Operasional Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Junaldi, SE
	Penata Layanan Operasional Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Sarifa Angelica Wulandari, S.AP
	Penata Layanan Operasional Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Jauharotul Ulumiyah, S.I.KOM

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 05 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,



THONY MARZA



BUPATI BANGKA

Sungailiat, 17 November 2025

Nomor : B_100.1.7/276/I/SETDA/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permintaan Data dan Dokumen
Pendukung Penyusunan LPPD
Tahun Anggaran 2025

Kepada
Yth. Daftar Terlampir
di -
Tempat

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka telah menyiapkan Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025 untuk dijadikan acuan bagi pejabat/ASN yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pengolahan dan penyampaian data dan dokumen pendukung, serta memastikan kesesuaian format dengan pedoman penyusunan LKPD yang dapat diakses pada link <https://bit.ly/PedomanLPPD2025>.

3. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan LPPD sebagai berikut:
- a. Sumber data dan dokumen pendukung yang disampaikan dan dilaporkan dalam bentuk dokumen *hardfile* yang dibubuhkan tandatangani per tanggal **31 Desember 2024** baik secara manual cap basah maupun elektronik;
 - b. Adapun data dan dokumen pendukung berupa *softfile* dapat disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) pada link <https://elppd.kemendagri.go.id/> dengan **username : *timlppd_kabupaten_bangka*** dan **password: 822869**;
 - c. Penjelasan dan informasi lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 dapat menghubungi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka melalui **Sdr. Dwi Jati Marta, S.STP., M.Han (Analisis Kebijakan Ahli Muda), Whatsapp: 0821-9350-8773**; dan
 - d. Mengingat batas waktu dan pentingnya penyampaian LPPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir oleh Tim Penyusun dan Tim Reviu LPPD, maka diharapkan seluruh Perangkat Daerah dapat menyampaikan data dan dokumen pendukung dimaksud kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka c.q Bagian Tata Pemerintahan paling lambat tanggal 28 Februari 2026.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

BUPATI BANGKA,



FERY INSANI

Lampiran I Surat Bupati Bangka
Nomor : B_100.1.7/276/I/SETDA/2025
Tanggal : 17 November 2025
Perihal : Permintaan Data dan Dokumen
Pendukung Penyusunan LPPD
Kabupaten Bangka Tahun
Anggaran 2025

Disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka;
3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka;
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka;
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka;
11. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangka;
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka;
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka;
16. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka;
17. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka;
18. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka;
19. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
20. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka;
21. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Bangka;
22. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka;
23. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka;



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
INSPEKTORAT
Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 700/ 4 /INSPEKTORAT/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA

INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Verifikasi dan Penilaian Dokumen dan Dasar Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf diatas, perlu membentuk Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 pada Inspektorat Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 41);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 pada Inspektorat Kabupaten Bangka dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas meyakinkan keandalan informasi yang disajikan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal : 6 Januari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 700/ 4 /INSPEKTORAT/2026
TANGGAL : 6 Januari 2026

SUSUNAN PERSONIL TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA

Susunan Tim	Personil
Penanggung Jawab	: Darius, S.Sos., CGCAE
Wakil Penanggung Jawab	: Rahmat Hidayat, SE
Pengendali Teknis	: Megawati, S.STP., M.Si
Ketua Tim	: Dewi Astuti, SH
Anggota	1. Mastura Bibi, S.Ip
	2. Muhammad Syahbana, S.Tr.IP
	3. Fauzah Ibtihaj, S.I.P
	4. Ginna Mutiasari, S.E
	5. Rio MARDiko, S.E
	6. Septriandi, S.E
	7. Dewi Alyanissa, S.H
	8. Hardiyanti, S.E
	9. Siskanda, S.E
	10. Prihatin Ningsih, S.E
	11. Dwarama Dhandiya Islami, S.E

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal : 6 Januari 2026

INSPEKTUR,





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
INSPEKTORAT

Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 700/...41.../SPT/INSPEKTORAT/2026

- Dasar : 1. Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor :100.3.3.2/13/ Inspektorat/2026 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko Tanggal 2 Januari 2026.
2. Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Nomor:700/4/Inspektorat/2026 Tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 pada Inspektorat Kabupaten Bangka tanggal 6 Januari 2026.
3. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Nomor : B100.1.7/042/I/SETDA/2026 perihal Permohonan Reviu :Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) Kabupaten Bangka TA. 2025 tanggal 25 Februari 2026.

MEMERINTAHKAN :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Hari
1	Darius, S.Sos.,CGCAE	Penanggung Jawab	5
2	Rahmat Hidayat,SE	Wakil Penanggung Jawab	5
3	Megawati, S.STP, M.Si	Pengendali Teknis	10
4	Dewi Astuti, SH.	Ketua Tim	10
5	Mastura Bibi, S.Ip	Anggota	10
6	Muhammad Syahbana, S.Tr.IP	Anggota	10
7	Fauzah Ibtihaj, S.I.P.	Anggota	10
8	Ginna Mutiasari, S.E.	Anggota	10
9	Rio Mardiko, S.E.	Anggota	10
10	Septriandi, S.E.	Anggota	10
11	Dewi Alyanissa, S.H.	Anggota	10
12	Hardiyanti, S.E.	Anggota	10
13	Siskanda, S.E.	Anggota	10
14	Prihatin Ningsih, S.E.	Anggota	10
15	Dwarama Dhandya Islami, S.E.	Anggota	10

Keperluan : Untuk melanjutkan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 pada Inspektorat Kabupaten Bangka, selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 25 Maret sampai dengan 8 April 2026.

Biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Bangka.

Pegawai Inspektorat Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugasnya tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap.

Penugasan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 25 Maret 2026



DARIUS, S.Sos.,CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700617 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 92470 Fax. (0717) 95474
E-Mail : bappeda@bangka.go.id Website : <http://wwwbappeda.bangka.go.id>

Sungailiat, 20 Februari 2026

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka
c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
di -
Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR: B-100.1.7/218 /BAPPEDA-I/2026

No	Naskah/Barang Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Data Capaian Indikator Kinerja Kunci Makro	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BANGKA,**



**Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
NIP. 19661214 1992031004**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 92470 Fax. (0717) 95474
E-Mail: bappeda@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id>

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2025

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,66	75,38	Kabupaten Bangka Dalam Angka, 2026
2	Persentase Penduduk Miskin	%	4,24	4,71	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,91	4,75	
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,44	4,96	
5	PDRB perkapita atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Ribu Rupiah	58.572	63.272	
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Indeks	0,211	0,218	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2026

SUNGAILIAT, 20 FEBRUARI 2026
KEPALA BAPPEDA KAB. BANGKA

R. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c NIP.
19661214 199203 1 004



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA**

Jl. Ahmad Yani (Jalur Dua), Sungailiat, Bangka Telp.: (0717) 92492
Homepage: <https://bangkakab.bps.go.id>, E-mail: bps1901@bps.go.id



Nomor : B-93/19010/HM.310/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Balasan Permintaan Data

Sungailiat, 27 Februari 2026

Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka
di –
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Nomor: B-100/012/I/SETDA/2026 perihal Permintaan Indikator Makro dan PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2025, dengan ini disampaikan data seperti terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bangka



Sri Hapsari Murni Handayani



* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN asli

Lampiran Surat

Nomor : B-93/19010/HM.310/2026

Tanggal : 27 Februari 2026

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2025**

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025	Keterangan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,66	75,38	
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	4,24	4,71	
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,91	4,75	
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,44	4,96	
5.	PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Ribu Rupiah	58.572	63.272	
6.	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	Indeks	0,2111	0,2182	

Jl. Ahmad Yani (Jalur Dua), Sungailiat, Bangka

Telp.: (0717) 92492, Fax.: (0717) 92492

Homepage: <https://bangkakab.bps.go.id>.

E-mail: bps1901@bps.go.id



* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN asli